

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU
TANI DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN
TEMANGGUNG**

SKRIPSI

**Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1)
Pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**OLEH :
MILA KHOIRUN NISSA
1510201072**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TIDAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
2020**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN KRANGGAN, KABUPATEN TEMANGGUNG

MILA KHOIRUN NISSA (1510201072)

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar.**

Kartu Tani dilatar belakangi oleh banyaknya penyalahgunaan pembelian pupuk bersubsidi oleh orang yang berkepentingan. Berdasarkan Kesepakatan Gubernur Jawa Tengah bersama Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B. 122-DIR/KPM/0/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat Penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Kranggan adalah salah satu Kecamatan yang wajib menjalankan kartu Tani. ketika pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan: Pertama kurang antusias masyarakat, sehingga menyebabkan informasi tidak dipahami secara menyeluruh, kedua sumber daya masyarakat rendah, ketiga mesin EDC tergantung pada sinyal dan baterai, dan keempat, kios pupuk lengkap yang ketiganya berada pada satu wiayah kelurahan tidak berdasarkan sasaran masyarakat. Berdasarkan pengamatan implementasi kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah berjalan cukup baik, meskipun ada kendala-kendala dalam implementasi kebijakan yang perlu di perbaiki. Tujuan Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi kebijakan program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder, dalam hal ini teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan program kartru Tani di Kecamatan Kranggan telah diimplementasikan dengan baik sesuai dengan teori Edward III dengan empat variabel untuk menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan Program Kartu Tani, empat variabel tersebut adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi. Meskipun masih terdapat kendala Jarak KPL yang jauh dari sasaran masyarakat, dan rendahnya SDM Petani, serta kurang antusias dari Petani.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kartu Tani

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF FARMER CARD PROGRAM POLICY IN KRANGGAN, TEMANGGUNG DISTRICT

MILA KHOIRUN NISSA (1510201072)

Department of Public Administration, Faculty of Social Sciences and Political
Science, Tidar University.

The Farmer Card is motivated by the many misuse of subsidized fertilizer purchases by interested parties. Based on the Central Java Governor Agreement with the Director of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Number 004/2015, Number B. 122-DIR / KPM / 0/2015, dated March 4, 2015, about Farmer Cards as a means of Redemption and payment of subsidized fertilizer for farmers in Central Java Province. Kranggan District is one of the Subdistricts that must run the Farmer Card. when there are obstacles: First, there is a lack of enthusiasm from the community, so that information is not comprehensively understood, second is low community resources, third EDC machines depend on signals and batteries, and fourth, complete fertilizer kiosks, all of which are in one area of the village are not based community target. Based on the observations of the implementation of the farmer code in Kranggan sub-district, it has run quite well, although there are obstacles in the implementation of policies that need to be improved. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of the Kartu Tani program in the District of Kranggan. The research method used in this research is descriptive qualitative using primary and secondary data, in this case the data collection techniques are interviews, observation, and documentation. From the results of this research, it can be seen that the implementation of the Kartani Farmers Program policy in Kranggan Subdistrict has been implemented well in accordance with the Edward III theory with four variables to determine the success of the Farmer Card Program implementation, the four variables are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Although there are still obstacles the distance of the fertilizer shop that is far from the target community, the low resources of farmrs, and less enthusiasm from Farmers.

Key Words: Implementation, Policy, Farmer Card

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Kartu
Tani Tani di Kecamatan Kranggan
Kabupaten Temanggung

Nama : Mila Khoirun Nissa

NPM : 1510201072

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

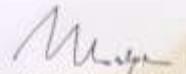
Skripsi ini di setujui pada tanggal : 04 Maret 2020

Pembimbing I



Dr. Eny Boedi Orbawati, M.Si.
NIK. 196709281990102C066

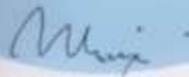
Pembimbing II



Dr. Sri Mulyani, M.Si.
NIK. 196206011987102C053

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. Sri Mulyani, M.Si.
NIK. 196206011987102C053

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

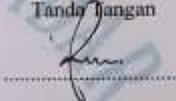
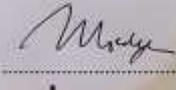
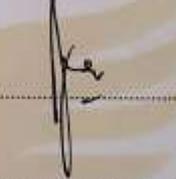
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN
KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Ditulis oleh:

MILA KHOIRUN NISSA

NPM : 1510201072

Telah diuji dan disahkan oleh Tim Penguji :

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Pembimbing I	Dr. Eny Boedi Orbawati, M.Si.	
NIK	196709281990102C066	
Pembimbing II	Dr. Sri Mulyani, M.Si.	
NIK	196206011987102C053	
Penguji	Drs. Sujatmiko, M.P.A.	
NIK	196210151988032C058	

Magelang, 04 Maret 2020

Mengetahui,

Dekan

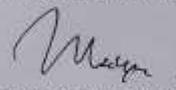
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar



Dr. Sri Suwitri, M.Si.
NIP. 196206141987032001

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Sri Mulyani, M.Si.
NIK. 196206011987102C053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Ada usaha pasti ada hasil
- Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung, buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak (Ralph Walda Emerson)
- Dua musuh besar kesuksesab adalah penundaan dan alasan (Jaya Setiabudi)
- Mulailah dari tempatmu berada. Gunakan yang kau punya. Lakukan yang kau bisa.

PERSEMBAHAN:

- Orangtua saya, Bapak Khoyin, Ibu Rusti Isti Kharoh
- Adik saya, Luluk Khasna
- Calon suami saya, Khanafi
- Sahabat saya Sugiarti, Sakinatus Zahro, Uswatun Khasanah, Nia Nurohmah
- Seluruh keluarga dan sahabat saya yang saya sayangi
- Teman seangkatan khususnya kelas B serta seluruh teman-teman seperjuangan FISIP angkatan 2015
- Sahabat-Sahabat PMII Magelang, terutama Rayon Notonegoro yang saya sayangi
- Almamater Untidar

PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mila Khoirun Nissa

NPM : 1510201072

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Magelang, 04 Maret 2020



Mila Khoirun Nissa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kenikmatan hidup yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, dan para sahabatnya, dan kita pada umumnya. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, pembuatan skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG” . Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Administrasi Negara.

Skripsi ini tentunya tak lepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung peneliti secara moril dan materil. Maka dengan ketulusan hati, peneliti akan mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Sri Suwitri, M.si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah membimbing dalam penyusunan skripsi.
2. Dra. Sri Mulyani, M.si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar dan juga Pembimbing II dalam penyusunan skripsi yang telah membantu dan membimbing peneliti dalam pembuatan skripsi. Terima kasih atas arahan dan pembelajaran selama proses penyusunan skripsi.
3. Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.si. selaku pembimbing I dalam penyusunan skripsi yang telah membantu dan membimbing dalam pembuatan skripsi. Terimakasih atas arahan dan pembelajaran selama proses penyusunan skripsi

4. Semua Dosen dan Staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
5. Bapak Ir. C Masrik Amin Zuhdi, MM Selaku Kepala Dinas dan seluruh Staf/Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
6. Kepada Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan seluruh staf/ pegawai Kecamatan Kranggan yang telah memberikan izin untuk penelitian.
7. Untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan motivasi baik moril maupun materil dan tak pernah lelah memberikan do'a nya yang sangat berharga.
8. Seluruh Keluarga yang telah membantu, mendoakan, serta mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan kelas B Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar serta teman-teman seangkatan tahun 2015 yang telah memberikan dukungan dalam pengerjaan skripsi sehingga dapat selesai pada waktunya.

Peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dalam kesempatan ini penulis hendak mohon maaf yang besar-besarnya apabila ada kesalahan yang kurang berkenan selama penelitian. Peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada yang membaca. Demikian yang disampaikan. Peneliti mengucapkan terimakasih.

Magelang, 04 Maret 2020

Peneliti

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Perbedaan Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi	5
Tabel 1.2 Persentase Serapan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Kartu Tani	6
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan	37
Tabel 3.1 Fokus Kajian	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Mata Pencaharian di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018	52
Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk 10 Tahun Keatas Kecamatan Kranggan Tahun 2017	58
Tabel 4.3 Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Kranggan	59
Tabel 4.4 Kios Pupuk Lengkap Kecamatan Kranggan	59
Tabel 4.5. Data Pesanan dan Penetapan Pupuk Petani Kecamatan Kranggan Kranggan Tahun 2020	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kartu Tani	32
Gambar 2.2 Kerangka Pikir.....	42
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung	53
Gambar 4.2 Peta Kecamatan Kranggan	56
Gambar 4.3 Alur Pembuatan Kartu Tani	101



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	131
Lampiran 2 Transkrip Hasil Wawancara	135
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	175



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Rumusan Masalah	8
1.3.Tujuan Penelitian	8
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1.Kebijakan Publik	10
2.2.Implementasi Kebijakan.....	13
2.3.Model Implementasi Kebijakan	14
2.4.Program	30
2.4.1 Kartu Tani	32
2.4.2.Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran Kartu Tani.....	34
2.5.Penelitian Yang Relevan	37
2.6.Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1.Pendekatan Penelitian	43

3.2.Lokasi Penelitian	43
3.3.Sasaran Penelitian	44
3.4.Fokus Kajian	44
3.5.Teknik Keabsahan Data	45
3.6.Sumber Data	46
3.7.Teknik Pemilihan Informan.....	46
3.8.Teknik Pengumpulan Data	47
3.9.Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
4.2.Analisa Hasil Penelitian	60
4.3.Pembahasan	110
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1.Simpulan.....	124
5.2.Saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN.....	130

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat subur, *gemah ripah loh jinawi* (memiliki kekayaan alam yang melimpah), yaitu ungkapan yang sering di sebutkan untuk Indonesia. Dari sisi geografis Indonesia terletak pada daerah tropis yang memiliki curah hujan yang tinggi sehingga banyak jenis tumbuhan yang hidup dan tumbuh dengan cepat. Selain itu dari sisi geologi, indonesia terletak pada titik pergerakan lempeng tektonik sehingga banyak terbentuk pegunungan yang kaya akan mineral. Sehingga sebagian besar penduduk indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik pada february 2016, terdapat 31,74% atau 38,28 juta angkatan kerja yang berkerja pada sektor pertanian.

Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi negara, berbagai investasi dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Salah satu kebijakannya yaitu melalui pupuk bersubdi, yang telah ditetapkan oleh keputusan menteri, melalui surat keputusan menperindag No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003, tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian (<http://www.kemenprin.go.id> . diakses 12 february 2018)

Untuk meningkatkan kualitas para Petani di Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah mengeluarkan Kesepakatan bersama dengan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B. 122-DIR/KPM/0/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat Penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah. Kartu tani adalah alat

transaksi berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Dengan adanya Kartu Tani diharapkan dapat memudahkan petani dalam mendapatkan saluran pupuk bersubsidi dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya. Disisi lain, Kartu juga ini akan memudahkan pemerintah khususnya Kementerian Pertanian dalam hal mengontrol peredaran pupuk di Indonesia sehingga dapat terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis,waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani.

Kartu Tani bukan mempermudah petani dalam mengakses kebutuhan sarana produksi pertanian, tetapi malah mempersulit petani. Dalam aksi yang disuarakan puluhan petani yang tergabung dalam Gerakan Tani Boyolali (GENI) di Tugu Jagung Korlap Aksi Y. M. Hanafi, dalam orasinya menegaskan bahwa kartu tani justru membuat petani kesusahan dalam mengakses pupuk. Karena dengan kartu tani, petani justru dibuat ribet dan bingung dengan segala macam administrasinya. Denga kartu tani mengharuskan petani untuk menabung terlebih dahulu, jika tidak punya tabungan petani tidak bisa mendapatkan pupuk. Padahal kondisi ekonomi petani di Tanah Air termasuk golongan menengah kebawah. Bahkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat, dengan keterbatasan modal usaha , para petani biasanya mengambil pupuk di kios dengan pembayaran setelah panen atau istilah didesa disebut yarnen.

(<https://www.google.com/amp/amp.wartaekonomi.co.id/berita17824/alih-alih-mempermudah-kartu-tani-malah-menyengsarakan-petani.html>. Diakses pada tanggal 26 desember 2019)

Kartu Tani untuk pembelian pupuk bersubsidi seharusnya sudah mulai diterapkan pada musim tanam 2018, akan tetapi beberapa petani mengaku hal tersebut sangat merepotkan, selain itu juga ada beberapa petani yang belum menggunakan kartu tani. Purbalingga menjadi salah satu yang terbaik tingkat realisasi kartu tani di Jawa Tengah, namun rupanya penggunaan kartu tani masih berkisar diangka 44,5 persen, tepatnya 26.097 petani. Ini berarti tingkat penggunaan kartu tani di Purbalingga masih rendah. Kartu tani hanya di berikan kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan. Pemilik lahan biasanya bukanlah seorang petani. Distribusi kartu tani kepada pemilik lahan dinilai akan meningkatkan risiko penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Soal realisasi kartu tani yang langsung kepada petani penggarap, para petani penggarap mengeluh perubahan luasan lahan kerap menyebabkan petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, Sebab dalam kartu tani sudah tertera luasan lahan sesuai dengan pendaftaran awal. Padahal, petani penggarap kerap menyewa sawah lebih luas pada tahun berikutnya. Sementara penyalur atau pengecer sangat ketat mendistribusikan pupuk sesuai peruntukannya. Akibatnya, petani penggarap kelabakan. Sebagian petani bahkan mencari jalan pintas untuk memperoleh pupuk. Mereka membeli pupuk bersubsidi ke wilayah tetangga, kabupaten Banyumas yang berjarak 20 kilometer. Yang kebetulan distribusi pupuk bersubsidi di Banyumas tidak seketat di Purbalingga.

(<https://m.liputan6.com/regional/read/4058677/balada-kartu-tani-purbalingga> diakses pada tanggal 26 desember 2019).

Meskipun sudah ada kartu Tani, Petani Desa Pagersari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok (RDKK) kuota pupuk ada, tetapi kenyataan di lapangan saat butuh pupuk, petani sudah menyiapkan dana, ternyata pupuk tidak ada di kios Pupuk Lengkap (KPL). Kekurangan pupuk ini dapat berdampak buruk terhadap kurangnya Produktifitas dan kualitas hasil pertanian. Petani menuntut adanya ketersediaan pupuk bersubsidi, penambahan kuota pupuk, penambahan kuota pupuk, penambahan distributor atau KPL, dan memberikan akses langsung petani pada pupuk serta kemudahan dalam mendapatkan kartu tani. Petani lainnya, menyampaikan ada kasus ketidaksetaraan kartu tani dengan pemegangnya, atau ada kartu tani yang tertukar, sehingga petani tidak bisa mendapatkan bahkan menebus pupuk bersubsidi. Di Temanggung ada sekitar 1200 kartu tani yang tertukar, disebabkan karena ada nama desa dan dusun yang sama.

(Sumber:https://www.krjogja.com/web/news/read/118881/kelangkaan_terjadi_petani_temanggung_kesulitan_dapatkan_pupuk).

Pembelian pupuk bersubsidi minimal harus satu sak (50 Kg) padahal kebutuhan petani belum tentu sebanyak itu, kadang hanya butuh satu atau dua kilo saja. Untuk membeli pupuk 50 Kg juga bukan uang yang sedikit bagi para petani. Petani terpaksa membeli pupuk non subsidi yang harganya bisa mencapai 3 kali lipat lebih. Masalah lainnya yaitu mengenai alokasi pupuk bersubsidi jauh dibawah data pemesanan pupuk bersubsidi diawal. Bahkan terkadang pupuk yang didapat hanya 10% dari data pemesanan, jika petani kekurangan pupuk maka terpaksa selain memakai pupuk organik yaitu membeli pupuk non subsidi. Sedangkan jika petani harus membeli pupuk non subsidi, harga pupuk Nonsubsidi selisihnya banyak dibandingkan dengan pupuk yang bersubsidi. Berikut informasi terbaru harga pupuk subsidi dan non subsidi di pasaran diindonesia.

Tabel 1.1 Daftar Perbedaan Harga Pupuk Subsidi dan Non Subsidi

Pupuk Bersubsidi		Pupuk Non Subsidi	
Jenis Pupuk	Harga	Jenis Pupuk	Harga
Pupuk Urea	90.000 per 50 Kg	Pupuk Urea	250.000 per 50 Kg
Pupuk ZA	70.000 per 50 Kg	Pupuk ZA	150.000 per 50 Kg
Pupuk SP-36	100.000 per 50 Kg	Pupuk NPK Mutiara	450.000 per 50 Kg
Pupuk NPK	115.000 per 50 Kg	Pupuk NPK Pak Tani	415.000 per 50 Kg
Pupuk Organik	20.000 per 40 Kg	Pupuk KCI Mahkota	300.000 per 50 Kg
		Pupuk GEMARI (cair)	90.000 per liter
		Pupuk ZK	8.900 per Kg

Sumber : <https://harga.web.id/harga-pupuk-subsidi-non-subsidi-dan-organik.info>

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung merupakan salah satu Kecamatan di Jawa Tengah yang telah menjalankan program kartu tani, Kecamatan Kranggan berada pada ketinggian 472 mdpl, dengan luas wilayah Kranggan 228 ha yang terbagi dalam lahan sawah seluas 133 ha dan lahan bukan sawah 95 ha yang dipergunakan untuk bangunan/pekarangan, ladang/tegalan/huma, perkebunan rakyat dan lainnya. Ini berarti luas sawah lebih besar dibandingkan dengan luas yang bukan sawah, otomatis penduduk yang bermatapencaharian sebagai petani juga banyak. Tanaman pangan yang dikembangkan di Kecamatan Kranggan adalah padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, dan kacang tanah. Petani tidak terlepas dari pupuk. Untuk membeli pupuk, maka petani harus mempunyai kartu tani untuk mendapatkan subsidi pupuk, Kecamatan Kranggan dalam serapan penggunaan pupuk bersubsidi masih menempati bagian paling bawah sekabupaten temanggung, dapat di lihat melalui bagan dibawah ini:

Tabel 1.2 Persentase Serapan Pupuk Bersubsidi Berdasarkan Kartu Tani

PERSENTASE SERAPAN PUPUK BERSUBSIDI BERDASAR KARTU TANI PERIODE 20 Januari 2020 KAB. TEMANGGUNG									
URAI	SP	ZA	SPK	DRS					
KEDU	3,76	TRETEP	1,01	CANDIROTO	6,10	CANDIROTO	1,67	GEMAWANG	0,91
CANDIROTO	5,44	KANDANGAN	1,94	KLEDUNG	1,41	TRETEP	2,45	KLEDUNG	0,84
TRETEP	5,10	CANDIROTO	1,52	NGADIREJO	3,74	JUMU	3,01	PRINGSURAT	0,60
KLEDUNG	1,38	KLEDUNG	1,32	BANGSAN	1,23	KANDANGAN	1,94	JUMU	0,29
JUMU	2,38	JUMU	1,21	TRETEP	1,02	KLEDUNG	1,25	NGADIREJO	0,18
KANDANGAN	1,01	BANGSAN	0,75	JUMU	1,00	BEJEN	1,17	TEMANGGUNG	0,17
TEMBARAK	1,36	SELOPAMPANG	0,71	KANDANGAN	1,04	NGADIREJO	1,08	TLOGOMULYO	0,14
TEMANGGUNG	1,67	BEJEN	0,40	TLOGOMULYO	1,17	KEDU	1,06	KANDANGAN	0,10
KALORAN	1,64	GEMAWANG	0,49	BULU	0,39	TLOGOMULYO	0,94	BULU	0,08
GEMAWANG	1,68	TLOGOMULYO	0,59	KEDU	0,54	TEMBARAK	0,03	TRETEP	0,04
BEJEN	1,40	PRINGSURAT	0,58	SELOPAMPANG	0,47	SELOPAMPANG	0,82	SELOPAMPANG	0,04
NGADIREJO	1,30	TEMBARAK	0,29	WONOBAYO	0,47	WONOBAYO	0,81	TEMBARAK	0,04
SELOPAMPANG	1,18	BULU	0,57	TEMBARAK	0,79	GEMAWANG	0,79	KRANGGAN	0,02
BANGSAN	1,12	WONOBAYO	0,34	GEMAWANG	0,73	BANGSAN	0,08	BANGSAN	0,02
PRINGSURAT	0,88	TEMANGGUNG	0,01	BEJEN	0,71	PRINGSURAT	0,64	WONOBAYO	0,00
WONOBAYO	0,81	KRANGGAN	0,04	TEMANGGUNG	0,42	BULU	0,64	KEDU	0,00
TLOGOMULYO	0,68	KEDU	0,42	PRINGSURAT	0,58	TEMANGGUNG	0,38	PARAKAN	0,00
KRANGGAN	0,48	NGADIREJO	0,23	KRANGGAN	0,40	KRANGGAN	0,21	CANDIROTO	0,00
BULU	0,28	KALORAN	0,19	KALORAN	0,12	KALORAN	0,08	BEJEN	0,00
PARAKAN	0,16	PARAKAN	0,10	PARAKAN	0,10	PARAKAN	0,09	KALORAN	0,00

Sumber: Data Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan

di Kecamatan Kranggan terdapat tiga kios Pupuk yang ketiganya semua berada di satu wilayah yaitu di daerah Kranggan saja atau tidak menyebar, akibatnya bagi petani di wilayah perbatasan kecamatan Kranggan kesulitan jika harus mengambil pupuk bersubsidi di Desa Kranggan karena jarak tempuh yang lumayan jauh, mereka lebih memilih beli di kios kecamatan lain yang jaraknya lebih dekat dari wilayah tempat tinggal mereka, dan anehnya meskipun membelinya di kecamatan lain tapi tetap dapat membeli pupuk bersubsidi tanpa menggunakan Kartu Tani, akibatnya, ketika petani di wilayah kecamatan tersebut mau membeli pupuk subsidi terkadang stok pupuk sudah habis. hal ini menandakan bahwa belum efisiennya program Kartu Tani.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Koko widiatmoko, Suwanto dan Bakti Wahyui Utami, terdapat perbedaan persepsi terhadap Program Kartu Tani yang signifikan antara petani yang jarak aksesnya jauh dari Kantor Kecamatan dan

Bank BRI dengan petani yang jarak aksesnya dekat dari Kantor Kecamatan dan Bank BRI pada taraf kepercayaan 95%. Perbedaan persepsi tersebut meliputi petani yang jarak yang dekat dari akses informasi cenderung lebih cepat dan lebih jelas dari pada petani yang jarak aksesnya lebih jauh dari akses informasi, sehingga petani yang jaraknya dekat dengan akses informasi relatif lebih paham dan tentu persepsinya lebih baik terkait program kartu tani, sedangkan yang jaraknya jauh dari pusat informasi mereka cenderung pasif. Padahal petani yang mampu berinteraksi dengan sumber inovasi/informasi seperti dengan para penyuluh, petugas dari dinas dan ketua kelompok akan berpeluang menggali informasi, mengkonsultasikan permasalahan, dan mendiskusikan hal-hal baru yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berusaha tani.

Berdasarkan Informasi dari beberapa Petani di kecamatan Kranggan, menurut mereka penggunaan Kartu Tani belum efektif. Ada beberapa permasalahan yang di hadapi mengenai kartu Tani, yaitu diantaranya kebanyakan Para petani adalah masyarakat dengan Pendidikan rendah, jadi jika di hadapkan dengan kartu tani masih banyak yang tidak paham. selain itu, kartu yang berupa Kartu ATM untuk menabung kebanyakan malah nganggur tidak terisi karena mayoritas petani di Kecamatan Kranggan tergolong masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, pendapatan mereka sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bahkan terkadang kurang. Permasalahan lainnya yaitu Kebanyakan Petani mereka adalah Petani Penggarap Sawah, lahannya setiap tahun dapat berubah-ubah, akibatnya ini menyulitkan petani penggarap sawah sulit untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga harus membeli pupuk Non subsidi. Oleh karena itu Penelitian ini perlu dilakukan karena

dapat memberikan gambaran dan penjelasan yang lebih rinci mengenai Implementasi Kebijakan Kartu Tani dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.

1.2.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini memusat perhatian pada implementasi kebijakan Kartu Tani dalam upaya mensejahterakan Petani di Kecamatan Kranggan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian:

“Bagaimanakah implementasi kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan?”

1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan, apakah sudah sesuai dengan tujuan kebijakan apa belum.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian aktifitas dan hasil penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis, yaitu:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan mengenai ilmu Administrasi Negara terutama terkait implementasi kebijakan Kartu Tani

2. Manfaat Praktis, yaitu:

a. Bagi Dinas Pertanian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dinas Pertanian dalam hal mengambil keputusan terkait dengan Kebijakan Kartu Tani.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ni memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan layanan pelaksanaan tugas kepada kalangan yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan mengenai Kebijakan Kartu Tani serta dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya . Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti kebijakan dan dapat digunakan sebagai informasi tambahan bagi perencanaan kebijakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan tindakan-tindakan terpola (*pattern of actions*), yang mengarah pada tujuan tertentu yang disepakati bukan sekedar keputusan acak (*at random decision*) untuk melakukan sesuatu. Pengertian kebijakan publik menurut Dye (Mulyadi, 2015:36), kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Pada konsep tersebut, kebijakan dipilih dalam dua dimensi keputusan antara melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Kebijakan menurut Anderson merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep ini membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.

Menurut James Anderson (dalam Wahab, 2016:8) kebijakan itu ialah suatu “*purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi). Menurut William J (dalam Islamy, 2017:1.5) Kebijakan Publik adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh

seorang aktor atau sekelompok aktor politik mengenai pemilihan tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu dimana keputusan-keputusan tersebut seyogyanya secara prinsip masih berada dalam kekuasaan aktor-aktor tersebut untuk mencapainya (*Public policy as a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision should, in principle, be within the power of those actor to achieve*).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau aktor-aktor pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Adapun sebuah kebijakan mempunyai tahap-tahap. Tahap-tahap yang sebagaimana dikemukakan oleh william dunn dalam Budi Winarno, (2012 : 35-37) yaitu:

1. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan.

2. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut bersasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan. Masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah.

3. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut di adopsi dengan dari dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Tahap Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial pada manusia. Pada tahap ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh pelaksana.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan-kebijakan yang dibuat telah mampu menyelesaikan masalah.

Namun proses Kebijakan Publik menurut Hogwood dan Gunn (1986) dalam Wahab (2012) memiliki kemungkinan untuk mengalami kegagalan. Berikut ini dua kategori besar kegagalan kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn, yaitu *non-implementation* (tidak terimplementasikan) dan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). *Non-implementation* dapat dipahami sebagai kebijakan yang gagal dalam pencapaian tujuannya karena tidak diimplementasikan oleh para aktor-aktor terkait. *Unsuccessful implementation* sebagai kebijakan yang telah diimplementasikan akan tetapi gagal untuk mencapai tujuan kebijakan publik.

2.2. Implementasi Kebijakan

Istilah Implementasi mulai muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu. Yang pertama menggunakan istilah tersebut adalah Harold Laswell (dalam Purwanto, 2015 :17). Sebagai ilmuwan yang pertama kali mengembangkan studi tentang kebijakan publik, Laswell mengemukakan suatu pendekatan yang ia sebut sebagai pendekatan proses (*policy Process approach*). Menurutnya, agar ilmuwan memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan , yaitu: agenda-setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, formulasi, dan terminasi.

Secara etimologis, implementasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to implement* dalam kamus webster (dalam Herabudin, 2016 :114) disebutkan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means to carryng out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Pengertian implementasi tersebut dijelaskan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Herabudin, 2016 :114) bahwa implementasi adalah “tindakan yang dilakukan oleh individu/ pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Model ini mengasumsi bahwa implementasi kebijakan berkerja sejalan dengan proses kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam

proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan.

Pengertian Implementasi secara sederhana dirumuskan oleh Wahab (dalam Anggara (2012:530) sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan, yang biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Bagi Penulis, setelah mempelajari berbagai definisi tentang implementasi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, implementasi intinya adalah tindakan yang dilakukan oleh individu/ pemerintah setelah keputusan kebijakan itu dikeluarkan kepada Kelompok sasaran Kebijakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dari proses dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, apakah sesuai dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan atau tidak.

2.3. Model Implementasi Kebijakan Publik

Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni pendekatan *top down* dan *bottom up*. Istilah tersebut menurut Lester dan Stewart (2000:18) dinamakan *the command and control approach* (pendekatan kontrol dan komando, yang mirip dengan *top down approach*) dan *the market approach* (pendekatan pasar, yang mirip dengan *bottom up approach*). Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya (agustino,2008:140).

Pendekatan *top down* merupakan pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan sedangkan pendekatan *bottom up*

muncul untuk melengkapi perbedaan-perbedaan, namun pada dasarnya mereka bertitik tolak pada asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tercentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pusat. Pendekatan *top down* bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administrator-administrator atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi inti pendekatan top down adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan tingkat pusat (Agustino,2008:140).

Sedangkan pendekatan *bottom up* memandang bahwa implementasi kebijakan tidak dirumuskan oleh lembaga yang tercentralisir dari pusat. Melainkan *bottom up* terpancang dari keputusan-keputusan yang ditetapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya *bottom up* adalah model implementasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, system sosio-kultur yang mengada agar kebijakan tersebut tidak kontra-produktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri (Agustino,2008:156).

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street level bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi

kebijakan. Berangkat dari prespektif tersebut, maka timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan tersebut?
- b. Sejauh mana tujuan kebijakan tercapai?
- c. Factor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan?
- d. Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman lapangan? (dalam Agustino, 2008: 141)

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh beberapa variable atau factor, dan masing-masing variable tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dibawah ini akan diuraikan secara ringkas ide-ide dasar yang disampaikan oleh tiga tokoh dalam menjelaskan terapan implementasi kebijakan yang mereka kemukakan.

1. Teori yang disebut dengan A model of The Policy Implementation dari Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975)

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van meter dan Carl Van Horn (1975) disebut dengan *A model of The Policy Implementation*. Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn (1975), yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut, adalah:

a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van

Horn (1975), identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan.

Dalam melakukan studi implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, kita dapat menggunakan pernyataan-pernyataan dari para pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen. Akan tetapi, dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti perorangan. Pada akhirnya, pilihan ukuran-ukuran pencapaian bergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

b. Sumber daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdayasumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu.

c. Karakteristik Agen/ Badan Pelaksana

Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975), maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn (1975) menyetengahkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan:

- 1) Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hierarkis terhadap keputusankeputusan sub-unti dan proses-proses dalam badanbadan pelaksana;
- 3) Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota-anggota legislatif dan eksekutif);
- 4) Vitalitas suatu organisasi;
- 5) Tingkat komunikasi-komunikasi “terbuka”, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horizontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

- 6) Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan “pembuat keputusan” atau “pelaksana keputusan”.

d. Sikap/ Kecenderungan (Disposition) para pelaksana

Van Meter dan Van Horn (1975) berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana dalam yuridiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

Arah kecenderungan-kecenderungan pelaksana terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Para pelaksana mungkin gagal dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan dengan tepat karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Dan begitupun sebaliknya.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang-orang yang bertanggungjawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni: tujuan-tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-

kesetiaan ekstra organisasi, perasaan akan kepentingan diri sendiri, atau karena hubungan-hubungan yang ada dan yang lebih disenangi.

e. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan dan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

Dalam hubungan-hubungan antarorganisasi maupun antarpemerintah, dua tipe kegiatan pelaksanaan merupakan hal yang paling penting. Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan. Kedua, atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn (1975) adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2. Teori tentang Model Implementasi dari George C. Edwards III

Teori implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yaitu:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects” (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan pernyataan dari George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhinya.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan

publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*). Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa “*probably the most essential resources in implementing policy is staff*”. Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan “*no matter how clear and consistent implementation order are and no matter accuratel they 19 are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective*”

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya *“budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public”*. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa *“new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program”*. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya Peralatan

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam

memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan : *Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed*

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa: Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan

para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”.

Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2008:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

d. Struktur birokrasi

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair*).
- 2) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
- 3) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
- 4) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
- 5) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
- 6) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors*) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena

ketidakefisienan struktur birokrasi”. Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: ”*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi”. Menurut Winarno (2005:150), ”*Standard operational procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas”. Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam

cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi"

Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa:

struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif".

3. Model Implementasi Kebijakan Publik Merilee S. Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua hal yakni:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampaknya terhadap masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik juga menurut Grindle dalam Agustino (2008:154), ditentukan juga oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri yang terdiri atas konten dan konteks kebijakan:

1. Konten kebijakan, terdiri dari kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber-sumber daya yang digunakan.
2. Konteks kebijakan, terdiri dari kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Berdasarkan beberapa uraian tentang model implementasi kebijakan tersebut, pada penelitian ini peneliti akan menganalisis pelaksanaan Implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Edward III. Model ini memiliki keunggulan yakni dapat menawarkan kerangka berpikir untuk menjelaskan dan menganalisis proses implementasi kebijakan. Selain itu model ini juga memberikan penjelasan-penjelasan bagi pencapaian-pencapaian dan kegagalan program. Model ini menitikberatkan pada sikap, perilaku dan kinerja para perilaku di dalam implementasi kebijakan.

2.4. Program

Program merupakan bagian dari perencanaan. Secara umum pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka program merupakan sebuah sistem yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali

tetapi berkesinambungan. Program dapat diartikan juga penjabaran dari suatu perencanaan atau sering pula diartikan sebagai suatu kerangka dasar dari pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program merupakan sebuah sistem. Sistem mempunyai pengertian satu kesatuan dari beberapa komponen program yang saling berkaitan dan berkerja sama satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem (Arikunto, 2008).

Kebijakan-kebijakan public yang pada umumnya masih abstrak diterjemahkan kedalam program-program yang lebih operasional yang kesemuanya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran yang telah dinyatakan dalam kebijakan tersebut. (Abdul Wahab, 2012: 18)

Penjabaran suatu program sedikitnyaterlihat dari 5 (lima) hal yaitu:

1. Berbagai sasaran konkrit yang hendak dicapai
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu.
3. Besarnya biaya yang diperlukan beserta identifikasi sumbernya.
4. Jenis-jenis kegiatan operasional yang akan dilaksanakan.
5. Tenaga kerja yang dibutuhkan, baik ditinjau dari sudut kualifikasinya maupun ditinjau dari segi jumlahnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa program terdiri dari beberapa komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling menunjang dalam rangka mencapai suatu tujuan. Komponen program adalah bagian yang membangun sebuah program yang saling terkait dan merupakan factor penentu keberhasilan program. Komponen-komponen dari tiap program tidak sama, komponen sangat dipengaruhi dari tingkat dari kompleksitas kegiatan program yang bersangkutan.

Program dalam konteks implementasi kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu:

1. Merancang bangun (design) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan prestasi yang jelas serta biaya dan waktu.
2. Melaksanakan (application) program dengan mendaya gunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat.
3. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksana kebijakan (tachjan, 2006: 35)

Program merupakan satuan kegiatan yang terintegrasi dengan implementasi kebijakan publik. Program Kartu Tani merupakan salah satu instrumen pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi masalah distribusi pupuk bersubsidi.

2.4.1 Kartu Tani

Gambar 2.1 Kartu Tani



Sumber: <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/>

Kebijakan kartu Tani merupakan bantuan dari pemerintah untuk Petani kurang mampu/ miskin dengan harapan peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

1. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI)

Permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dapat diatasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia (SIMPI) melalui Kartu Tani yang dibagikan kepada masing-masing petani digunakan sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi. Aplikasi SIMPI diharapkan penyaluran pupuk bersubsidi akan lebih terjamin dan tepat sasaran bagi para petani penerima pupuk bersubsidi.

SIMPI adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani. Aplikasi SIMPI digunakan untuk melakukan input data dan menyimpan database petani yang berisi diantaranya data yang terdapat di Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), identitas pribadi dan jumlah alokasi pupuk bersubsidi serta monitoring transaksi pembayaran pupuk bersubsidi untuk petani di pengecer yang telah ditentukan oleh pemerintah. Aplikasi SIMPI membutuhkan data usulan RDKK masing-masing kelompok tani dan data alokasi pupuk bersubsidi, serta administrator user yang memiliki akses untuk mengelola (membuat/mengubah/menghapus) seluruh User yang ada dalam aplikasi SIMPI.

2. Progam Kartu Tani

Progam Kartu Tani merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pupuk bersubsidi. Menurut Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (2017) Kartu Tani yaitu kartu sarana akses layanan perbankan terintegrasi yang

berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi yang dimiliki oleh petani. Kartu Tani berupa kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin Electronic Data Capture (EDC) BRI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Setiap transaksi penebusan pupuk bersubsidi secara otomatis akan mengurangi alokasi pupuk bersubsidi dan saldo di dalam rekening tabungan. Di dalam sistem manajemen kuota akan tersimpan data base petani sesuai dengan RDKK dan kuota masing-masing petani, serta termonitor data petani yang membeli pupuk bersubsidi, jumlah pupuk yang sudah terjual dan sisa pupuk bersubsidi yang belum terbeli.

2.4.2 Maksud, Tujuan, Manfaat dan Sasaran Kartu Tani

1. Maksud Kartu Tani

Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Aplikasi SIMPI melalui Kartu Tani adalah terwujudnya pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima.

2. Tujuan Kartu Tani

Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) serta pemberian layanan perbankan bagi petani.

3. Manfaat Kartu Tani

a. Bagi Pemerintah

1. Memiliki database petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi;

2. Mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah;
3. Kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen;
4. Menyalurkan subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran.

a. Bagi Petani

1. Kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi/nonsubsidi;
2. Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara);
3. Kemudahan akses pembiayaan (KUR);
4. Menumbuhkan kebiasaan menabung (tidak konsumtif);
5. Biaya simpanan lebih ringan;
6. Mendapatkan program Prona (BPN);
7. Kemudahan mendapatkan subsidi (Kemenkeu, Kementan, Kemenkop);
8. Kemudahan mendapatkan bansos.

b. Bagi Pihak Ketiga

1. Informasi perkiraan jadwal panen (per komoditas dan sebaran wilayah);
2. Penyediaan anggaran serapan hasil panen;
3. Informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen;
4. Informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya;
5. Distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 Tepat (Jumlah, Waktu, Tempat, Mutu, Jenis, Sasaran);
6. Mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk;
7. Kemudahan transaksi pembayaran hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi.

5. Sasaran Kartu Tani

Sasaran dari penerapan Kartu Tani ini adalah semua petani di Jawa Tengah dengan kriteria :

- a. Tergabung dalam kelompok tani dan telah diusulkan untuk memperoleh pupuk bersubsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang telah disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. Mempunyai KTP / NIK.
- c. Mengusahakan lahan untuk kegiatan bertani setiap musim tanam:
 1. Petani yang melakukan usaha tani sub sektor tanaman pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor hortikultura dan sub sektor peternakan dengan luasan maksimal 2 (dua) hektar;
 2. Petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar.
- d. Memiliki rekening tabungan Simpedes BRI.

Pihak yang terlibat dalam program kartu tani:

1. Petani
2. Kios Pengecer
3. Pemerintah
4. Bank BRI

2.5. Penelitian Yang Relevan

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan

No	Judul	Peneliti	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Implementasi kebijakan pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (ktp-el) di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten temanggung	Dewi Sinta Oktami	Diskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan pembuatan KTP-el diimplementasikan sesuai dengan teori Edward III dengan menggunakan empat variabel meliputi (1) komunikasi, dalam menyampaikan informasi terkait KTP-el terhadap sasaran program sudah berjalan baik dan efektif serta transparan. (2) sumberdaya, yang ada masih kurang mencukupi. (3) disposisi, Karakteristik para pelaksana kebijakan pembuatan KTP-el sudah baik, karena memiliki sikap tanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan (4) struktur birokrasi, pada pelaksanaannya memiliki acuan standar pelayanan yang sudah baik karena memiliki <i>Standart Operating Procedures (SOP)</i> .	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi dengan teori dari Edward Perbedaannya pada lokus dan fokusnya
2	Implementasi kebijakan penerapan kartu tanda penduduk elektronik ada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mamuju Utara	Abdul Rahman Rauf	Penelitian Kualitatif	Dari penelitian diketahui bahwa Implementasi penerapan KTP elektronik telah dilaksanakan dengan baik, karena telah memiliki tahapan dan mekanisme yang telah ditentukan. Tetapi dalam hal sosialisasi KTP elektronik belum memberikan konsistensi informasi tentang penerbitan hasil jadi KTP elektronik kepada sasaran atau target penduduk wajib KTP, sumber daya peralatan kurang, komitmen pegawai dalam membekali para operator	Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi kebijakan kartu, metode penelitian yang sama yaitu kualitatif, dan teori yang sama yaitu teori Edward III Perbedaannya pada lokus dan fokusnya

	(Jurnal Katalogis, Voleme 4 Nomor 4, April 2016 halaman 156-165)			dengan bersungguh-sungguh dengan mengikut sertakan pelatihan dan pendidikan operator komputer sebelum melaksanakan tugasnya. Faktor struktur birokrasi telah memiliki tahapan dan mekanisme yang telah ditentuka	
3	Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Pupuk Bersubsidi Jurnal Prosiding SENTIA 2016 – Politeknik Negeri Malang, Vol 8 – ISSN: 2085-2347, Hal A-191 – A- 195	Ni Ketut Sriwina rti, Andres Faesal	Deskriptif Kualitatif dengan Pendekatan Survey	RDKK yang selama ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar dalam pengendalian distribusi pupuk bersubsidi masih terdapat kendala masalah data maupun dalam implementasinya, pada saat penyaluran pupuk masih terdapat perbedaan harga dari harga yang telah ditetapkan. Salah satu solusi yang ditawarkan penulis mengenai masalah tersebut yaitu dengan dibuatkannya kartu cerdas (kartu tanda pemilik pupuk) yang merupakan identitas pemilik pupuk serta hak yang dimiliki.	Persamaan dalam Penelitian g ini adalah sa`ma-sama membahas Implementasi kartu tani perbedaan nya yaitu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan survey sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif
4	Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/2016 di SMP N 1 Semen Jurnal Kebijakan Pendidikan, Edisi 2 Vol.	Rini Septiani Astuti	Diskriptif Kualitatif	Jumlah siswa penerima KIP di SMP N 1 Semen sebanyak 161 siswa, siswa penerima KIP adalah siswa yang memiliki Kartu KPS, sehingga dengan adanya KIP dapat mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. Faktor pendukung Implementasi KIP; informasi dari pihak dinas secara rutin kesekolah dan secara online, Dapodik digunakan pemerintah sebagai salah satu indikator penentuan sasaran penerima KIP, adanya rasa saling percaya antara pihak sekolah dengan siswa beserta	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan penelitian diskriptif kualitatif metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, data dianalisis dengan cara reduksi data,

	VI, 2017, Hal 121 – 127			orang tua terhadap penggunaan dana KIP. Faktor penghambat; evaluasi program KIP yang dilaksanakan pada setiap periode program menyebabkan terjadinya perubahan khususnya pada mekanismenya, Penylewengan dana KIP, kesulitan pengumpulan kuitansi atau bukti penggunaan dana KIP.	penyajian data dan penarikan kesimpulan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori pemerataan pendidikan yang di kemukakan oleh Suzanne Prysor-Jones yaitu aspek equaliti dan equity perbedaan lain terletak pada lokus dan fokusnya.
5	Implementasi Progam Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta Jurnal Administrasi Publik (JAP), vol 2. No 1, Hal. 175-181	Indah Nur Lathifah, Agus Suryono, Minto Hadi	Metode diskriptif kualitatif	Alur prosedur pelayanan kesehatan menggunakan Kartu Jakarta Sehat dengan dilakukannya verifikasi di satu tempat pendaftaran, prosedur yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, sehingga dapat dikatakan pelayanan tersebut sejalan dengan prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan. Mengenai sumber daya anggaran masih terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan pada publik yang harus di berikan kepada masyarakat juga terbatas. Dari segi pelayanan antara RSAB Harapan dan RS Zahirah keduanya pelayanannya baik, hanya saja di RSAB Harapan masih ada beberapa suster yang kurang ramah. Dari segi fasilitas keduanya memadai untuk melayani pasien KJS, dari segi ruangan masih terbatasnya ruangan kelas III di RS Zahirah yaitu hanya	Persamaannya sama-sama, menggunakan teori Edward, dan sama menggunakan metode deskriptif kualitatif Perbedaannya yaitu pada fokus dan lokusnya serta dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi dengan pelayanan.

				terdapat 1 ruang kelas III untuk pasien KJS dan umum tunia.faktor penghambat dalam Kartu Jakarta Sehat (KJS) berupa terbatasnya dana, kurangnya sumberdaya manusia di bagian Satgas Gakin RSAB Harapan Kita dan kurangnya Komunikasi di RS zahirah dengan PPKI (Puskesmas).	
6	Perbedaan Presepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Jurnal of sustainable agriculture. 2017. 32 (1), 9-13) ISSN 0854-3984	Koko Widiat moko, Suwart o dan Bekti Wahyu Utami	Deskriptif Kuantitatif	Terdapat perbedaan yang signifikan terhadap program Kartu Tani berdasarkan lingkungan petani. Petani yang jarak aksesnya dekat dari Kantor Kecamatan dan Bank BRI lebih baik, daripada yang jarak aksesnya jauh dari Kantor Kecamatan dan Bank BRI. Petani yang jaraknya lebih dekat lebih cepat paham dan jelas terhadap akses informasi meliputi penertian program, manfaat program, dan kegiatan program, disamping itu fasilitas serta dukungan lingkungan sosial cenderung lebih baik. Hal ini berbanding terbalik dengan petani yang jarak aksesnya jauh dari Kantor Kecamatan dan Bank BRI.	Persamaan dalam penelitian ini yaitu permasalahan yang ada mengenai jarak aksesnya yang jauh dengan yang dekat. Sama-sama membahas Kartu Tani Perbedaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode diskriptif kuantitatif, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan metode diskriptif kualitatif.

2.6. Kerangka Pikir

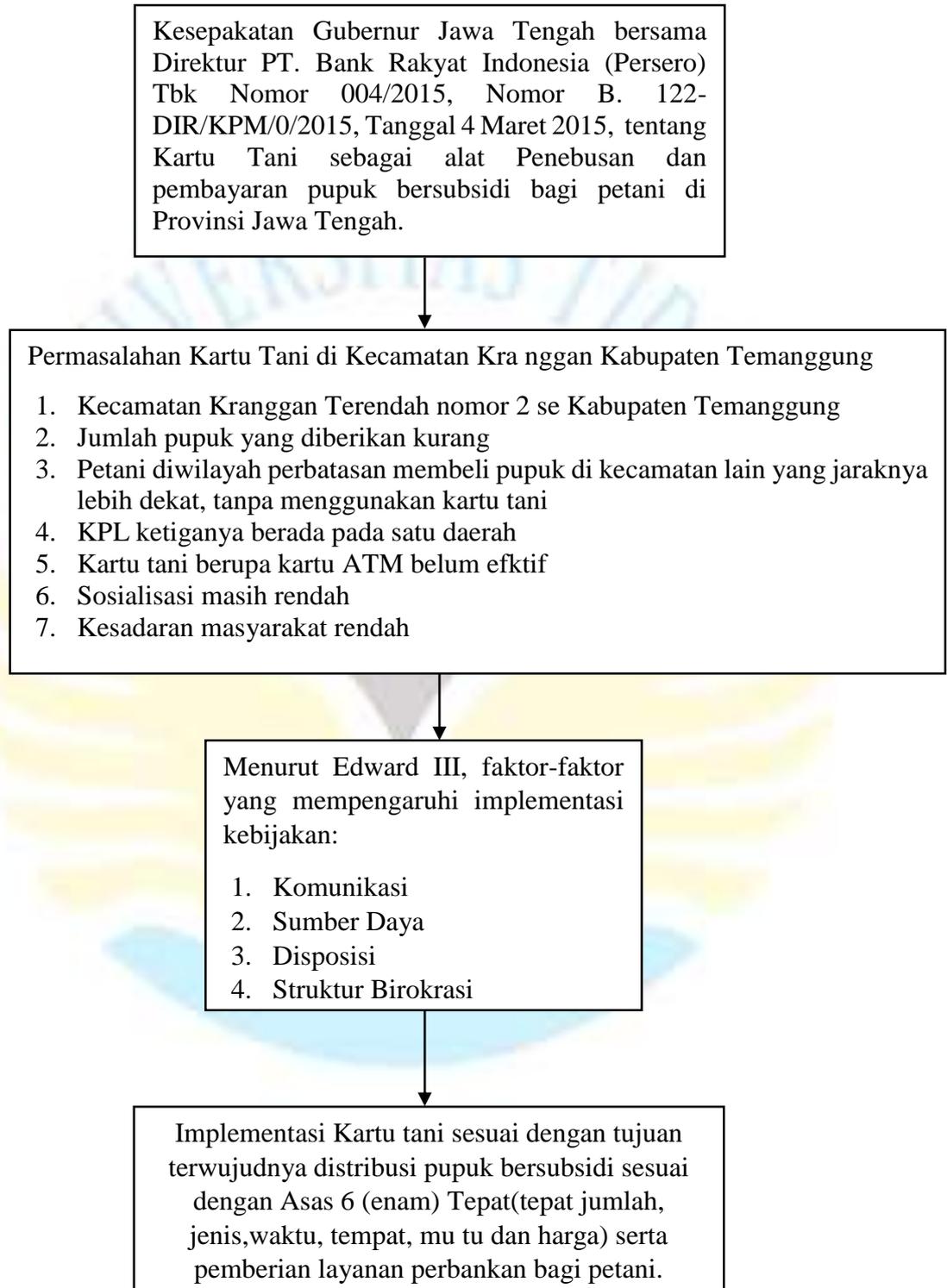
Pembahasan teori yang telah dijabarkan sebelumnya peneliti membuat alur pemikiran dalam penelitian ini yang di gambarkan dalam kerangka berfikir. Kerangka berfikir berisi tentang permasalahan penelitian dari hasil identifikasi lapangan yang dikaitkan dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Permasalahan-permasalahan yang terdapat pada proses implementasi Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan dapat diminimalisir jika mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Donald S. Van Meter & Carl E. Van Horn (1975) dengan empat (4) variabel yang terdapat pada teorinya, yakni:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi / Agen Pelaksana
4. Struktur Birokrasi

Peneliti membuat model kerangka pemikirannya sebagai berikut ini :Berikut ini merupakan bagan yang telah di modifikasi oleh peneliti untuk memperjelas dan mempertajam kerangka pemikiran :

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



Sumber: diolah oleh peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses, makna, pemahaman, interaksi, serta kompleksitas.

Bogdan dan Taylor dalam Ahmadi (2016:15) metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan latar dan individu-individu dalam latar itu secara keseluruhan; subjek penyelidikan, baik berupa organisasi maupun individu, tidak dipersempit menjadi variabel yang terpisah atau menjadi hipotesis tetapi dipandang sebagai bagian dari suatu keseluruhan.

Penelitian ini berjudul “implementasi kebijakan Kartu Tani”. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan ingin mengetahui gambaran lebih dalam terkait dengan implementasi kebijakan Tani.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan implementasi kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung

3.3.Sasaran Penelitian

Sasaran dari Penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, masih terdapat masalah masalah yang dikeluhkan masyarakat. Agar diketahui apakah implementasi kebijaka pembuatan kartu Tani ini dapat diterpkan, dikeloladengan lebih baik lagi, sehingga pelaksanaannya akan tepat sasaran, mencapai tujuan yang telah ditentukan]/ditargetkan.

3.4.Fokus Kajian

Penelitian ini mengkaji Implementasi Kartu Tani di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung. Peneliti menjabarkan fokus kajian pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Fokus Kajian

Fokus	Aspek	Sub Aspek
Implementasi kebijakan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung	1) Komunikasi	1) Transmisi. 2) Kejelasan (clarity). 3) Konsistensi.
	2) Sumberdaya	1) Sumber Daya Manusia 2) Sumber Daya Anggaran 3) Sumber Daya Peralatan 4) Sumber Daya Kewenangan
	3) Disposisi/ Agen Pelaksana	1) Pengangkatan Birokrasi 2) Insentif .
	4) Struktur Birokrasi	1) SOP (<i>Standart Operational System</i>). 2) Fragmentasi

Sumber: Diolah Peneliti

3.5. Teknik Keabsahan Data

Pemriksaan Terhadap Keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang disangkakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong dalam Ghony, 2012:313).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007:270). Berdasarkan empat jenis uji keabsahan data menurut moleong tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Kredibilitas da

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Untuk memperoleh keabsahan data, sugiyono (2007) merumuskan beberapa cara , yaitu : 1) Perpanjangan Pengamatan, 2) Meningkatkan kecermatan dalam penelitian, 3) Triangulasi, 4) Analisis Kasus Negatif, 5) Menggunakan Bahan Referensi, 6) Mengadakan Membercheck. Dari keenam cara tersebut peneliti menggunakan salah satu cara yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, yaitu teknik triangulasi.

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273). Tetapi dalam peneletian ini peneliti menggunakan Triangulasi teknik, yaitu pengumpulan data untuk menguji

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

3.6.Sumber Data

Data dalam penelitian menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data Primer

Sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung yaitu Informa yang terdiri dari para pegawai di dinas Pertanian Kabupaten Temanggung dan Staf pengelola di Kecamatan Kranggan, Bank BRI, penjual pupuk serta dari beberapa Petani di wilayah tersebut.

2. Sumber Data Sekunder

Data yang didapatkan dengan cara pengamatan atau observasi serta mengambil dari catatan tertulis, dokumen resmi, yang diperoleh dari Obyek penelitian di dinas Pertanian Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung serta buku-buku yang berisi teori yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

3.7.Teknik Pemilihan Informan

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. (Sugiyono, 2014:124) *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu.

Pemilihan informan dengan *purposive sampling* ini karena peneliti berharap bahwa informan yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung 1 orang
2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan 1 orang Penyuluh
3. Pemilik/penjual di Kios Pupuk Lengkap (KPL) 3 orang
4. Petani Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung sejumlah 8 orang yang diambil dari 2 ketua gabungan kelompok tani, 2 ketua kelompok tani, dan 4 Petani

3.8. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diinginkan (Sugiyono, 2007 : 62). Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Lexy J. Moleong (2009: 175) secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah: pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek peneliti, hidup pada saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan

dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap pelaksanaan kebijakan Kartu Tani

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 2009: 186)

3. Studi Dokumen

Dalam penelian ini, peneliti menggunakan metode studi dokumen untuk memperoleh data tentang hasil laporan kegiatan program pendukung aplikasi instrumentasi yang telah dilakukan sebelumnya guna mengetahui bagaimanakah pelaksanaan dan kendala apa saja yang dialami selama ini.

3.9. Teknik Analisis Data

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Penulis tidak menunggu sampai seluruh data terkumpul baru melakukan analisis sebagaimana yang dilakukan dalam penelitian-penelitian kuantitatif. Kegiatan peneliti kualitatif dituntut untuk lebih banyak memverifikasi

dan mengelompokkan data agar sedapat mungkin dapat membantu mempercepat penulisan laporan hasil penelitian.

Menurut Miles dan Huberman dalam Ulber Silalahi (2009:339), kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Dalam reduksi data peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan oleh peneliti.

2. Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah mendisplaykan data. Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami dari data tersebut. Dalam penyajian data, peneliti mengumpulkan informasi yang tersusun yang memberikan dasar pijakan kepada peneliti untuk melakukan suatu pembahasan dan pengambilan kesimpulan. Penyajian ini kemudian untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang

terpadu sehingga mudah diamati apa yang sedang terjadi kemudian menentukan penarikan kesimpulan secara benar.

3. Conclusion Drawing/ Verification (Menarik Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi oleh peneliti selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran peneliti pada suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau melihat salinan suatu temuan yang disimpan dalam perangkat data yang lain.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Temanggung

Kabupaten Temanggung terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dengan bentangan Utara ke Selatan 34,375 Km dan Timur ke Barat 43,437 Km. kabupaten Temanggung secara astronomis terletak diantara 110o23'-110o46'30" bujur Timur dan 7o14'-7o32'35" Lintang Selatan dengan luas wilayah 870,65 km² (87.065 Ha). Batas-batas administrative Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Magelang
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

Wilayah Kabupaten Temanggung secara geo ekonomis dilalui oleh 3 jalur pusat kegiatan ekonomi, yaitu Semarang (77 Km), Yogyakarta (64 Km), dan Purwokerto (134 Km).

Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris yang sebagian penduduknya bermatapencaharian sebagai petani. Luas lahan pertanian mencapai

60,956 Ha dengan suhu udara antara 18° C – 28° C dan curah hujan antara 1.000 – 3.100 mm/tahun. Tanah yang subur menyebabkan sebagian besar tanaman dapat tumbuh dengan baik.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Kecamatan dan Mata Pencaharian di Kabupaten Temanggung pada tahun 2018

Kecamatan	Mata Pencaharian							Jumlah
	Pertanian	Industri	Bangunan	Perdagangan	Angkutan	Jasa	Lain-Lain	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Parakan	8 441	1 764	1 820	7 395	1 211	5 048	650	26 329
2. Kledung	11 606	362	261	1 355	183	683	212	14 662
3. Bansari	11 708	205	322	935	88	777	131	14 166
4. Bulu	20 599	492	1 399	2 713	502	2 315	349	28 369
5. Temanggung	7 261	3 639	2 397	10 501	2 072	11 920	1 191	38 981
6. Tlogomulyo	11 038	265	516	994	179	1 069	92	14 153
7. Tembarak	11 894	534	631	1 675	280	1 631	139	16 784
8. Selopampang	8 306	287	300	1 233	164	796	51	11 137
9. Kranggan	12 259	4 192	1 564	4 071	955	3 521	175	26 737
10. Pringsurat	11 849	5 871	1 150	4 835	909	2 662	146	27 422
11. Kaloran	15 393	2 226	819	2 656	586	2 002	160	23 842
12. Kandangan	13 082	2 747	1 743	3 880	898	2 680	259	25 289
13. Kedu	14 908	3 857	2 985	4 424	1 062	3 748	1 012	31 996
14. Ngadirejo	19 067	751	999	5 555	830	3 687	583	31 472
15. Jumo	10 474	590	679	1 974	333	1 992	556	16 598
16. Gemawang	12 679	985	775	1 969	326	1 338	85	18 157
17. Candiroto	13 030	377	485	1 947	425	1 791	137	18 192
18. Bejen	8 131	109	243	961	260	1 141	40	10 885
19. Tretep	11 293	30	105	346	56	341	19	12 190
20. Wonoboyo	13 137	143	452	1 003	172	829	36	15 772
Jumlah	246155	29426	19645	60 422	11 491	49 971	6 023	423133

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (Proyeksi Penduduk

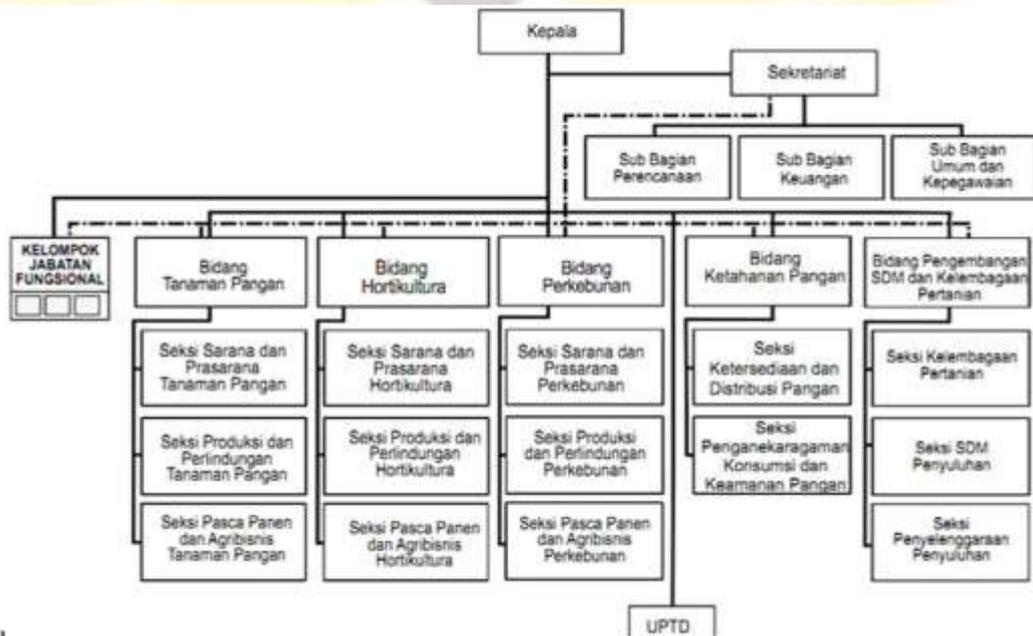
Temanggung 2010-2035)

4.1.2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung merupakan perangkat daerah yang melaksanakan pemerintahan dengan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Lokasi Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Temanggung terletak di Jl. Suyoto No.7, Jampiroso, Kertosari, Kec. Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56212

4.1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung



Sumber: <https://dintanpangan.temanggung.go.id>

4.1.2.2 Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung

Visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

“Terwujudnya sistem Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tangguh, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”.

Misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung adalah :

1. Mengembangkan teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mendukung pada peningkatan produksi dan mutu hasil Pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan.
2. Pengembangan agribisnis komoditas unggulan yang sesuai kawasan dan agroklimat dengan mewujudkan iklim usaha pertanian yang kondusif
3. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya Pertanian dan Ketahanan Pangan berbasis lokal
4. Penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan pertanian.
5. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan berbasis lokal melalui pertanian modern yang berwawasan lingkungan

4.1.3 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan

BPP adalah merupakan instalasi/sarana BIPP dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat kecamatan. BPP dikelola oleh seorang Koordinator Penyuluhan Pertanian yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Kepala Dinas Pertanian. Kedudukan koordinator penyuluhan pertanian BPP di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPP.

4.1.3.1 Tugas dan Fungsi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

1. BPP mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun Program Penyuluhan Pertanian
 - b. Membimbing Penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian
 - c. Melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, BPP mempunyai fungsi sebagai pangkalan kerja/home base penyuluhan pertanian.

4.1.3.2 Visi Misi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Visi :

“Terwujudnya sistem Pertanian dan Ketahanan Pangan yang tangguh, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat”.

Misi:

1. Mengembangkan teknologi Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mendukung pada peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang dan berkelanjutan;
2. Pengembangan agrobisnis komoditas unggulan yang sesuai kawasan dan agroklimat dengan mewujudkan iklim usaha pertanian yang kondusif;
3. Memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya pertanian dan ketahanan pangan berbasis lokal

4. Penyelenggaraan penyuluhan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan pertanian
5. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan berbasis lokal melalui pertanian modern yang berwawasan lingkungan.

4.1.3.3 Tenaga Penyuluh

Data Ketenagaan Penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Sutarno | 4. Indra Purnomoaji |
| 2. Ely Nugraeny | 5. Febriana Budhi Sulistyowati |
| 3. Muhamad Ikaf Husnihuda | 6. Riya Kurbani |

4.1.4. Kecamatan Kranggan

Gambar 4.2 Peta Kecamatan Kranggan



Sumber: <http://kranggan.temanggungkab.go.id>

Kecamatan Kranggan adalah salah satu dari 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung, Jarak dari Kota Temanggung 4 Km dengan luas 5.761 Ha. Dengan rincian Lahan Sawah 1.425 Ha dan Bukan Lahan Sawah 4.336 Ha. Wilayah Kecamatan Kranggan terletak pada ketinggian tanah rata-rata 544 m dpl, dengan suhu maksimum 29 derajat celsius dan suhu minimum 18 derajat celsius. Rata-rata jumlah hari hujan 64 hari dan banyaknya curah hujan 22 mm/th. Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dalam pembagian wilayah Administrasi terbagi menjadi 13 Desa/Kelurahan, 121 Dusun, 362 RT, 104 RW. dengan jumlah Kades/lurah 13, Sekdes 10, Kaur 63, pembantu Kaur 47 dan Kadus 102.

4.1.4.1 DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN KRANGGAN

1. Kelurahan Kranggan
2. Desa Badran
3. Desa Bengkal
4. Desa Pare
5. Desa Nguwet
6. Desa Ngropoh
7. Desa Pendowo
8. Desa Sanggrahan
9. Desa Klepu
10. Desa Kemloko
11. Desa Gentan
12. Desa Kramat
13. Desa Purwosari

Dengan kondisi alam yang terdiri dari dataran rendah dan tinggi, curah hujan yang cukup, dan saluran irigasi yang memadai, sangat cocok untuk bercocok tanam, maka kebanyakan masyarakat Kecamatan Kranggan kebanyakan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dari pada Industri, bisa dilihat dibawah ini perbandingannya antara Petani dan Industri.

Tabel 4.2 Mata Pencaharian Penduduk 10 Tahun Keatas Kecamatan Kranggan Tahun 2017

No	Desa	Pertanian	Industri
1	Bengkal	667	246
2	Pare	213	176
3	Nguet	523	689
4	Badran	389	436
5	Kranggan	235	478
6	Pendowo	1.074	459
7	Ngropoh	1.314	184
8	Purwosari	1.703	182
9	Kramat	741	46
10	Sanggrahan	693	418
11	Klepu	820	274
12	Kemloko	1.565	425
13	Gentan	2.274	163
Jumlah		12.211	4.176

Sumber Data: BPS Kabupaten Temanggung

Dari Jumlah 12.211 petani yang terdapat di Kranggan terdiri dari 118 Kelompok Tani, berikut Rincihannya:

Tabel 4.3 Jumlah Kelompok Tani Kecamatan Kranggan

No	Nama desa	Nama Gapoktan	Nama Ketua	Alamat Sekretariat	Anggota (Poktan)
1	BENGKAL	Margo Rukun	Muh Isrofi	Jl.Raya Bengkal, Kranggan	<u>22</u>
2	PARE	Pare Makmur	M. Asrofi	Dsn./Ds. Pare, Kec. Kranggan	<u>6</u>
3	NGUWET	Asmamu	Suroso	Dsn.Ngabeyan, Ds.Nguwet, Kec. Kranggan	<u>8</u>
4	BADRAN	Dadi Rejo	Zuhri	Ngepoh, Badran, Kranggan, Temanggung 56271	<u>7</u>
5	KRANGGAN	Tani Makmur	Subiyanto	Komplek Balai Kelurahan Kranggan, Jl.Kaloran, KRANGGAN	<u>12</u>
6	PENDOWO	Amartha	Suyanto	Dsn./Ds. Pendowo, Kec. Kranggan	<u>10</u>
7	NGROPOH	Sido Makmur	Suyanto	Komplek Balai Desa Ngropoh, Dsn.Ngabean, Ds.Ngropoh, Kec. Kranggan	<u>16</u>
8	PURWOSARI	Sumber Rukun	Mardiyono	Komplek Balai Desa Purwosari Jl. Pingit, Desa Purwosari, Kec. Kranggan	<u>22</u>
9	KRAMAT	Tani Maju	Marjoko	Komplek Kantor Desa Kramat, Dsn. Sumberejo, Kramat, Kranggan,	<u>15</u>
10	SANGGRAHAN	Subur Makmur	Sunarno	Jl. Kaloran KM 1, Sanggrahan, Kranggan.	<u>9</u>
11	KLEPU	Ngudi Karyo	Suprih	Komplek Balai Desa Klepu Kecamatan Kranggan	<u>13</u>
12	KEMLOKO	Ngudi Makmur	Hartono	Ds.Kemloko, Kec.Kranggan	<u>13</u>
13	GENTAN	Hidayah	Supratikno	Jl.Kaloran,Desa Gentan, Kec. Kranggan	<u>15</u>

Sumber: Arsip data Balai Penyuluhan Pertanian kecamatan Kranggan

4.1.4.2.Kios Pupuk Lengkap Kecamatan Kranggan

Kios Pupuk Lengkap atau Penjual pupuk yang di tunjuk oleh distributor untuk menjual pupuk bersubsidi di Kranggan terdapat 3 (tiga) kios pupuk yaitu:

Tabel 4.4 Kios Pupuk Lengkap Kecamatan Kranggan

No	Nama Kios	Alamat
1	Inasa Tani	Pasar Pagi Kranggan, Kenalan, Kranggan, Temanggung
2	Inasa Tani Makmur	Jl. Kranggan Kaloran No 95, Kenalan Kranggan, Kabupaten Temanggung
3	Usaha Tani	Jl. Kyai Kasan Timur 250, Kranggan, Temanggung

Sumber: diolah oleh peneliti

4.2 Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari Edward III untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung dengan melihat aspek-aspek yang dikemukakan oleh Edward III, aspek tersebut meliputi: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari masing-masing aspek memiliki pengaruh dalam implementasi kebijakan program Kartu Tani.

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yaitu:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects” (Edwards III, 1980:01).

Edwards III memberikan pandangan tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan down keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, berbagai program bisa dikembangkan untuk merespon tujuan-tujuan kebijakan yang sama. Program-program tindakan itu bisa dipilah-

pilah ke dalam proyek-proyek yang spesifik untuk dikelola untuk mendatangkan suatu perubahan dalam lingkungan kebijakan, suatu perubahan yang bisa diartikan sebagai dampak dari suatu program.

Berdasarkan Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jawa Tengah tentang pembelian pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama kebijakan Kartu Tani tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fajar selaku Admin Kartu Tani di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“terwujudnya distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga), artinya ada data base, dengan kartu tani kan ada pendataan, sehingga data petani lebih real, dan penebusan transaksi pupuk bersubsidi dengan menjamin ketersediaan artinya tidak ada perembesan, penyalahgunaan, dan sebagainya”. (Wawancara, 10 Februari 2020 Pukul 07.30 WIB).

Tujuan adanya Kartu Tani adalah untuk menjamin terwujudnya Distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 (enam) Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga). Dengan begitu tidak sembarang orang dapat membeli Pupuk bersubsidi kecuali yang mempunyai Kartu Tani. Manfaat Kartu Tani antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah memiliki database petani yang lebih akurat dan terintegrasi
2. Mengetahui luas lahan pertanian perkomoditas perwilayah
3. Menyalurkan Pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran dan kepastian ketersediaan pupuk
4. Layanan perbankan bagi petani
5. Kemudahan penjualan hasil panen oleh off taker (tanpa melalui perantara)

Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah diwajibkan untuk melaksanakan kebijakan Program Kartu Tani berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015, tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung khususnya Kecamatan Kranggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku Admin Kartu Tani di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Kesepakatan antar gubernur jawa tengah dan bank BRI mengenai kartu tani sebagai alat penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani”. (Wawancara, 10 Februari 2020 Pukul 07.30 WIB).

Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan terintegrasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi yang diharapkan lebih transparan serta tepat sasaran. Kartu ini bersifat wajib karena selain untuk pendataan jumlah petani dan pupuk bersubsidi, juga mengantisipasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak untuk menerimanya. Untuk mengkaji implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui kartu tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung peneliti menggunakan teori Implementasi kebijakan dari Edward III dengan melihat aspek-aspek variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan program Kartu Tani untuk mengetahui implementasi Program Kartu Tani tersebut apakah tujuan-tujuan dari kebijakan tersebut sudah direalisasikan apa belum.

4.2.1 Implementasi Kebijakan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan

Analisis implementasi kebijakan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung menggunakan model Edward III dengan empat variabel

untuk menentukan keberhasilan dari implementasi Program Kartu Tani, keempat Variabel tersebut meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur Birokrasi, sebagai berikut:

1. Komunikasi

Faktor yang paling penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara pelaksana kebijakan Program Kartu Tani yaitu antara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan dan juga kepada para ketua Gapok tan, Ketua Kelompok Tani, dan pada para petani sendiri sebagai sasaran kebijakannya. Penentu keberhasilan Program Kartu Tani adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman (*miss communication*) yang berdampak buruk terhadap pelaksanaan kebijakan Program Kartu Tani. Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila aparaturnya dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan komunikasi dan apa pentingnya komunikasi untuk kelancaran dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik karena kebijakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat terjalin dengan sangat baik.

Faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara pelaksana kebijakan Program Kartu Tani. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Kebijakan yang akan diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk-petunjuk itu

harus jelas Edward III (Winarno, 2007:175). Dengan begitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Pendapat diatas dapat diketahui bahwa proses komunikasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada aparatur serta pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat sudah terhubung dengan baik, dalam pelaksanaannya bahwa komunikasi dalam kebijakan Program Kartu Tani tidak berbelit-belit dan bertele-tele.

Berdasarkan uraian diatas bahwa proses komunikasi yang terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung cukup baik.

a. *Transmission* (Penyampaian Informasi)

Dalam Transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Penyampaian informasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Transmisi pada implementeasi kebijakan Program Kartu Tani di Kecamatan

Kranggan telah di sosialisasikan kepada pihak-pihak yang terkait, mulai dari Dinas Pertanian ke Penyuluh, Penyuluh Sosialisasi ke Ketua Kelompok Tani, dan Ketua Gapoktan serta ke masyarakat secara langsung, begitupun dengan BRI selaku salah satu pihak yang berkepentingan dalam kebijakan Kartu ini juga melakukan sosialisasi ke beberapa pihak.

Yang dilakukan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DINTANPANGAN) Kabupaten Temanggung dalam menjalin komunikasi kepada pelaksana dan kepada sasaran kebijakan adalah melakukan sosialisasi pada tingkat Kabupaten, Kecamatan bahkan ke desa-desa jika diundang pertemuan kelompok, selain komunikasi melalui sosialisasi. DINTANPANGAN juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait seperti KEMANTAN, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Pemprov Jateng, BPP, BRI, DESPERINDAG dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, diantara dinas-dinas tersebut harus terbangun sinergitas baik, solid, serta komunikasi dan koordinasi yang baik.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar selaku Admin Krtu Tani di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Yang kita lakukan mulai dari sosialisasi tingkat kabupaten, Kecamatan, bahkan sampai Desa. Sosialisasi tidak berhenti diawal saja tapi terus menerus karena yang namanya edukasi ke petani itu tidak instan, kita juga meminta di setiap pertemuan kelompok tani pertemuan RT RW itu untuk disampaikan, selain itu kita juga melakukan pengawalan kartu tani, pendataan kartu tani sampai dengan terjadinya transaksi. Kalau petani sudah bisa bertransaksi, KPL juga sudah bisa bertransaksi baru kita mandirikan mereka. Kita juga berkoordinasi ke KEMANTAN, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Pemprov Jateng, Dinas sini, BPP, BRI, DESPERINDAG, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang kepalanya paksekda, jadi harus ada sinergitas disitu, kalau ada salah satu pihak yang tidak tenanan, nanti menyebabkan yang lain repot. Misal penyuluh sudah

tenanan tapi KPL tidak mau melayani sama saja transaksi tidak akan terjadi. Kita juga harus menyolidkan Internalnya dan eksternalnya juga koordinasi, komunikasi dijaga.” (Wawancara, 10 Februari 2020 Pukul 07.30 WIB).

Cara untuk membangun koordinasi yang baik salah satunya Dinas Pertanian melakukan sosialisasi ke Ketua Gapok Tani dan juga Ketua Kelompok tani. Hal tersebut berdasarkan Wawancara dengan ketua Gapok tani Bapak Muh Isrofi sebagai berikut :

“Iyaa mbak ada, dinas ke kecamatan, kecamatan ke Gapok Tan, Gapok Tan ke Kelompok Tani, nanti Ketua Kelompok 1 menyampaikan Ke Petani, tetapi dari dinas juga kadang datang ke pertemuan kelompok. Dulu awal-awal ada kartu tani sering ada sosialisasi dari Dinas terahir ada pemantapan sama evaluasi dari Dinas temanggung karena Kranggan paling bawah se Temanggung”. (wawancara 07 Februari 2020 pukul 14.30).

Sedangkan yang dilakukan oleh BPP Kranggan selaku penyuluh pertanian tingkat Kecamatan yaitu melakukan koordinasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam Program kartu Tani, yaitu dengan Pihak BRI selaku penyedia Kartu Tani, melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Temanggung, dan hal yang paling penting yaitu melakukan sosialisasi kepada KPL (Kios Pupuk Lengkap), ke para Petani pada tingkatan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) maupun tingkatan Kelompok Tani, di Kranggan sendiri terdapat 13 Desa yang terdiri dari 118 kelompok tani, Tiap Penyuluh memegang beberapa kelompok tani. Sosialisasi yang dilakukan Penyuluh biasanya melalui pertemuan-pertemuan kelompok Tani yang diadakan secara rutin tiap bulan sekali, ada yang dua bulan sekali, bahkan ada yang tiga bulan sekali. Sedangkan Sosialisasi ke KPL juga diadakan oleh BPP secara rutin setiap sebulan

sekali, kadang dua bulan sekali kadang tiga bulan sekali, tidak menentu waktunya.

Hal Tersebut berdasarkan wawancara dengan Mas Muhamad Ikaf Husni Huda yang dipanggil Mas Ikaf selaku penyuluh pertanian Kranggan juga sebagai Penyuluh Kartu Tani sebagai berikut:

“Koordinasi antar yang berkepentingan, BRI, Petani, Dinas Pertanian. Penyuluhh kecamatan Kranggan elakukan sosialisasi kepada petani bahwa pembelian pupuk itu harus menggunakan kartu tani”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00 WIB).

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Pak Tri dari KPL Inasa Tani sebagai berikut:

“Kalau dari dinas pertanian sering ada tapi tidak pasti kadang sebulan sekali kadang dua bulan sekali kadang juga tiga bulan sekali, tidak pasti waktunya”. (wawancara 30 Januari 2020 pukul 10.15 WIB)

dan dibuktikan juga dengan hasil wawancara dengan petani Bapak Tasrobun sebagai berikut:

“Iyaa ada sosialisasi melalui pertemuan kelompok rutin mbak”. (Wawancara 06 Februari 2020 pukul 11.15)

BRI juga salah satu pihak yang berkerja sama dengan pemerintah dalam pembuatan kartu debit dan buku tabungan simpedes, Kartu Tani. BRI berperan dalam pendistribuan atau pembagian Kartu Tani, juga pembagian mesin EDC kepada para KPL di kecamatan Kranggan Khususnya. Agar masyarakat mengetahui fungsi kegunaan Kartu Tani juga cara penggunaan Kartu Tani BRI melakukan sosialisasi pada tingkatan Ketua Gapoktan dan Ketua kelompok Tani, yang kemudian mereka yang menyampaikan ke petani-petani di desa. Sosialisasi dilakukan ketika penerbitan kartu tani pertama kali. Selain ke Para Gapoktan dan Ketua Kelompok Tani juga

kepada KPL (Kios Pupuk Lengkap) supaya mereka paham cara penggunaan mesin EDC untuk melayani pembelian kartu Tani.

Hal Tersebut berdasarkan wawancara dengan Mas Ikaf selaku Penyuluh pertanian sebagai berikut:

“Kalau dari pihak BRI itu biasanya ke tingkat kecamatan Ke KTMA, Forum Komunikasi KWT, Gapok Tan, Ketua kelompok, tapi untuk sampai ke titik rumput atau kedesa-desa itu kebanyakan temen-temen penyuluh”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00)

Kesimpulan dari beberapa pendapat diatas yaitu proses Sosialisasi telah dilakukan oleh para pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pertanian Temanggung, BPP, sampai dengan BRI telah melakukan sosialisasi kepada sasaran Kebijakan yaitu para petani.

b. *Clarity* (Kejelasan)

Kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana kebijakan, sasaran kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan harus disampaikan dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan program Kartu Tani tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam memberikan sosialisasi ke pelaksana kebijakan dan kepada sasaran kebijakan sudah dilakukan dengan jelas terbukti dengan diadakan sosialisasi secara terus menerus ke berbagai pihak, yaitu ke Penyuluh Kecamatan, Ketua Gapok

tani, Ketua Kelompok Tani serta kepada para petani di Kecamatan Kranggan.

Hal tersebut berdasarkan wawancara Bapak Fajar Wardono selaku Admin Kartu Tani di Dintanpangan Temanggung sebagai berikut:

“penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani sudah jelas karena sosialisasi itu dilakukan tidak hanya di awal saja tetapi secara terus-menerus, setiap pertemuan kelompok itu kita edukasi petani”. (Wawancara 10 Februari 2020 pukul 07.30)

Kebijakan yang diberikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan harus jelas agar langsung dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan tersebut. Jika tidak jelas mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Apabila salah satu komponen tidak bisa dipenuhi maka hasil yang dicapai tidak efektif.

Dinas Pertanian ataupun Penyuluh dalam menyampaikan Informasi mengenai kartu tani sudah dilakukan dengan baik dan dilakukan secara terus-menerus agar masyarakat dalam menerima informasinya dengan jelas. Proses Penyampain informasi terhadap Penyuluh, Ketua Gapok Tani, Ketua Kelompok tani sudah diterima dengan baik, dan dari hasil wawancara maupun observasi dapat diketahui bahwa mereka telah memahami maksud, tujuan, manfaat serta sasaran Program Kartu Tani.

Hal tersebut berdasarkan wawancara Mas Ikaf selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Pelaksana Kartu Tani dari Dinas Penyuluh Ketua Gapok Tani, Ketua Kelompok Tani itu sudah jelas semua tinggal Petaninya itu memang dari 118 kelompok tani di kecamatan Kranggannya saja ada 5000 lebih petani yang masing-masing beda cara menangkap informasinya”. (wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Sedangkan dari petani masih banyak yang belum paham mengenai maksud, tujuan sasaran serta manfaat dari kartu tani, yang mereka tahu hanya ketika membeli pupuk harus menggunakan kartu tani, sedangkan manfaat yang lain seperti menabung di Bank, kemudahan simpan pinjam di bank, menjual hasil panen ke bulog atau *off taker*, dll belum paham. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, pertama sebagian SDM petani yang masih rendah, juga kurang antusiasme dari para petani, ketika mengikuti penyuluhan ada yang ngobrol sendiri, merokok, bahkan ada yang tidur.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dari petani bapak Suparman yaitu sebagai berikut:

“Soal jelas atau tidak saya tidak tahu, karena waktu kumpulan saya tidak begitu aktif sama waktu penyampaian juga tidak begitu saya hiraukan”. (Wawancara 14 februari pukul 20.00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh baak Marjoko selaku Ketua Gapok tani sebagai berikut:

“Kalau untuk kalangan kita jelas mbak, tapi kalau untuk petaninya kadang pas kumpulan pada merokok, pada ngobrol sendiri, bahkan kadang yang mengantuk, hal tersebut yang menyebabkan masih ada yang belum paham mengenai kartu tani” (wawancara 06 Februari 2020 pukul 13.30).

Faktor kedua, Kartu Tani belum seluruhnya berjalan dengan baik karena terhambat masih terdapat beberapa masyarakat yang belum tergabung kedalam kelompok tani dan masih ada beberapa kelompok tani yang tidak aktif, artinya kelompok tani tersebut jarang melakukan pertemuan rutin, sehingga jarang ada sosialisasi

Hal tersebut disampaikan oleh Petani Bapak Suparman sebagai berikut:

“Yaa kalau tentang kartu tani dulu waktu pertama kali kartu tani dulu pernah ada sosialisasi, tapi sejak setahun lebih ini kelompok tani belum ada sosialisasi lagi atau pertemuan kelompok lagi”. (wawancara 14 februari 2020 pukul 20.00).

Faktor ketiga yaitu SDM Penyuluh yang kurang dalam melakukan sosialisasi, juga SDM Ketua Kelompok tani yang sudah berumur sehingga terjadi kesalahan komunikasi antara Penyuluh dan ketua kelompok tani. Hal ini terjadi di desa Sebayon dan Pendowo terjadi kesalahan pada pengumpulan syarat pembuatan kartu tani yang seharusnya semua SPT dikumpulkan tetapi Ketua Kelompok menyampaikan ke Petani mengumpulkan satu SPT saja cukup cuma sebagai syarat pembuatan Kartu Tani. Hal tersebut menyebabkan kuota pupuk yang diterima oleh petani tidak sesuai dengan kebutuhan pupuk karena luas lahan yang diajukan tidak sesuai dengan lahan yang dimiliki.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan bapak Tri penjual Pupuk di Kranggan sebagai berikut :

“Kalau menurut saya banyak petani yang mengeluh, karena pupuknya kurang tidak sesuai dengan kebutuhannya, contohnya Sebayon dan Pendowo rata-rata per petani dapatnya kurang dari satu sak, mungkin itu kesalahan pada yang mendengarkan atau yang

menyampaikan, soalnya berdasarkan kir tanah”. (Wawancara 30 Januari 2020 pukul 10.15).

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Tasrobun, Petani desa Sebayon yaitu sebagai berikut:

“Kebanyakan warga sini masih kurang karena kuota pupuk itu menurut luas lahan, tadinya itu tidak disuruh mengumpulkan semua SPT, PPL dulu bilanganya satu cukup cuma buat syarat saja tidak harus semua dikumpulkan, jadi sekarang banyak warga desa yang kekurangan, rata-rata cuma dapat satu atau dua sak perorang jauh dari kebutuhan petani”. (Wawancara 06 Februari 2020 pukul 11.15).

Kejelasan yang diterima oleh pihak KPL juga hanya jelas pada pemahaman bahwa pelayanan pembelian pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu tani sesuai dengan data RDKK yang tersedia, juga pemahaman mengenai cara bertransaksi menggunakan kartu tani termasuk cara penggunaan mesin EDC. Sedangkan pemahaman mereka mengenai latar belakang kartu tani, tujuan, manfaat Kartu tani mereka masih belum terlalu paham secara detail.

Hal tersebut berdasarkan wawancara bapak syahrir pemilik kios Pupuk Lengkap sebagai berikut:

“Kartu tani itu berfungsi biar pupuk bersubsidi itu tepat sasaran, Tujuannya ya biar tepat sasaran itu, sasarannya kepetani yang membutuhkan, penyampaian informasi Sudah jelas mbak, karena intinya yang penting petani membeli pupuk itu harus memakai kartu.” (wawancara 30 Januari 2020 pukul 09.30).

Kesimpulan dari berbagai pendapat diatas yaitu kejelasan penyampain informasi mengenai Program Kartu Tani sudah diterima dengan di pahami dengan jelas oleh para pelaku kebijakan seperti Penyuluh Pertanian, Ketua Gapok Tani, Ketua Kelompok tani. Mereka sudah paham mengenai maksud,

tujuan, manfaat serta sasaran Kartu Tani sedangkan Kejelasan atau pemahaman dari para Petani dan KPL hanya pada intinya saja, bahwa petani membeli pupuk harus menggunakan Kartu Tani. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu SDM petani yang rendah karena faktor umur, pendidikan dll, kedua karena masih terdapat masyarakat yang belum tergabung kedalam kelompok tani dan juga ada beberapa Kelompok tani yang tidak aktif, dan ketiga karena faktor kurang antusiasme dari masyarakat.

c. **Consistency (Konsistensi)**

Komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan Program Kartu Tani dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan. Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan konsistensi kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparatur tetap pada alur pelaksanaan. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja, pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan Program Kartu Tani tersebut. Sosialisasi yang disampaikan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung kepada pelaksana kebijakan maupun sasaran kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik dan jelas, dan tidak berubah-ubah, yang disampaikan dinas satu dengan yang lainnya sama intinya dan

tidak membingungkan bagi sasaran kebijakan Kartu Tani yaitu Petani itu sendiri. Dan inti kebijakan yang disampaikan dalam sosialisasi dapat dipahami oleh sasaran kebijakan.

Hal tersebut sesuai yang disampaikan Mas Ikaf Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan mengenai konsistensi sebagai berikut:

“yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama, tidak membingungkan, karena kita sudah satu suara satu visi bahwa kartu tani itu harus sukses di kabupaten Temanggung terbukti bahwa dengan Temanggung meraih juara 1 se Provinsi Jawa Tengah” (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Hal sama juga disampaikan oleh Amin Sodikun Ketua Kelompok Tani yaitu sebagai berikut:

“yang disampaikan antar pelaku kebijakan misal dari dinas pertanian Temanggung dengan Penyuluh Kranggan intinya sama tidak membingungkan Cuma cara penyampaian tiap orang yang beda” (wawancara 07 Februari 2020 pukul 14.45)

Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Pelaksanaan kebijakan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan dijalankan dengan konsisten untuk mencapai Visi dan Misi agar kartu tani sukses di Kabupaten Temanggung, khususnya Kecamatan Kranggan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konsistensi penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan sudah disampaikan dengan baik sesuai dengan pedoman Kartu Tani. Sasaran kebijakan dapat menerima dan paham apa yang disampaikan dan tidak membingungkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan Program Kartu Tani, dalam pelaksanaannya kebijakan Program Kartu Tani sangat membutuhkan sumber daya yang ahli dalam bidang pertanian dan juga berbicara di depan umum supaya apa yang di sosialisasikan dapat diterima baik oleh masyarakat, selain itu keahlian dalam bidang teknologi dan informasi juga sangat penting untuk pengapud an data ERDKK, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal kertas menjadi dokumen saja.

Yang berperan dalam Program Kartu Tani bukan hanya Dinas Pertanian dan Ketahanan Kabupaten Temanggung dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan saja tetapi juga terutama dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Pertanian, masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, bahkan Kementerian Dalam Negeri pun sekarang mewajibkan penggunaan Kartu Tani bagi wilayah yang sudah ada Kartu Tani.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajar Wardoso selaku penanggung jawab kartu tani di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“berperan dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tani yaitu Pemprov Jateng, Dinas Pertanian Provinsi, Kementrian Pertanian, masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Desperindag, yang mengurus/membina KPL”. (Wawancara 10 Februari 2020 pukul 07.30).

Semua Stakeholder pemerintahan di Temanggung juga berperan dalam Program Kartu Tani. Contohnya dari Desperindag berperan dalam perdagangan pupuk bersubsidi, yang menunjuk dan membina KPL Resmi per kecamatan. Dinas Pertanian selaku penentu pupuknya juga sangat berperan, Dinas Pertanian juga berperan dalam membina dan mensosialisasikan kartu tani ke berbagai tingkatan seperti BPP, Ketua Gapok Tan, Ketua Kelompok Tani, KPL, dll. Balai Penyuluhan Pertanian per Kecamatan berperan dalam mensosialisasikan dan membina Petani sampai kerumput-rumputnya, artinya langsung terjun ke lapangan ke desa-desa bahkan ke desa yang pelosok-pelosok untuk bertatap muka dengan petani secara langsung.

Hal tersebut disampaikan oleh Mas Ikaf Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan, sebagai berikut:

”Semua stakeholder pemerintahan di kabupaten Temanggung semua berperan dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tani. Dari desperindag itu berperan dalam bidang perdagangan pupuk, kemudian dinas pertanian selaku penentu pupuknya juga sangat berperan. Bahkan wewenang sekarang bukan hanya dari Kementrian Pertanian, sampai menteri dalam negeri pun mewajibkan penggunaa kartu tani untuk wilayah yang sudah ada kartu tani”. (Wawancara 05 Februari Pukul 08.00).

Perintah-Perintah Implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melkukan kebijakan, maka implementasi tidak akan cenderung

berjalan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Implementasi Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas Sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Dalam pengelolaan Kartu tani di Kabupaten Temanggung khususnya Kecamatan Kranggan dalam melaksanakan Program Kartu Tani belum mempunyai Staf Khusus yang hanya menangani Program Kartu Tani. Program Kartu Tani ini adalah tugas sampingan yang di emban oleh beberapa Staf di Dinas Pertanian maupun BPP. Artinya Staf tersebut tidak hanya menangani kartu Kartu Tani saja tapi masih ada tugas lainnya. Seperti Penyuluh pertanian di tugasi tugas tambahan sebagai admin kartu Tani Kabupaten juga kecamatan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Fajar selaku Admin Kartu Tani Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Staf Khusus yang menangani Kartu Tani ada tapi itu tugas sampingan, seperti saya itu penyuluh, tapi ditugasi sampingan sebagai Admin kartu tani kabupaten. Artinya ada tapi bukan mengurus kartu tani saja tapi punya tupoksi dan tugas yang lain sesuai dengan jabatan”. (wawancara 10 Februari 2020 pukul 07.30).

Petugas yang menangani Program Kartu Tani sudah memiliki keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Misal Penyuluh pertanian sudah memiliki keahlian dalam berbicara didepan umum supaya apa yang di sosialisasikan itu dapat di terima dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu mereka juga menguasai materi apa yang disampaikan terutama pengetahuan dalam bidang pertanian termasuk pupuk. Dalam pelaksanaan program Kartu tani diperlukan orang-orang yang muda yang mengetahui IT dalam menggunakan komputer untuk penginputan data RDKK ke sistem. BPP Kecamatan Kranggan SDM nya sudah bagus karena masih muda-muda belum masa-masa pensiun. Pelatihan dan Workshop juga ada untuk mengasah keahliannya

Hal tersebut berdasarkan wawancara Mas Ikaf selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Punya jadi semua sudah ada tupoksiya masing-masing, seperti penyuluh itu mendampingi petani menyusun RDKK, diarahkan bahwa pupuk dengan jenis pupuk A B C untuk tanaman ini sekian, admin kartu tani tingkat kecamatan sudah sesuai posnya, admin mengerjakan sistem aplikasinya dari Krtu tani baik itu SINPI, ERDKK dari kementerian itu admin, itu sudah berjalan sesuai dengan tugas masing-maing. SDM Untuk di kecamatan Kranggan Komposisinya bagus masih cukup muda-muda belum mendekati pensiun, dan memiliki keahlian dalam bidang IT untuk pengaplud an RDKK ke sistem.Ada Rapat Koordinasi antara teman-teman penyuluh sekabupaten tiab bulan, ada pelatihan workshop RDKK juga ada”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edi Suwito selaku ketua Kelompok Tani sebagai berikut:

“Iya sudah punya keahlian semua, mumpuni lah kalau dilihat dari pendidikannya juga sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya”.
(Wawancara 05 Februari 2020)

Dalam menjalankan Program Kartu Tani Dinas Pertanian Temanggung mengalami kendala SDM karena dituntut oleh waktu untuk segera selesai, padahal kartu tani itu hal yang baru. Dan ada tahap-tahap dalam pelaksanaan agar aplud RDKK selesai dan keluar kuotanya permasing-masing petani. Tahap-tahap yang harus di lewati yaitu melalui proses Sosialisasi ke masyarakat yang membutuhkan waktu yang tidak instan, karena agar masyarakat paham itu membuahkan sosialisasi yang tidak cuma sekali saja tetapi berkali-kali dengan jumlah SDM yang terbatas pula, kemudian tahap selanjutnya menggu persyaratan dari petani tersebut terkumpul, baru bisa menginput data RDKK kedalam sistem, proses penginputan ribuan data kesistem tersebut memerlukan waktu yang tidak singkat, karena proses pengapludan itu bersamaan se Provinsi, akibatnya Sistem menjadi loadingnya lama, agar pengapludan itu berjalan cepat, maka dilakukan diluar jam kerja yaitu mulai seitar jam 22.00 WIB. Otomatis karena malam nya lembur maka pagi harinya ketika kerja ngantuk dan lelah sehingga pekerjaan tidak optimal.

Hal Tersebut disampaikan dalam wawancara dengan Bapak Fajar selaku Penyuluh Kartu Tani Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Kalau Kendala SDM gini mbak, awal kartu tani itu kan hal yang baru, tapi kita dituntut untuk segera, yang namanya untuk bisa keluar kuotanya kan melalui tahap-tahap sosialisasi, nyusun RDKK,

menginput RDKK kedalam sistem itu yang memerlukan waktu, padahal kita dibatasi waktu, ada ratusan ribu padahal, pada waktu itu kan pengapludan satu provinsi bersamaan jadi sistemnya itu lola, kita tu aplud-aplud data diatas jam 10/11 malam untuk mencari waktu-waktu yang bisa lancar”. (Wawancara 10 Februari 2020 pukul 07.30).

Sedangkan kendala pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan mengalami kendala dalam jumlah Penyuluh yang terbatas hanya 6 Orang. Padahal di Kecamatan Kranggan terdapat 13 Desa dengan 118 Kelompok Tani, jadi tiap Penyuluh memegang 3 sampai 4 desa dengan 20 sampai 30 Kelompok Tani. Hal tersebut tentu sangat kekurangan penyuluh karena dalam bidang pertanian bukan hanya tentang kartu Tani saja, tetapi masih ada program-program pertanian yang lain. Jadi wajar jika masih terdapat beberapa kelompok tani yang tidak aktif kurang di pedulikan oleh Penyuluh, karena Penyuluh sudah kuwalahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Mas Ikaf selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Masalah SDM kendalanya di Kranggan itu Cuma terdapat 6 penyuluh, sedangkan di kranggan terdapat 118 kelompok tai dan Ribuan petani jumlahnya, saya saja mengurus 30 kelompok tani di kecamatan Kranggan”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Kesimpulannya dari beberapa pendapat di atas yaitu Sumber daya manusia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Temanggung maupun di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan Sudah baik sesuai dengan keahlian dan pendidikannya, kendalanya Dintanpangan hanya pada waktu yang terbatas. Sedangkan Kendala BPP terbatasnya Penyuluh.

b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, tanpa anggaran yang memadai kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Menurut Edward III terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Tahun 2020 Pemerintah mengalokasikan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp 26,6 triliun untuk 7,94 juta ton. Alokasi tersebut mengacu pada luas lahan baku sawah yang saat ini masih dipegang pemerintah yakni 7,1 juta hektare. Luas baku sawah berkaitan erat dengan area tanaman padi berikut kebutuhan pupuknya. Secara rinci, pupuk urea sebanyak 3,27 juta ton senilai Rp 11,34 triliun, SP-36 sebanyak 500 ribu ton senilai Rp 11,65 triliun, ZA sebanyak 750 ribu ton setara Rp 1,34 triliun, serta NPK sebanyak 2,7 juta ton dengan nilai Rp 11,12 triliun. Terakhir yakni pupuk organik atau kompos kualitas tertentu senilai Rp. 1,4 triliun. Sumber : m.republika.co.id

Anggaran Program Kartu Tani Kecamatan Kranggan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Pembiayaan penyusunan ERDKK bersumber dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut didasarkan wawancara dengan Bapak Fajar Wardono selaku Admin Program Kartu Tani di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“anggaran dana untuk melaksanakan program kartu tani dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30)

Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh Mas Ikaf Penyuluh Pertanian Kranggan sebagai berikut:

“Anggaran itu awalnya di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi, kemudian ERDCK sekarang itu sudah di handle oleh pusat, artinya pusat dan daerah itu mengeluarkan”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Anggaran Dana yang diberikan kepada Dinas Perertanian dalam pengalokasian untuk Implementasi Program Kartu Tani sebenarnya sudah cukup, akan tetapi karena waktu penginputan data RDKK dan penyekenan data petani kabupaten temanggung yang jumlahnya ribuan petani, dan dengan waktu yang terbatas menyebabkan sarana dan prasarana seperti laptop/komputer mengalami kerusakan, Print-print an juga rusak, alat scan juga rusak karena tidak sanggup digunakan untuk menscan dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wardono selaku admin Kartu Tani di Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

”Anggaran bisa dikatakan antara cukup dan tidak cukup, karena kita perlu sarana dan prasana, karena pada waktu aplud data karena yang di aplud itu ribuan maka banyak printer yang jebol, komputer, laptop juga banyak yang rusak”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Sedangkan anggaran Pemerintah Provinsi yang diberikan kepada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan bisa dikatakan kurang, karena anggaran yang diberikan belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi, Penyuluh hanya diberikan uang saku perjalanan setiap melakukan penyuluhan. Solusi yang dilakukan penyuluh untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi ke pertemuan rutin kelompok tani. Hal ini menimbulkan dampak negatif bagi kelompok yang

tidak aktif atau jarang melakukan sosialisasi akan ketinggalan informasi, ilmu, dan bantuan-bantuan dari pemerintah.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan mas Ikaf Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan, sebagai berikut:

“Kalau ditanya cukup yaa belum, karena kita sosialisasi sampai ditingkat masyarakat itu kan dompleng lewat pertemuan-pertemuan Kelompok, tidak ada anggaran khusus untuk sosialisasi tingkat desa secara rutin. Di situ kita menyampaikan program-program dari pemerintah. Tetapi tiap melakukan sosialisasi nanti cuma ada uang jalan”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Dalam pembuatan Kartu Tani Petani tidak dipungut biaya apapun, Gratis tanpa ada tambahan-tambahan biaya yang lain. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumian Petani Kecamatan Kranggan, sebagai berikut:

“tidak dipungut biaya mbak, gertis”. (Wawancara 06 Februari 2020 pukul 13.00).

Sedangkan jatah pupuk yang diajukan sama penetapan atau alokasi yang diberikan jauh dari yang diajukan, bahkan tiap tahun semakin berkurang. Hal tersebut dibuktikan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.5. Data Pesanan dan Penetapan Pupuk Petani Kecamatan Kranggan Kranggan Tahun 2020

No.	Jenis Pupuk	Pesanan	Penetapan
1	Pupuk Urea	1368 ton	606 ton
2	Pupuk SP	723 ton	40 ton
3	Pupuk ZA	423 ton	69 ton
4	Pupuk NPK	3125 ton	216 ton
5	Pupuk Organik	835 ton	37 ton

Sumber: Data Balai Penyuluhan Kecamatan Kranggan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pupuk yang diberikan oleh petani jauh dari yang di pesan bahkan ada yang penetapannya tidak sampai 10% dari jumlah pupuk yang di pesan. Tetapi meskipun jumlah alokasi pupuk yang diberikan itu jauh dari pemesanan petani kecamatan Kranggan karena kranggan kebanyakan nanamnya padi, cabe dan jagung, maka tidak membutuhkan pupuk yang begitu banyak dibandingkan tanaman sayuran. Juga karena di desa-desa masih banyak yang ternak kambing dan sapi, maka pupuk organik pun masih melimpah. Sehingga meskipun pupuk yang diberikan itu tidak sesuai kebutuhan tetapi petani masih jarang yang kekurangan pupuk.

Hal Tersebut berdasarkan wawancara Mas Ikaf selaku penyuluh pertanian, sebagai berikut:

“Sudah cukup, meskipun jatah pupuk nya tiap tahun berkurang, tapi karena kita komitmen untuk penerapak pupuk organik Saya kira jatah pupuk itu cukup. Kalau ada jatah yang masih kurang dari jumlah pupuk yang dibutuhkan karena SDM petani yang masih rendah, jadi penerimaan informasi yang disampaikan itu kurang harusnya SPT yang dikumpulkan semua tapi yang dikumpulkan cumma 1 maka pupuk yang didapatkanjuga akan lebih sedikit tidak sesuai yang dibutuhkan. Selain itu masih banyak petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan”. (Wawancara 05 Februari 2020 Pukul 08.00)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Marjoko Ketua Gapok Tani desa Kramat sebagai berikut:

“Disini masih jarang yang membeli pupuk kimia karena masyarakat masih pada menggunakan pupuk organik, selain itu yang ditanam kopi, jahe tidak membutuhkan pupuk kimia, beda dengan masyarakat pegunungan sana yang ditanam bakau, sayuran itu membutuhkan pupuk kimi, permasalahan yang kedua karena wilayah Kramat dengan KPL di Kranggan yang jaraknya lumayan jauh, yang tentunya membutuhkan ongkos transportasi yang lebih, misal ngojeg ya sekitar 20 ribu, jadi masyarakat lebih memilih membeli di pengecer terdekat meskipun harganya lebih mahal 10 ribu. Nah solusinya kartu tani dikumpulkan ke saya kemudian saya yang membelikan di kranggan

nanti petani tinggal mengambil di saya”. (Wawancara 06 Februari 2020, pukul 13.30).

Setiap KPL memiliki wilayah masing-masing penjualannya, di Kranggan terdiri dari 13 Desa dan 3 KPL, masing-masing KPL memegang tiga sampai 4 desa per-KPL ditetapkan oleh dinas. Tiap KPL diberikan data RDKK petani yang berisi jumlah kuota pupuk tiap petani di desa yang dipegangnya. Jadi KPL tidak dapat menjualkan kesembarang orang, hanya kepada petani yang menjadi wilayah yang menjadi jatahnya. Sedangkan sistem Penebusan Pupuk nya KPL menghubungi distributor untuk memesannya sesuai dengan daya tampung Kios, atau jumlah pupuk yang mau di belinya disesuaikan sesuai dengan kira-kira habis berapa atau laku beerapa, jika pupuk sudah sampai di KPL maka itu menjadi tanggungan KPL karena telah dibayar KPL. Sedangkan jika ada pupuk yang tidak ketebus di distributor maka akan ada realokasi kecamatan lain yang masih kuran jatah pupuknya, Kecamatan dalam lingkup Kabupaten, baru jika Kabupaten masih ada sisa pupuk yang belum ketebus baru realokasi ke kabupaten lain.

Hal tersebut berdasarkan wawancara mas ikaf selaku penyuluh pertanian, sebagai berikut:

“sistem Penebusan Pupuk nya pertama KPL menghubungi distributor untuk memesannya pupuk, itu disesuaikan daya tampung Kios, atau jumlah pupuk yang akan di belinya disesuaikan sesuai dengan kira-kira habis berapa atau laku berapa, jika pupuk sudah sampai di KPL maka itu menjadi tanggungan KPL karena telah dibayar KPL. Untuk pupuk yang tidak ketebus di distributor maka akan ada realokasi kecamatan lain yang masih kuran jatah pupuknya, Kecamatan dalam lingkup Kabupaten, baru jika Kabupaten masih ada sisa pupuk yang belum ketebus baru realokasi ke kabupaten lain”. (Wawancara Rabu, 05 Februari Pukul 08.00).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran yang diberikan Pemerintah ke Dinas Pertanian kurang dalam bentuk sarana dan prasarana, sedangkan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan belum ada anggaran khusus yang diberikan untuk sosialisasi kedesa-desa. Dalam pembuatan kartu tani petani tidak dipungut biaya sepeserpun. Anggaran pupuk yang di berikan Petani sudah cukup.

c. Sumber Daya Peralatan

Menurut Edward III Sumber Daya peralatan merupakan sarana yang dipergunakan untuk oprasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi Tanah, Gedung, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam implementasi kebijakan .

Sumber daya peralatan memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, jika peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia maka dapat menghambat implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan tidak terdapat peralatan khusus untuk pelaksanaan program kartu tani karena sarana dan prasaranan yang dibutuhkan dalam proses pengimplementasian kartu Tani sudah terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung maupun Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan, sarana dan prasaranan tersebut berupa seperti alat-alat untuk sosialisasi yaitu LCD, Proyektor, Laptop, Komputer, Printer, serta Scanan semua sudah terdapat di dinas tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Mas Ikaf selaku penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan yaitu sebagai berikut:

“Kalau fasilitas untuk kartu tani itu tidak ada, tapi kalau fasilitas penyuluhan dari dinas ada seperti Komputer, LCD Sound, lembar-lembar leaf itu ada”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Dalam pelaksanaan Program Kartu Tani Dintanpangan dan BPP mengalami kendala dalam hal sarana dan prasarana yang berupa peralatan yang disebutkan diatas, karena proses penscanan data petani yang bersamaan seluruh petani di Temanggung Khususnya Kecamatan Kranggan, sedangkan jumlah petani Ribuan hanya di scan dengan beberapa alat saja, sehingga mengakibatkan alat-alat yang digunakan tersebut rusak, eror dan tidak dapat digunakan seperti sebelumnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fajar Wardono selaku admin Kartu Tani kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

“Fasilitas kalau untuk dinas tidak ada, tapi malah sarana dan prasarana seperti scan printer laptop komputer pada jebol dan rusak ada yang eror karena penyekenan yang ribuan itu”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Dari masalah tersebut dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung berharap ada penggantian sarana dan prasarana yang telah rusak agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan kartu tani tidak ada kendala dalam hal sarana dan prasarana berupa peralatan.

Dalam Pelaksanaan Program Kartu Tani khususnya dalam pelayanan penebusan pupuk bersubsidi pihak KPL mendapatkan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kebijakan dalam hal transaksi penjualan Pupuk bersubsidi berupa mesin EDC (Electronic Data Capture) dari pihak Bank BRI . mesin EDC ini digunakan untuk membaca alokasi Pupuk Bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi.

Hal tersebut diungkapkan oleh koh tin salah satu pemilik Kios Pupuk bersubsidi, yaitu sebagai berikut:

“Fasilitas yang diberikan Cuma ada dari BRI berupa mesin EDC untuk transaksi penjualan pupuk bersubsidi”. (Wawancara 30 Januari 2020 pukul 11.00).

Tetapi dalam Implementasinya KPL masih mengalami kendala peralatan di Mesin EDC nya yaitu berupa Sinyal yang kadang-kadang hilang, ketika lampu padam batrai habis maka mesin EDC tersebut tidak dapat di gunakan untuk transaksi penjualan pupuk bersubsidi. Selain kendala tersebut terkadang mesin EDC juga mengalami eror atau kerusakan, yang tentunya tidak dapat digunakan untuk transaksi. Jika terjadi masalah tersebut maka harus memanggil pihak dari BRI untuk memperbaikinya, tentunya tidak dengan waktu yang instan, petugas langsung datang dan mesin langsung kembali baik, tidak seperti itu.

Hal ini diungkapkan oleh Bapak Syahrir, selaku pemilik salah satu kios sebagai berikut:

“Kendalanya kalau mati listrik kemudian batrainya habis, kadang sinyalnya juga troubel jadi solusinya kartunya harus ditinggal digesek kalau sudah normal kembali mesinnya”. (Wawancara 30 Januari 2020 pukul 09.300).

Kemudian dari pihak Petani mendapatkan Sarana dan Prasarana Peralatan untuk Transaksi pupuk bersubsidi beerupa Kartu Tani dan buku tabungan Simpedes, Kartu Tani ini berupa Kartu ATM dari BRI yang dapat digunakan untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi di KPL yang telah ditunjuk, selain untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi kartu tani dapat digunakan untuk transaksi perbankan yang lain seperti menabung, mengambil uang di atm, layanan simpan meminjam dan lain sebagainya.

Dalam penggunaannya sebelumnya mengalami kesulitan karena Petani harus menabung di Bank terlebih dahulu agar Kartu Tani dapat digunakan untuk membayar pupuk bersubsidi, padahal rata-rata petani itu pendidikannya rendah tidak tahu menahu masalah perbankan, kedua rata-rata petani sudah berumur tua, ke tiga rata-rata penghasilan petani rendah untuk mencukupi kebutuhan keluarga saja masih sering kekurangan apalagi untuk menabung, jadi jika petani harus menabung di bank dengan antrian di BRI itu tidak sebentar bisa berjam-jam maka banyak petani yang keberatan karena waktunya akan terbuang sia-sia. Jadi untuk memudahkan proses transaksi petani bisa membayar kesh ke Kios, nanti pihak kios menyetorkan uangnya ke Kartu tani petani melalui sistem aplikasi, baru kartu tani dapat di gunakan untuk transaksi dengan mudah.

Hal tersebut berasarkan wawancara dengan Bapak Sumian salah satu Petani Kecamatan Kranggan, sebagai berikut:

“Kendala peralatan tidak ada karea sekarang bisa membayar kes ke kios tidak seperti dulu harus menabung ke Bank terlebih dahulu”.
(Wawancara 06 Februari 2020 pukul 13.00)

Kendala Lainnya yaitu mengenai KPL yang ketiga-tiganya hanya ada di Daerah Kelurahan Kranggan saja tidak menyebar di berbagai daerah, hal ini banyak dikeluhkan oleh petani, terutama petani yang daerah perbatasan Kranggan daerah desa Bengkal, Pare, Kramat dan daerah perbatasan yang lain, hal ini menyebabkan petani membeli pupuk di daerah lain beda kecamatan yang wilayahnya lebih dekat, seperti Bengkal membeli di Selopampang, daerah Kranggan pojok membeli di medono, Pare membeli di secang jika hal ini terus berlangsung dampaknya tahun depan Kuota

Pupuk akan semakin berkurang karena tidak di tebus/terbaca pada kartu Tani. Meskipun dari Ketua-ketua Kelompok Tani maupun Gapok tani telah menemukan solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mengumpulkan kartu tani dari para petani dikelompoknya untuk penebusan pupuk menggunakan uang kas mereka terlebih dahulu, sehingga petani nantinya akan lebih dekat dalam pembelian pupuk.

Hal tersebut berdasarkan Wawancara dengan Bapak Marjoko Ketua Gapok Tani Desa Kramat, sebagai berikut:

“Disini masih jarang yang membeli pupuk kimia karena masyarakat masih pada menggunakan pupuk organik, selain itu yang ditanam kopi, jahe tidak membutuhkan pupuk kimia, beda dengan masyarakat pegunungan sana yang ditanam bakau, sayuran itu membutuhkan pupuk kimi, permasalahan yang kedua karena wilayah Kramat dengan KPL di Kranggan yang jaraknya lumayan jauh, yang tentunya membutuhkan ongkos transportasi yang lebih, misal ngojog ya sekitar 20 ribu, jadi masyarakat lebih memilih membeli di pengecer terdekat meskipun harganya lebih mahal 10 ribu. Nah solusinya kartu tani dikumpulkan ke saya kemudian saya yang membelikan di kranggan nanti petani tinggal mengambil di saya”. (Wawancara 30 Januari 2020 pukul 13.30)

Hal yang sama juga disampaikan Bapak Muh Isrofi selaku Ketua Gabungan Kelompok Tani desa Bengkal sebagai berikut:

“Daerah sini Bengkal masyarakat sebagian mengambil pupuk di Plumbon, kalau masyarakat Pare ngambil di Secang karena lebih dekat dan bisa tanpa menggunakan kartu tani. Hal ini jika penebusan pupuk tidak terinput di kartu tani maka untuk tahun kedepan pupuknya dikuangi karena anggapan pemerintah Kranggan Tidak butuh Krtu Tani, maka solusinya saya berinisiatif untuk mengumpulkan kartu tani dari masyarakat, nanti kemudian Pupuk saya tebus semua menggunakan uang kas Gapok Tani, kemudian masyarakat tinggal membeli kesini ke Gapok Tani tanpa harus jauh-jauh ke Kranggan”. (Wawancara 07 Februari pukul 14.30).

Cara tersebut dinilai belum efektif karena Kartu Tani di pegang oleh Ketua Kelompok sehingga tidak dapat digunakan untuk manfaat lainnya

seperti layanan perbankan, kedua harga pupuk menjadi lebih mahal karena ditambah uang kas kelompok yang tadinya 90.000 jadi 100.000 misalnya, ketiga uang kas yang seharusnya dapat digunakan untuk hal mengembangkan kelompok jadi terpakai untuk penebusan pupuk, jadi mereka masih berharap bahwa KPL untuk kedepannya lebih dekat lagi dengan tempat tinggal.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu ketua Gapok Tani Bapak Muh Isrofi sebagai berikut:

“Harapan saya semoga ke depannya KPL lebih dekat dengan masyarakat, bahkan Bengkal pun siap jika menjadi KPL”. (Wawancara 07 Februari 2020 Pukul 14.30).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah satu petani Bapak Sumian sebagai berikut:

“Harapannya supaya KPL lebih dekat lagi dengan masyarakat, jaraknya tidak jauh”. (Wawancara 06 Februari 2020 pukul 13.00).

Kesimpulan dari beberapa pernyataan diatas yaitu dari dinas pertanian terkendala sarana dan prasarana seperti Scan, Printer, Komputer, Laptop yang rusak/ eror karena proses data yang ribuan jumlahnya, Kendala dari kios pupuk Lengkap yaitu alat EDC yang tergantung pada sinyal, karena sinyalnya hilang, kadang eror, kalau batrai habis misal lampu padam tidak dapat transaksi. Kendala dari masyarakat yaitu KPL yang jauh dari tempat tinggal karena ketiganya berada di kelurahan Kranggan, harapan untuk kedepannya KPL lebih merata lagi ke daerah-daerah yang dekat dengan masyarakat.

d. Sumber Daya Kewenangan

Menurut Edward III Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenagannya.

Pelaksanaan Program Kartu Tani ini berdasarkan Kesepakatan antara Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B. 112-DIR/KPM/0/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani Provinsi Jawa Tengah.

Yang berwenang dalam Kebijakan Program Kartu Tani yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Ke Dinas-Dinas Pertanian se Jawa Tengah termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Hal tersebut juga disampaikan oleh bapak Fajar selaku Admin Kartu Tani Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

“Yang berwenang ya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pertanian Provinsi sampai ke kita Dinaas Pertanian Temanggung”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Wewenang Dinas Pertanian dan Penyuluh Kecamatan Kranggan yaitu terutama wewenang untuk mengadakan sosialisasi, wewenang untuk

mendata petani dan memasukkan data petani ke ERDCK, jika terdapat suatu masalah mengenai kartu tani maka diselesaikan secara berjenjang, jika kelompok tani dapat mengatasi masalahnya maka diselesaikan oleh kelompok tani sendiri, jika tidak bisa maka akan naik ke tingkat Gapoktan, jika Gapoktan tidak dapat menyelesaikannya juga maka akan ditangani BPP, jika BPP tidak bisa menengani maka akan menjadi wewenang dinas Pertanian Temanggung utuk mengatasinya, begitu seterusnya. Tetapi jika masalah tersebut berupa kayak mesin EDC eror, kartu tani tidak bisa digesek, kartu tani hilang nanti dari pihak BPP akan menjembatani cara menyelesaikan masalahnya ke BRI selaku yang berwenang dalam layanan perbankan Kartu Tani.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajar Admin Kartu Tani Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

“Yaa berjenjang mbak, kalau kelompok bia menyelesaikan yaa kelompok, kalau tidak bisa naik ke desa, kalau desa gak bisa naik ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mas Ikaf Penyuluh Kecamatan Kranggan, sebagai berikut:

“Tergantung permasalahannya, kalau permasalahannya seperti kartu eror maka tugas kita menjebatani antar petani dan BRI misal, atau permasalahan mesin EDC nya Rusak maka kita menjembatani antara pemilik kios dengan BRI, kita tidak memutuskan tapi menjembatani menyarikan solusi”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Kesimpulannya dari Keterangan diatas yaitu dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, sedangkan dalam memecahkan masalah dilakukan dengan

berjenjang sesuai dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

3. Disposisi/ Agen Pelaksana

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa : jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2008:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Pegawai yang diangkat atau ditugaskan dalam pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah memiliki Keahlian dan

ketrampilan dalam melaksanakan tugas. Kemampuan yang dimiliki sudah disesuaikan dengan bidang pekerjaannya, misalnya Penyuluh sudah memiliki keahlian dalam berbicara di depan umum, cara menyampaikan yang baik biar apa yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, dan tentunya harus menguasai materi artinya ahli dalam bidang pertanian, latar belakang pendidikan juga diperhatikan, yang diterima sebagai penyuluh pertanian yaitu yang lulusan dari Pertanian. Tugas yang diberikan sudah sesuai dengan tupoksi-tupoksinya. Yang ditugaskan sebagai admin tentunya sudah menguasai dalam bidang teknologi seperti komputer, ini berguna dalam mengisi data RDKK, dan data-data yang lain. Tentunya jika profesi sesuai dengan keahlian dan ketrampilan serta pendidikan yang mendukung maka Implementasi kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Fajar Wardono selaku admin kartu tani temanggung sebagai berikut:

“Sudah mbak, mereka mempunyai keahlian khusus, misal penyuluh sudah mempunyai keahlian untuk berbicara di depan umum selain itu juga harus mempunyai pengetahuan dalam bidang Pertanian”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Edi Suwito ketua kelompok tani sebagai berikut:

“Iya sudah punya keahlian semua, mumpuni lah kalau dilihat dari pendidikannya juga sudah sesuai dengan bidang pekerjaannya”. (wawancara 05 Februari 2020 pukul 20.30)

Dalam mengasah keahlian dan ketrampilannya, dari pihak Dinas atau pemerintah Provinsi juga tidak jarang mengadakan pelatihan-

pelatihan dan workshop-workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Yang terakhir terdapat pelatihan Workshop RDKK. Bukan hanya melalui workshop atau pelatihan saja, tetapi rutin tiap bulan terdapat rapat koordinasi antara penyuluh-penyuluh sekabupaten Temanggung untuk evaluasi kegiatan, menyelesaikan masalah-masalah yang ada, bertukar ilmu dan informasi, dan lain-lain.

Hal tersebut disampaikan oleh mas Ikaf selaku penyuluh pertanian kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Punya jadi semua sudah ada tupoksiya masing-masing, seperti penyuluh itu mendampingi petani menyusun RDKK, diarahkan bahwa pupuk dengan jenis pupuk A B C untuk tanaman ini sekian, admin kartu tani tingkat kecamatan sudah sesuai posnya, admin mengerjakan sistem aplikasinya dari Krtu tani baik itu SINPI, ERDKK dari kementerian itu admin, itu sudah berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Ada Rapat Koordinasi antara teman-teman penyuluh sekabupaten tiap bulan, ada pelatihan workshop RDKK juga ada” (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Kesimpulan dari uraian diatas adalah dalam pengangkatan petugas pelaksana Implementasi Program kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah sesuai dengan keahlian/ ketrampilan serta latar belakang pendidikan yang sesuai pada bidangnya. Untuk mengasah ketrampilannya dari pihak Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten seing mengadakan Pelatihan-pelatihan, workshop juga rapat koordinasi.

a. Insentif

Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan

mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Untuk mendorong pegawai dalam pelaksanaan implementasi program kartu tani, terdapat Insentif yang diberikan oleh pemerintah Provinsi kepada Dinas pertanian Temanggung, karena Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung telah berhasil mencapai target yaitu menjadi Kabupaten yang penerapan implementasi Kartu Taninya terbaik se Jawa Tengah.

Hal itu diungkapkan oleh bapak Bapak Fajar Wardono selaku admin kartu tani kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Sini dinas pertanian temanggung juga kemarin dapat terus dari Dinas Provinsi karena temanggung kan tingkat terbaik no 1 se Jawa Tengah bahkan Indonesia, kalau kecamatan yang dapat itu kemarin daerah Ngadirjo, dan Kedu, tapi karena Kranggan itu terjelek ya tidak dapat reaward”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Untuk Kecamatan Kranggan sendiri belum dapat mencapai target karena kranggan implementasi program kartu tani masih berada pada tingkatan nomor dua dari bawah. Sehingga kecamatan kranggan belum mendapatkan insentif, yang dapat dari kecamatan Ngadirjo dan kedu karena merupakan kecamatan dengan penerapan kartu tani terbaik di temanggung.

Dalam unit KPL (Kios pupuk lengkap) sendiri terdapat reaward dari pihak BRI, tetapi yang dapat reaward adalah yang jumlah transaksi pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani yang terbanyak.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajar Wardono selaku admin Kartu Tani Temanggung, sebagai berikut:

“Kalau KPL kemarin ada yang dapat dari BRI, dengan KPL yang transaksinya paling banyak”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Kesimpulannya adalah insentif selalu diberikan jika sudah memenuhi target yang ditetapkan. Dengan insentif ini diharapkan dapat menambah semangat pegawai dalam mencapai visi dan misinya.

4. Struktur Birokrasi

Faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika, dalam pelaksanaan kebijakan sumber daya, komunikasi dan disposisi sudah berjalan dengan baik. Tetapi struktur birokrasi tidak berjalan dengan baik, maka dalam pelaksanaan akan mengalami kendala yang mencakup struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara organisasi bersangkutan. Struktur birokrasi yang terpisah-pisah cenderung menimbulkan konflik antara pelaku usaha yang sangat berpengaruh kepada tingkat disposisi.

Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut Edward dalam Subarsono (2006:92), struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting

dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedure* atau SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Dengan begitu struktur birokrasi mempunyai pembagian tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing orang yang ada dalam organisasi, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik. Struktur birokrasi menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi diterapkan dalam organisasi. Struktur birokrasi merupakan suatu gambar yang menggambarkan tentang tipe organisasi, pembagian bidang-bidang, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang hubungan pekerjaan yang terkait, garis perintah dan tanggung jawab serta kendali pada sistem pimpinan organisasi.

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam kebijakan Program Kartu Tani, salah satu aspek yang terpenting dalam organisasi adalah adanya standar operasional prosedur. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi yang ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung serta Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan-aturan yang ada diDintanpangan dan BPP. Para pelaksana kebijakan Kartu Tani telah melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mas Ikaf selaku Penyuluh kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Punya jadi semua sudah ada tupoksiya masing-masing, seperti penyuluh itu mendampingi petani menyusun RDKK, diarahkan bahwa pupuk dengan jenis pupuk A B C untuk tanaman ini sekian, admin kartu tani tingkat kecamatan sudah sesuai posnya, admin mengerjakan sistem aplikasinya dari Krtu tani baik itu SINPI, ERDKK dari kementerian itu admin, itu sudah berjalan sesuai dengan tugas masing-maing”. (Wawancara 05 Januari 2020 pukul 08.00).

Berdasarkan pendapat uraian diatas bahwa struktur birokrasi di telah berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan yang ada dimana SOP dilaksanakan sesuai prosedur yang terdapat di struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung serta Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan dalam pelaksanaan Program Kartu Tani sudah di laksanakan dengan cukup baik.

a. *Standard Operational Procedures (SOP)*

birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Program Kartu Tani, salah satu aspek yang penting adalah *Standard Operational Procedures (SOP)*. SOP adalah suatu standart atau pedoman yang tertulis yang digunakan untuk mendorong pelaksanaan Program kartu Tani itu dapat mencapai tujuan.

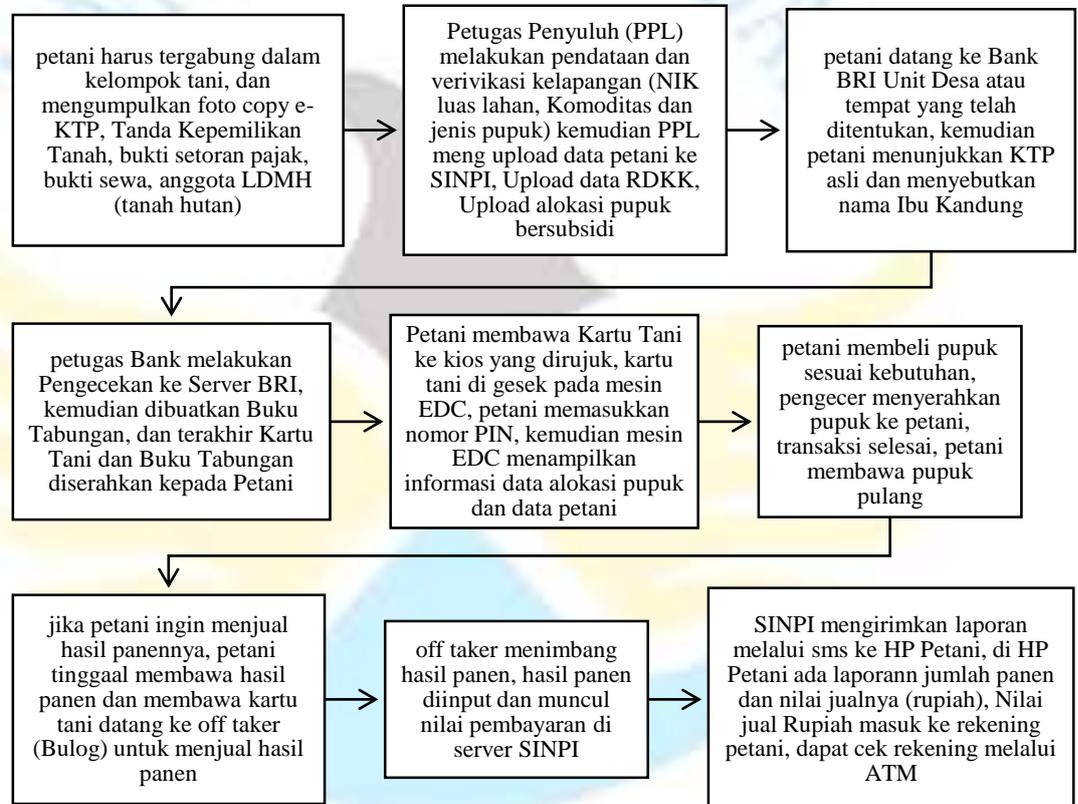
Dalam pelaksanaan program Kartu tani di Kecamatan Kranggan sudah berjalan sesuai SOP atau dalam kartu tani itu di sebut petunjuk pelaksanaan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Bapak Fajar Admin Kartu Tani Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Iyaa, ada petunjuk pelaksanaan atau juknis nya. Dan sudah berjalan sesuai degan petunjuk teknis yang ada”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30). (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Dalam pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ada prosedur-prosedur yang harus dilalui berdasarkan petunjuk pelaksanaan Kartu Tani, mulai dari proses pendataan dan verifikasi data, penerbitan kartu tani, pembelian pupuk menggunakan kartu tani, hingga penjualan menggunakan kartu tani, yang dalam implementasi kartu tani di Kecamatan Kranggan akan penulis jelaskan dibawah ini:

Gambar 4.3 Alur pembuatan Kartu Tani



Sumber: <https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/>

- Petunjuk pelaksanaan Pendataan dan verivikasi data
 1. Persyaratan Mendapatkan Kartu Tani
 - a. Petani harus tergabung dalam Kelompok;

- b. Petani mengumpulkan Foto Copy e-KTP dan Tanda Kepemilikan Tanah bukti setoran pajak tanah, bukti sewa, anggota LMDH (tanah hutan).
2. Pendataan dan Verifikasi Data RDKK
 - a. Petugas Penyuluh (PPL) melakukan pendataan dan Verifikasi data ke lapangan (NIK, Luas lahan, Komoditas dan jenis pupuk);
 - b. PPL meng upload data petani kedalam SINPL.
 3. Upload Data RDKK
 4. Upload Alokasi Pupuk Bersubsidi

Proses Pendataan dan verivikasi data Kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dari pemerintah pusat. Hal tersebut dapat diketahui melalui wawancara dengan mas Ikaf selaku penyuluh pertanian Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Sudah mbak, SOP nya mulai dari akhir tahun petani mengajukan pupuk melalui RDKK didampingi temen-temen penyuluh kemudian kita verivikasi lalu kita ajukan ke sistem ERDKK di Kementerian Pertanian, kemudian dari pihak BRI mengambil data di RDKK untuk dimasukkan ke kartu tani, kemudian petani membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kuota”. (Wawancara 05 Januari 2020 pukul 08.00).

- Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Krtu Tani
 1. Data yang dibutuhkan : e KTP dan KK;
 2. Petani hadir BRI Unit Desa atau tempat yang telah ditentukan ;
 3. Menunjukkan KTP asli dan menyebutkan nama Ibu Kandung ;

4. Petugas melakukan pengecekan ke Server BRI;
5. Proses pembuatan Buku Tabungan
6. Penyerahan Kartu Tani dan Buku Tabungan BRI oleh petugas BRI

Dalam pelaksanaan proses penerbitan Kartu Tani di kecamatan kranggan dari 6 poin diatas, poin nomor 2 dan 3 di Kecamatan Kranggan yang jumlahnya ribuan dengan terbatasnya SDM dari BRI, jadi untuk memudahkan KTP sama KK dikumpulkan di ketua kelompok masing-masing, kemudian ketua kelompok memberikan data tersebut ke Penyuluh, lalu penyuluh yang menjembatani memberikan data tersebut ke BRI, kemudian untuk poin 6 pada waktu penyerahan Kartu Tani dan Buku Tabungan BRI di serahkan petugas BRI ke perwakilan dari ketua kelompok tani, disertai sosialisasi dari pihak BRI tentang hal cara penggunaan kartu tani, dan beberapa manfaat dari kartu tani tersebut. Hal tersebut tidak menyalahi Petunjuk pelaksanaan yang ada. Karena bertujuan untuk memudahkan dan tanpa ada kecurangan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Muh Isrofi salah satu Ketua Gapok Tani sebagai berikut:

“mengumpulkan SPT sama fotocopy KTP, tapi biar waktunya lebih cepat saya yang mengalah harus mendatangi petani satu persatu, jika sudah terkumpul maka diserahkan ke BPP kranggan”. (Wawancara 07 Februari 2020 pukul 14.30).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Edi suwito salah satu Ketua Kelompok sebagai berikut:

“Mengumpulkan KTP dan SPPT serta nama ibu kandung, kemudian dikasihkan ke PPL, annti PPL yang menginput Data RDKK nya, kalau kartunya yang ngasih dari pihak BRI melalui ketua kelompok tani yang hadir sekalian sosialisasi dari BRI waktu itu”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 20.30)

- Petunjuk Pelaksanaan Pembelian Pupuk menggunakan Kartu Tani
 1. Petani membawa Kartu Tani datang ke kios yang dirujuk;
 2. Kartu Tani digesek pada mesin EDC di kios pengecer pupuk bersubsidi;
 3. Masukkan nomor PIN
 4. Mesin ECD menampilkan informasi data alokasi pupuk dan data petani ;
 5. Lakukan pembelian pupuk sesuai kebutuhan;
 6. Cek kembali alokasi sisa kuota pupuk;
 7. Pengecer menyerahkan pupuk ke petani;
 8. Transaksi selesai, petani membawa pupuk pulang.

Dalam pelaksanaan cara pembelian pupuk menggunakan kartu tani di Kecamatan Kranggan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan diatas. Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan Petani Bapak Sumian sebagai berikut:

“Membelinya tiggal datang ke kios pupuk yang ditunjuk dengan wajib membawa kartu tani dan uang yang paling penting”. (Wawancara 06 Februari 2020 pukul 13.00).

Pembelian pupuk bersubsidi pada petunjuk pelaksanaannya petani haru memiliki saldo di Kartu Tani agar dapat digunakan untuk transaksi pembelian pupuk bersubsidi atau lebih jelasnya agar kartu

dapat digesek pada mesin EDC. Akan tetapi karena beberapa faktor diantaranya pertama, rata-rata petani penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga tidak ada uang untuk menabung. Kedua, petani banyak yang tidak paha dengan perbankan, ketiga masih banyak petani yang takut jika menabung di Bank mereka memilih menyimpannya dirumah, keempat, transportasi yang terbatas terutama untuk wilayah pelosok yang tidak ada angkutan umum, punya motor, tapi motor khusus kesawah, kadang SIM juga tidak punya. kelima proses mengantri di bank yang membutuhkan waktu terkadang lebih dari satu jam ngantrinya, jadi jika menabung 100.000 kalau hanya untuk membeli pupuk waktu yang digunakan untuk mengantri bisa digunakan untuk yang lain. Sehingga jika harus menggunakan saldo maka peraturan ini tidak akan bisa berjalan.

Untuk memudahkan transaksi pembelian pupuk dari pihak BRI memberikan solusi yang tadinya harus menabung terlebih dahulu sekarang dapat membeli pupuk dengan membayar uang ke ke Pengecer pupuk, kemudian dari pihak pengecer mentransfer sejumlah uang yang dibayarkan ke saldo Kartu Tani, kartu tani bisa digesek ke mesin EDC, data petani keluar, petani membeli sesuai kuota yang tersedia.

Hal tersebut berdasarkan wawancara dengan pak Tri pemilik kios pupuk lengkap sebagai berikut:

“Petani datang kesini membawa kartu tani ke kios, pembayaran sekarang dipermudah bisa kes bisa lewat atm (kartu Tani) kalau kes, sini menransfer ke pembelinya dulu sesuai yang dibayarkan. Pupuk yang diberikan sesuai dengan kuota yang tersedia. Kalau dulu ATM harus terisi untuk membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, tapi sekarang dipermudah karena kasihan petani apalagi petani yang sudah sepuh-sepuh jika harus mengantri bank yang lama cuma untuk pembayaran penebusan pupuk bersubsidi 100.000, 200.000”. (Wawancara 30 Januari 2020 pukul 10.15).

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Amin Sodikun, Ketua Kelompok Tani, sebagai berikut:

“Kalau mau beli sekarang suah mudah mbak tidak harus ada saldonya, jadi petani tinggal datag saja ke KPL yang telah ditunjuk sama membawa kartu Tani”. (Wawancara 07 Februari 2020 pukul 14.45).

- Petunjuk Pelaksanaan Penjualan Hasil Panen
 1. Petani membawa Kartu Tani datang ke off Taker (Bulog) untuk menjual hasil panen;
 2. Off Taker menimbang hasil panen;
 3. Hasil panen diinput dan muncul nilai pembayaran di server SINPI ;
 4. SINPI mengirimkan laporan melalui sms ke HP Petani;
 5. Di HP Petani ada laporan jumlah panen dan nilai jualnya (rupiah) ;
 6. Nilai jual (Rupiah) masuk ke rekening petani, dapat cek di rekening petani melalui ATM

Dengan Kartu Tani petani dapat menjual hasil panen tanpa perantara. Kendala yang sering dihadapi oleh para petani adalah ketika mau menjual hasil panen, petani terpaksa menjual hasil pertanian kepada para tengkulak yang mengambil untung besar. Dengan keberadaan Kartu

Tani diharapkan dapat memangkas praktik penjualan hasil pertanian yang tidak sehat ini, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Petani dapat dengan mudah melakukan penjualan secara langsung ke Bulog selaku off taker. Mereka cukup membawa kartu tani dan menimbang hasil panen. Hasil panen akan diinput dan muncul besaran pembayaran di server SINPI, dan akan dikirimkan ke HP petani via SMSP. SMS tersebut berisi nilai jual hasil panen, dan nantinya akan masuk rekening petani.

Akan tetapi implementasinya di Kecamatan Kranggan penjualan hasil panen ke Bulog belum terimplementasikan, artinya belum ada masyarakat yang menjual hasil panen ke bulog, malah sebagian juga ada yang belum tahu mengenai penjualan hasil panen ke bulog menggunakan kartu Tani

Hal tersebut berdasarkan wawancara Bapak Muh Isrofi Ketua Gapok Tani sebagai berikut:

“Manfaat nya selain untuk menebus pupuk juga dengan kartu tani bisa untuk sarana perbankan, untuk masalah penjualan ke Bulog belum bisa berjalan karena harga jual ke Bulog lebih rendah dari pada harga pasaran” (Wawancara 07 Februari 2020 pukul 14.30).

Hal tersebut dibenarkan juga oleh Bapak Fajar Wardono, Admin Kartu Tani Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Untuk menabung bisa, banyak petani yang sudah menggunakan kartu tani untuk transaksi perbankan, untuk penjualan ke Bulog atau ke Rego Pantes, sistem jual beli online yang memotong rantai seperti Bulog, jadi harga jualnya lebih tinggi ke konsumen akhirnya juga harganya tidak

terlalu tinggi bagi yang membeli, tapi disitu ada syarat-syaratnya nanti disurvei kontinewitas, kualitas dll, jadi di temanggung masih jarang yang memakai itu hangya baru ada di kaloran”. (Wawancara 10 Februari 2020 Pukul 07.30).

Berdasarkan Observasi yang penulis lakukan ketika bertanya ke beberapa petani mengenai penjualan hasil panen ke Bulog, masih banyak yang belum mengetahui, yang mereka tahu mengenai kartu Tani hanya bisa digunakan untuk menebus pupuk bersubsidi, sama dapat digunakan untuk menabung.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari uraian diatas mengenai Implementasi penggunaan Kartu Tani sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yaitu dalam hal pendataan dan verivikasi data sudah berjalan sesuai dengan Juklak, dalam hal penerbitan kartu tani juga sudah sesuai dengan Juklak, kemudian dalam pembelian pupuk juga sudah sesuai Juklak, hanya saja dimudahkan dengan dapat membayar kes, dan yang terahir mengenai penjualan pupuk ke Bulog belum terimplementasikan di Kecamatan Kranggan, bahkan belum banyak yang paham mengenai hal tersebut.

b. Fragmentasi

Sifat yang yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Pada umumnya, semakin

besar koordinasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan , semakin berkurang kemungkinan keberhasilan Program atau kebijakan.

Di dalam Program Kartu Tani ada beberapa pihak yang terlibat dalam Program Kartu Tani tersebut diantaranya yaitu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, BRI, Desperindag, Dinas Pertanian Kabupaten, BPP, Komisi pengawas pupuk dan Pestisida, KPL, Gappok Tani, Kelompok Tani, hingga sampai dengan Petani itu sendiri. Pihak-pihak tersebut harus saling berkomunikasi, satu sinergitas, satu Visi yang sama yaitu Kartu Tani harus terlaksana dengan baik. Dari beberapa dinas diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Temanggung bersama BPP Kecamatan Kranggan sudah menjalin koordinasi dengan dinas-dinas tersebut agar Program Kartu Tani dapat terimplementasikan dengan baik di Kabupaten Temanggung Khususnya Kecamatan Kranggan.

Hal tersebut berdasarkan wawancara Bapak Fajar Wardono selaku admin kartu tani kabupaten Temanggung sebagai berikut:

“Yang kita lakukan mulai dari sosialisasi tingkat kabupaten, Kecamatan, bahkan sampai Desa. Sosialisasi tidak berhenti diawal saja tapi terus menerus karena yang namanya edukasi ke petani itu tidak instan, kita juga meminta di setiap pertemuan kelompok tani pertemuan RT RW itu untuk disampaikan, selain itu kita juga melakukan pengawalan kartu tani, pendataan kartu tani sampai dengan terjadinya transaksi. Kalau petani sudah bisa bertransaksi, KPL juga sudah bisa bertransaksi baru kita mandirikan mereka. Kita juga berkoordinasi ke KEMENTAN, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Pemprov Jateng, Dinas sini, BPP, BRI, DESPERINDAG, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, kepalanya paksekda, jadi harus ada sinergitas disitu, kalau ada salah satu pihak yang tidak tenanan, nanti menyebabkan

yang lain repot. Misal penyuluh sudah tenanan tapi KPL tidak mau melayani sama saja transaksi tidak akan terjadi. Kita menyolidkan Internalnya, eksternalnya juga koordinasi, komunikasi dijaga”. (Wawancara 10 Februari 2020 pukul 07.30).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Mas Ikaf, Penyuluh Pertanian Kecamatan Kranggan sebagai berikut:

“Koordinasi antar yang berkepentingan, BRI, Petani, Dinas Pertanian. Penyuluh kecamatan Kranggan elakukan sosialisasi kepada petani bahwa pembelian pupuk itu harus menggunakan kartu tani”. (Wawancara 05 Februari 2020 pukul 08.00).

Dari Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Fragmentasi atau koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah dilaksanakan oleh Dintanpangan Kabupaten Temanggung dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan dengan baik.

4.3. Pembahasan

Teori implementasi kebijakan menurut pendapat George C. Edwards III dalam bukunya yang berjudul *Implementing Public Policy* yaitu:

“Policy implementation, as we have seen, is the stage of policymaking between the establishment of a policy – such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule – and the consequences of the policy for the people whom it affects” (Edwards III, 1980:01).

Berdasarkan pernyataan dari George C. Edwards III tentang implementasi kebijakan, maka dapat dikatakan bahwasanya implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan seperti bagian dari tindakan

legislatif, menerbitkan perintah eksekutif, penyerahan *down* keputusan peradilan, atau diterbitkannya suatu peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi orang-orang yang mempengaruhi.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010 :97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dengan begitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target groups*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

proses komunikasi yang disampaikan oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kepada aparatur serta pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat sudah terhubung dengan baik, dalam pelaksanaannya bahwa

komunikasi dalam kebijakan Program Kartu Tani tidak berbelit-belit dan bertele-tele.

Proses komunikasi terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsistensi)

a. Transmision (Penyampaian Informasi)

Dalam Transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan. Penyampaian informasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula, sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.

Transmisi pada implementasi kebijakan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan telah di sosialisasikan dengan baik kepada pihak-pihak yang terkait, mulai dari Dinas Pertanian ke Penyuluh, Penyuluh Sosialisasi ke Ketua Kelompok Tani, dan Ketua Gapoktan serta ke masyarakat secara langsung, begitupun dengan BRI selaku salah satu pihak yang berkepentingan dalam kebijakan Kartu ini juga melakukan sosialisasi ke beberapa pihak.

b. Clarity (Kejelasan)

Kebijakan yang di transmisikan kepada pelaksana kebijakan, Sasaran Kebijakan, dan pihak lain yang berkepentingan harus disampaikan dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan Program Kartu Tani tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta

dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakn tersebut secara efektif dan efisien.

kejelasan penyampain informasi mengenai Program Kartu Tani sudah diterima dengan di pahami dengan jelas oleh para pelaku kebijakan seperti Penyuluh Pertanian, Ketua Gapok Tani, Ketua Kelompok tani. Mereka sudah paham mengenai maksud, tujuan, manfaat serta sasaran Kartu Tani sedangkan Kejelasan atau kepahaman dari para Petani dan KPL hanya pada intinya saja, bahwa dalam pembelian pupuk petani harus menggunakan Kartu Tani. Ketidak jelasan tersebut disebabkan karena beberapa faktor yaitu SDM petani yang rendah, karena faktor umur, pendidikan rendah, kesadaran kurang, dll, kedua karena masih terdapat masyarakat yang belum tergabung kedalam kelompok tani dan juga ada beberapa Kelompok tani yang tidak aktif, sehingga jarang ada sosialisasi dari penyuluh, karena penyuluh dalam sosialisasi masih mengandalkan pertemuan kelompok karena keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Dan ketiga karena faktor kurang antusiasme dari masyarakat, ketika dalam forum ada beberapa petani yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan, mereka asyik mengobrol, merokok, bahkan mengantuk.

c. Consistency (Konsistensi)

Komunikasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan kebingungan bagi pelaksana kebijakan Program Kartu Tani dilapangan dalam menjalankan suatu kebijakan.

konsistensi penyampaian informasi yang di lakukan oleh Dinas Pertanian maupun Balai Penyuluhan Pertanian kepada petani sudah disampaikan dengan baik sesuai dengan pedoman Kartu Tani. Sasaran kebijakan dapat menerima dan paham apa yang disampaikan dan tidak membingungkan.

2. Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi Kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas Sumber daya manusia berkaitan dengan ketrampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya manusia di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan kabupaten Temanggung maupun di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan Sudah baik sesuai dengan keahlian dan pendidikannya, dari segi umur pun mereka masih muda . kendala dari Dintanpangan hanya pada waktu yang terbatas, juga penyuluh tidak hanya bertanggung jawab pada satu pekerjaan saja, sehingga pekerjaan yang dihasilkan kurang maksimal.

Kendala dalam Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan terkendala jumlah Penyuluh pertanian yang hanya 6 orang yang masing-masing ditugasi 2 sampai 3 desa yang terdiri dari 20 sampai 30 Kelompok Tani.

b. Sumber Daya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya “*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This in turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*”. Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa “*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*”. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Anggaran kartu Tani bersasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah. Anggaran yang diberikan Pemerintah ke Dinas Pertanian kurang dalam bentuk sarana dan prasarana, karena prasarana yang digunakan kebanyakan rusak karena proses penscanan dan pengapluad an

data yang banyak dalam waktu singkat. Sedangkan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan belum ada anggaran khusus yang diberikan untuk sosialisasi kedesadesa, sehingga untuk sosialisasi diberikan mengandalkan pertemuan rutin kelompok tani bulanan, itu berarti bagi kelompok tani yang tidak aktif akan jarang mendapatkan info/pengetahuan mengenai pertanian. Sedangkan dalam pembuatan kartu tani petani tidak dipungut biaya sepeserpun.

Anggaran pupuk untuk petani cukup meskipun Pemesanan sama penetapan alokasi pupuknya jauh lebih rendah karena kebanyakan lahan Kranggan ditanami Padi, Cabe, Jagung bukan sayuran sehingga tidak membutuhkan pupuk yang begitu banyak dibandingkan tanaman sayuran. Disamping itu juga masih banyak yang menggunakan pupuk organik.

c. Sumber Daya Peralatan

Menurut Edward III Sumber Daya peralatan merupakan sarana yang dipergunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi Tanah, Gedung, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan tidak mendapatkan peralatan khusus untuk pelaksanaan program kartu tani karena sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pengimplementasian kartu Tani sudah terdapat pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung maupun Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan, sarana dan prasarana tersebut berupa

seperti alat-alat untuk sosialisasi yaitu LCD, Proyektor, Laptop, Komputer, Printer, serta Scanan semua sudah terdapat di dinas tersebut.

Akan tetapi dari dinas pertanian terkendala sarana dan prasarana seperti scan, printer, komputer, laptop yang rusak/ eror karena proses Scan data yang ribuan jumlahnya, Kendala dari kios pupuk Lengkap yaitu alat EDC yang tergantung pada sinyal, kadang eror, kalau batrai habis misal lampu padam tidak dapat melakukan transaksi. Kendala dari masyarakat yaitu KPL yang jauh dari tempat tinggal karena ketiganya berada di kelurahan Kranggan, sehingga bagi petani wilayah perbatasan yang dekat dengan KPL kecamatan lain memilih membeli di KPL yang dekat, meskipun sudah ada solusinya, tetapi petani masih berharap KPL lebih dekat dengan masyarakat .

d. Sumber Daya Kewenangan

Menurut Edward III Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenagannya.

Pelaksanaan Program Kartu Tani ini berdasarkan Kesepakatan antara Gubernur Jawa Tengah dan Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B. 112-DIR/KPM/0/2015, Tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran

pupuk bersubsidi bagi petani Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang berwenang dalam Kebijakan Program Kartu Tani yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah sampai dengan ke dinas-dinas pertanian se Jawa Tengah termasuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beserta Balai Penyuluhan Pertanian mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, sedangkan dalam memecahkan masalah dilakukan dengan berjenjang sesuai dengan struktur organisasai serta wewenangnya masing-masing.

3. Disposisi/ Agen Pelaksana

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa: jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2008:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi, dan insentif.

a. Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Dalam pengangkatan petugas pelaksana Implementasi Program kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah sesuai dengan keahlian/ketrampilan yang dimilikinya, serta latar belakang pendidikan yang sesuai pada bidangnya. Untuk mengasah ketrampilannya dari pihak Dinas Pertanian Provinsi maupun kabupaten sering mengadakan Pelatihan-pelatihan, workshop, juga terdapat rapat koordinasi antara pelaksana program.

b. Insentif

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Untuk mendorong pegawai dalam pelaksanaan implementasi program kartu tani, terdapat Insentif yang diberikan oleh pemerintah

Provinsi kepada Dinas pertanian Temanggung, dikarenakan Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung telah berhasil mencapai target yaitu menjadi Kabupaten yang penerapan implementasi Kartu Taninya terbaik sejawa tengah. Untuk Kecamatan Kranggan sendiri belum dapat mencapai target karena kranggan implementasi program kartu tani masih berada pada tingkatan nomor dua dari bawah. Sehingga kecamatan kranggan belum mendapatkan insentif, yang dapat dari kecamatan Ngadirjo dan kedu karena merupakan kecamatan dengan penerapan kartu tani terbaik di temanggung. Dalam unit KPL (Kios pupuk lengkap) sendiri terdapat reaward dari pihak BRI, apabila jumlah transaksi pembelian pupuk bersubsidi terbanyak menggunakan kartu tani.

4. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya. Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi".

a. *Standard Operational Procedures* (SOP)

birokrasi sebagai pelaksana kebijakan memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan Progam Kartu Tani, salah satu aspek yang penting adalah *Standard Operational Procedures* (SOP). SOP adalah suatu standart atau pedoman yang tertulis yang digunakan untuk mendorong pelaksanaan Progam kartu Tani itu dapat mencapai tujuan.

Implementasi penggunaan Kartu Tani sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yaitu dalam hal pendataan dan verifikasi data sudah berjalan sesuai dengan Juklak, dalam hal penerbitan kartu tani juga sudah sesuai dengan Juklak, tetapi pengimplementasiannya tidak se ribet dalam aturan, karena petani hanya mengumpulkan SPT dan Foto kopi KTP, serta nama ibu kandung dikumpulkan ke ketua kelompok tani, kemudian ketua kelompok tani mengumpulkan ke penyuluh, nanti penyuluh yang mengurus selanjutnya termasuk ke Bank, dari Bank menyerahkan Kartu Tani ke perwakilan tian ketua kelompok tani. Kemudian dalam pembelian pupuk juga sudah sesuai Juklak, hanya saja dimudahkan dengan dapat membayar Kes ke penjual pupuk langsung tanpa mengisi saldo, dan yang terahir mengenai penjualan hasil panen ke Bulog belum terimplementasikan di Kecamatan Kranggan, bahkan masih banyak banyak yang belum paham atau mengetahui hal tersebut.

b. Fragmentasi

fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi” Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa: struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”.

Di dalam Program Kartu Tani ada beberapa pihak yang terlibat dalam Program Kartu Tani tersebut diantaranya yaitu, Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, BRI, Desperindag, Dinas Pertanian Kabupaten, BPP, Komisi pengawas pupuk dan Pestisida, KPL, Gappok Tani, Kelompok Tani, hingga sampai dengan Petani itu sendiri. Pihak-pihak tersebut saling berkomunikasi, satu sinergitas, satu Visi yang sama yaitu Kartu Tani harus terlaksana dengan baik. Dari beberapa dinas diatas, Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kabupaten Temanggung bersama BPP Kecamatan Kranggan sudah menjalin koordinasi dengan dinas-dinas tersebut agar Program Kartu Tani dapat terimplementasikan dengan baik di Kabupaten Temanggung Khususnya Kecamatan Kranggan.

Pelaksanaan Program Kartu Tani di Kecamatan Kranggan berdasarkan tujuan Kartu Tani yaitu Pendistribusian, pengendalian dan pengawasan pupuk bersubsidi sesuai dengan Asas 6 Tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga) sudah cukup baik dalam pencapaian tujuannya.

1. Tepat Jumlah

Pupuk bersubsidi yang di berikan Pemerintah kepada petani Kecamatan Kranggan pemberian jumlahnya sudah tepat berdasarkan luas tanah yang dimiliki, jika ada yang kekurangan itu disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat waktu mengumpulkan SPPT sebagai persyaratan pengajuan pupuk bersubsidi, SPPT yang dikumpulkan tidak semua SPPT yang dimiliki, akhirnya pupuk yang didapat sesuai lahan yang diajukan.

2. Tepat Jenis

Jenis Pupuk bersubsidi yang di berikan pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan pupuk disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan di tanam. Jika ada yang kelebihan atau kekurangan jenis pupuk tertentu, itu biasya karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pupuk. Misalnya dapat pupuk urea sama ponska, tetapi yang digunakan hanya ureanya saja padahal tanaman sebenarnya butuh dua-duanya.

3. Tepat Waktu

Dengan adanya Kartu Tani, masyarakat Kecamatan Kranggan tidak kesulitan lagi mendapatkan pupuk bersubsidi, pupuk setiap tahun turun dua kali, petani tidak perlu takut kehabisan pupuk karena kios pupuk di kecamatan kranggan mewajibkan penggunaan kartu tani di setiap transaksi pembelian pupuk bersubsidi.

4. Tepat Tempat

Dalam hal tempat Pembelian pupuk di KPL belum tepat karena KPL hanya ada tiga, yang ketiganya semua berada di Kecamatan Kranggan, sehingga bagi petani yang di wilayah perbatasan masih merasa kejauhan.

5. Tepat Mutu

Mutu Pupuk Bersubsidi yang diberikan kepada petani, mutunya baik hampir sama dengan Pupuk yang Non subsidi yang harganya jauh lebih mahal bandingannya 1 banding 3.

6. Tepat Harga

Harga Pupuk bersubsidi sangat bisa dijangkau oleh para petani Kecamatan Kranggan, karena perbandingan Harganya sangan Tinggi yaitu 1 banding 3.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan Implementasi kebijakan Program Kartu Tani berdasarkan kesepakatan bersama antara Gubernur Jawa Tengah dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor 004/2015, Nomor B.122-DIR/KPM/03/2015 tanggal 4 Maret 2015, tentang Kartu Tani sebagai alat penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Jawa Tengah. yang telah dilaksanakan oleh instansi penyelenggara yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpangan) Kabupaten Temanggung dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Kranggan telah diimplementasikan sesuai dengan teori Edward III dengan menggunakan empat variabel, meliputi Variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Meski dalam pelaksanaan ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya, maka disimpulkan dengan hal-hal berikut :

a. Komunikasi

proses Sosialisasi yang dilakukan oleh pelaksana Dintanpangan dan BPP mengenai kejelasan penyampaian informasi Program Kartu Tani sudah diterima dan di pahami dengan jelas oleh para pelaksana kebijakan seperti Penyuluh Pertanian, Ketua Gapok Tani, Ketua Kelompok tani, sedangkan kejelasan atau kephahaman pada tingkat Petani dan KPL hanya pada intinya saja, yaitu bahwa pembelian pupuk harus menggunakan Kartu Tani, hal ini

dikarenakan karena kurang antusiasme dari masyarakat,SDM petani yang rendah, dan masih banyak kelompok tani yang tidak aktif. konsistensi penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan maupun kepada sasaran kebijakan sudah disampaikan dengan baik sesuai dengan pedoman Kartu Tani.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia di Dintanpangan dan BPP Sudah sesuai dengan keahlian dan latar belakang pendidikan, tetapi dalam hal kuantitas atau jumlah pegawai Penyuluh masih kurang. Dalam hal sumber daya anggaran sebenarnya sudah cukup, hanya saja kurang dalam bentuk ganti rugi sarana dan prasarana yang rusak akibat proses scan yang banyak. Kendala Peralatan dari pihak kios pupuk Lengkap (KPL) yaitu alat EDC yang tergantung pada sinyal, kadang eror, kalau baterai habis misal lampu padam tidak dapat digunakan transaksi. Kendala dari masyarakat yaitu KPL yang jauh dari tempat tinggal karena ketiganya berada di kelurahan Kranggan. Dalam melaksanakan tugasnya Dintanpangan dan BPP mempunyai wewenang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya, sedangkan dalam memecahkan masalah dilakukan dengan berjenjang sesuai dengan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

c. Disposisi

Dalam pengangkatan petugas pelaksana Implementasi Program kartu Tani di Kecamatan Kranggan sudah sesuai dengan keahlian/ ketrampilan serta latar belakang pendidikan yang sesuai pada bidangnya, serta ada pelatihan-pelatihan untuk menunjang ketrampilan. Insentif diberikan jika sudah memenuhi target yang ditetapkan. Struktur birokrasi telah berjalan sesuai dengan petunjuk

pelaksanaan Kartu Tani, tetapi dalam pelaksanaannya dimudahkan tidak diribetkan. Penjualan hasil panen ke Bulog belum terimplementasikan di Kecamatan Kranggan, bahkan belum banyak yang paham mengenai hal tersebut.

5.2.Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai pertanian khususnya kartu Tani, Penyuluh diharapkan tetap melakukan pendampingan serta sosialisasi terhadap kelompok-kelompok yang tidak aktif meskipun tidak ada pertemuan kelompok, dengan anggaran dari pemerintah.
2. Untuk menghindari masyarakat membeli pupuk di kecamatan lain, Dinas perlu membantu mengajukan ke distributor mengenai perpindahan kios pupuk lengkap (KPL) yang lebih dekat dengan masyarakat yang menjadi sasaran penjualannya.
3. Perihal kerusakan pada sarana dan prasarana, bisa dengan mengajukan penambahan sarana dan prasarana ke pemerintah pusat, agar proses pelaksanaan kartu Tani dan kegiatan yang lain tidak terhambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung Pustaka Setia.
- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ghony, M.D. dan Almanshur, F. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: PustakaSetia
- Islamy, M. Irfan. 2001. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: UniversitasTerbuka.
- Lexy, J Moleong. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik :Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refrika Aditama
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &* Bandung: Elfabet.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta: Bandung.
- Tachjan. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan publik*. Yogyakarta: Media Pressindo {Anggota IKAPI}.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal Penelitian:

Astuti, Rini Septiani. 2017. Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar dalam upaya pemerataan pendidikan tahun ajaran 2015/2016 di SMP N 1 Semen. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.

Moko, Koko Widyat, Suwanto, dan Bekti Wahyu Utami. 2017. Perbedaan Persepsi Petani Terhadap Program Kartu Tani di Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. *Jurnal of Sustainable Agriculture*. Universitas Sebelas Maret.

Indah Nur Lathifah, Agus Suryono, Minto Hadi. Implementasi Progam Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan menggunakan Kartu Jakarta Sehat (Studi pada RSAB Harapan Kita dan RS Zahirah DKI Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik*.

Ni Ketut Sriwinarti, Andres Faesal. 2016. Implementasi Penggunaan Kartu Petani: Sebagai Media Pengendali Pupuk Bersubsidi. *Politeknik Negri Malang*.

Rauf, Abdul Rahman. 2016. Implementasi kebijakan penerapan kartu tandapenduduk elektronik ada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Mamuju Utara.

Dari internet:

<https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/programkegiatan/kartu-tani/>. Diakses pada tanggal 12 november 2019.

<https://harga.web.id/harga-pupuk-subsidi-non-subsidi-dan-organik.info>. Diakses pada tanggal 20 desember 2019.

(<https://m.liputan6.com/regional/read/4058677/balada-kartu-tani-purbalingga>). Diakses pada tanggal 26 desember 2019.

<https://www.google.com/amp/amp.wartaekonomi.co.id/berita17824/alih-alih-mempermudah-kartu-tani-malah-menyengsarakan-petani.html>. Diakses pada tanggal 26 desember 2019.

(<http://www.kemenprin.go.id> . Diakses 12 februari 2018

https://www.Krjogja.Com/Web/News/Read/118881/Kelangkaan_Terjadi_Petani_Temanggung_Kesulitan_Dapatkan_Pupuk). Diakses Pada Tanggal 5 Januari 2020



LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

No	Aspek	Sub Aspek	Pertanyaan	Informan
1	Komunikasi	Transmisi	Apa saja yang dilakukan pihak dinas pertanian temanggung untuk menjalin komunikasi dengan staf pengelola progam kartu tani, Bank BRI di kecamatan dan kepada para petani ataupun penjual pupuk guna mencapai keberhasilan implementasi program kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP
			Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Petani, Penjual Pupuk
			Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP, Petani
			Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Dinas Pertanian, BPP, Petani
		Kejelasan	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP, Petani, Penjual Pupuk
			Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP
			Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP, Petani, Penjual Pupuk
			Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP, Petani, Penjual Pupuk,
			Konsistensi	Bagaimana pemahan anda mengenai Kebijakan Kartu Tani?
		Setelah adanya kartu tani, apakah peraturan pembelian pupuk sampai sekarang tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang seharusnya?		Petani, Penjual Pupuk
		Apakah sejak dikeluarkan program kartu tani sampai sekarang, ketika		Petani, Penjual Pupuk

			petani akan membeli pupuk masih menggunakan kartu tani?	
			Apakah kartu tani digunakan petani untuk menabung di bank ? sekitar berapa persen petani yang menggunakan kartu tani untuk menabung?	Petani
2	Sumber Daya	Sumberda ya Manusia	Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP
			Adakah staf khusus yang menangani Program Kartu Tani tersebut?	Dinas Pertanian
			Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Dinas pertanian, BPP, Petani
			Adakah Kendala SDM dalam memberikan pelayanan terhadap Pemegang kartu tani?	Dinas pertanian, BPP
		Sumber Daya Anggaran	Berasal dari manakah anggaran dana untuk melaksanakan program kartu tani?	Dinas pertanian, BPP
			Apakah anggaran yang diberikan sudah cukup sesuai yang di butuhkan?	Dinas Pertanian, BPP
			Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Dinas pertanian, BPP, Petani
		Sumber Daya Peralatan	Adakah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dari dinas setempat? Seperti apakah bentuk sarana dan prasarana tersebut? Apakah fasilitas yang di sediakan sudah cukup mendukung?	Dinas Pertanian, BPP. Penjual Pupuk
			Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	BPP, Petani, Penjual Pupuk
			Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Petani, Penjual Pupuk
		Sumber daya Kewenang an	Apakah dasar hukum yang mengatur kebijakan kartu tani?	Dinas pertanian, BPP
			Siapa yang berwenang terhadap program kartu tani ini?	Dinas pertanian, BPP
			Apabila terdapat permasalahan mengenai kartu tani di Kecamatan	Dinas Pertanian, BPP

			Kranggan apakah anda memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah?	
3	Disposisi /agen pelaksana	Pengangkatan birokrasi	Apakah pegawai yang bertugas menangani kartu tani harus mempunyai keahlian/ketrampilan khusus untuk menjadi Staf Pengelola kartu Tani?	Dinas Pertanian, BPP,
		Insentif	Apakah insentif selalu diberikan kepada anggota yang terkait dengan program kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP
			Adakah insentif yang diberikan kepada Pemilik kios jika melayani pembelian pupuk bersubsidi jika sesuai dengan prosedur?	Dinas Pertanian, BPP, Penjual Pupuk
4	Struktur Birokrasi	SOP (<i>Standart Operational System</i>)	Dalam melaksanakan program kartu tani apakah sudah sesuai dengan SOP? Kalau sudah SOP nya seperti apa?	Dinas Pertanian, BPP
			Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Dinas Pertanian, BPP, Petani
			Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Dinas Pertanian, BPP, Petani, Penjual Pupuk
			Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Petani
			Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Petani, Penjual Pupuk
			Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Petani
			Apakah ada kendala dalam penjualan pupuk menggunakan kartu tani?	Penjual Pupuk
			Bagaimana Permasalahan Kartu Tani di Kraangan?	Dinas Pertanian, BPP, Petani
			Bagaimana harapan anda untuk kedepannya?	
		Fragmentasi	Apakah perlu adanya kerjasama dengan lembaga lain berkaitan dengan kartu tani?	Dinas pertanian, BPP
Bagaimana proses kerjasama antar Bank BRI dengan Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung terkait dengan kartu Tani?	Dinas Pertanian,			

			Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Dinas Pertanian, BPP, Petani, Penjual Pupuk
			Apakah ada Koordinasi antara dinas Pertanian, Staf Pengelola, Bank BRI, dan pemilik Kios Pupuk? Seberapa sering?	Dinas Pertanian, BPP, Penjual Pupuk



TRANSKIP WAWANCARA

1. Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Februari 2020

Waktu : 07.30

Lokasi : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten

Temanggung

Nama Narasumber : Fajar Wardono, SP (Penyuluh Pertanian Kabupaten

Temanggung)

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja yang dilakukan pihak dinas pertanian temanggung untuk menjalin komunikasi dengan staf pengelola progam kartu tani, Bank BRI di kecamatan dan kepada para petani ataupun penjual pupuk guna mencapai keberhasilan implementasi program kartu tani?	Yang kita lakukan mulai dari sosialisasi tingkat kabupaten, Kecamatan, bahkan sampai Desa. Sosialisasi tidak terhenti diawal saja tapi terus menerus karena yang namanya edukasi ke petani itu tidak instan, kita juga meminta di setiap pertemuan kelompok tani pertemuan RT RW itu untuk disampaikan, selain itu kita juga melakukan pengawalan kartu tani, pendataan kartu tani sampai dengan terjadinya transaksi. Kalau petani sudah bisa bertransaksi, KPL juga sudah bisa bertransaksi baru kita mandirikan mereka. Kita juga berkoordinasi ke KEMENTAN, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi, Pemprov Jateng, Dinas sini, BPP, BRI, DESPERINDAG, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, kepalanya paksekda, jadi harus ada sinergitas disitu, kalau ada salah satu pihak yang tidak tenanan, nanti menyebabkan yang lain repot. Misal penyuluh sudah tenanan tapi KPL tidak mau melayani sama saja transaksi tidak akan terjadi. Kita menyolidkan Internalnya, eksternalnya juga koordinasi, komunikasi dijaga.
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu	Yang di kartu tani kan ada aduan-aduan atau ke Lapor Gub, kalau petani juga bisa

	tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	langsung tanya ke BPP, yang datang langsung kesini juga kita layani
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	BRI juga melakukan edukasi, tapi lebih ke penggunaan kartu perbankan secara umum, dan sosialisasi mengenai kartu geseknya, Cuma kendala di BRI itu personilnya gonta ganti atau rolling, jadi pemahaman mereka tentang kartu tani pemahaman tentang kartu tani kurang
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? Dan apa yang melatarbelakangi kartu tani?	Kartu tani itu seperti kartu debit biasa atau kartu ETM yang bisa digunakan untuk transaksi perbankan biasa, tapi kelebihanannya bisa dibuat untuk menebus pupuk bersubsidi, untuk mengecek harga pupuk, untuk mengetahui sisa kuota yang tersedia. Latar belakangnya untuk menjaga keetersediaan pupuk, menjaga 6 tepat waktu jumlah dan seterusnya, untuk menghindari penyalahgunaan, ada data base petani yang dapat kita gunakan untuk merencanakan pembangunan, kita bisa tahu lahan berapa, komoditas apa, garapannya apa, ada fungsi pendataan untuk mendapatkan data yang lebih valid
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Pertama data base, data petani lebih real, kedua penebusan pupuk bersubsidi tidak ada perembesan, penyalahgunaan
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Untuk menabung bisa, banyak petani yang sudah menggunakan kartu tani untuk transaksi perbankan, untuk penjualan ke Bulog atau ke Rego Pantes, sistem jual beli online yang memotong rantai seperti Bulog, jadi harga jualnya lebih tinggi ke konsumen akhirnya juga harganya tidak terlalu tinggi bagi yang membeli, tapi disitu ada syarat-syaratnya nanti disurvei kontinewitas, kualitas dll, jadi di temanggung masih jarang yang memakai itu hangya baru ada di kaloran.
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Sudah, karena sosialisasi itu dilakukan tidak hanya di awal saja tetapi secara terus-menerus, setiap pertemuan kelompok itu kita edukasi petani

8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Kalau kita iyaa, tapi kalau yang ditangkep masyarakat bisa beda, ada yang paham ada yang enggak tergantung SDM nya
9	Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan program kartu tani?	Pemprov Jateng, Dinas Pertanian Provinsi, Kemetrian Pertanian, masing-masing mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Desperindag, yang mengurus/membina KPL
10	Adakah staf khusus yang menangani Program Kartu Tani tersebut?	Ada tapi itu tugs sampingan, seperti saya itu penyuluh, tapi ditugasi sampingan sebagai Admin kartu tani kabupaten. Artiya ada tapi buukan mengurus kartu tani saja tapi punya tupoksi dan tugas yang lain sesuai dengan jabatan
11	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Pak kepala dinas, pejabat struktural dan fungsional dan yang lainnya itu mendukung dan merasa bagian dari program, jadi tetep ikut sosialisasi juga
12	Adakah Kendala SDM dalam memberikan pelayanan terhadap Pemegang kartu tani?	Kalau Kendala SDM gini mbak, awal kartu tani itu kan hal yang baru, tapi kita dituntut untuk segera, yang namanya untuk bisa keluar kuotanya kan melalui tahap-tahap sosialisasi, nyusun RDKK, menginput RDKK kedalam sistem itu yang memerlukan waktu, padahal kita dibatasi waktu, ada ratusan ribu padahal, pada waktu itu kan pengapludan satu provinsi bersamaan jadi sistemnya itu lola, kita tu aplud-aplud data diatas jam 10/11 malam untuk mencari waktu-waktu yang bisa lancar
13	Berasal dari manakah anggaran dana untuk melaksanakan program kartu tani?	Anggaran dari Provinsi Jawa Tengah
14	Apakah anggaran yang diberikan sudah cukup sesuai yang di butuhkan?	Anggaran bisa dikatakan antara cukup dan tidak cukup, karena kita perlu sarana dan prasana, karena pada waktu aplud data karena yang di aplud itu ribuan maka banyak printer yang jebol, komputer, laptop juga banyak yang rusak

15	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Tidak mbak, petani tidak dipungut biaya apapun Gratis
16	Adakah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dari dinas setempat? Seperti apakah bentuk sarana dan prasarana tersebut? Apakah fasilitas yang di sediakan sudah cukup mendukung? Adakah kendala yang dihadapi?	Fasilitas kalau untuk dinas tidak ada, tapi malah sarana dan prasarana seperti scan printer laptop komputer pada jebol dan rusak ada yang eror karena penekanan yang ribuan itu
17	Apakah dasar hukum yang mengatur kebijakan kartu tani?	Kesepakatan antar gubernur Jawa Tengah dan bank BRI mengenai alat penebusan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani
18	Siapa yang berwenang terhadap program kartu tani ini?	Yang berwenang ya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, Dinas Pertanian Provinsi sampai ke kita Dinaas Pertanian Temanggung
19	Apabila terdapat permasalahan mengenai kartu tani di Kecamatan Kranggan apakah anda memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah?	Yaa berjenjang mbak, kalau kelompok bisa menyelesaikan yaa kelompok, kalau tidak bisa naik ke desa, kalau desa gak bisa naik ke kecamatan, kecamatan ke kabupaten
20	Apakah pegawai yang bertugas menangani kartu tani mempunyai keahlian/ketrampilan khusus untuk menjadi Staf Pengelola kartu Tani?	Sudah mbak, mereka mempunyai keahlian khusus, misal penyuluh sudah mempunyai keahlian untuk berbicara di depan umum selain itu juga harus mempunyai pengetahuan dalam bidang Pertanian
21	Apakah insentif selalu diberikan kepada anggota yang terkait dengan program kartu tani?	Sini dinas pertanian temanggung juga kemarin dapat terus dari Dinas Provinsi karena temanggung kan tingkat terbaik no 1 se Jawa Tengah bahkan Indonesia, kalau kecamatan yang dapat itu kemarin daerah Ngadirjo, dan Kedu, tapi karena Kranggan itu terjelek ya tidak dapat reward.
22	Adakah insentif yang diberikan kepada Pemilik kios jika melayani pembelian pupuk bersubsidi jika sesuai dengan prosedur?	Kalau KPL kemarin ada yang dapat dari BRI, dengan KPL yang transaksinya paling banyak.

23	Dalam melaksanakan program kartu tani apakah sudah sesuai dengan SOP? Kalau sudah SOP nya seperti apa?	Iyaa, ada petunjuk pelaksanaan atau juknis nya. Dan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada.
24	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Petani mengumpulkan SPPT, dan Foto kopy KTP kemudian dikumpulkan ke penyuluh untuk dimasukkan data RDKK dan di aplud Bri mencentak kartu dan dibagikan ke petani
25	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Petani tinggal membawa kartu Tani ke KPL lalu kartu di Gesekoleh KPL nanti muncul Kuota petani dapat membeli sesuai dengan kuota yang tersedia
26	Apakah permasalahan yang ada di kecamatan Kranggan dan bagaimana solusi atau pemecahan masalahnya?	Pertama masalah komunikasi, kan syarat kartu tani foto copy KTP, SPPT, banyak petani yang khawatir kalau mengumpulkan SPPT banyak nanti Pajak nya akan mundak dan sebagainya , akibatnya tidak dikumpulkan semua, akhirnya kuota yang keluar tidak sesuai dengan lahan yang dimiliki
27	Apakah perlu adanya kerjasama dengan lembaga lain berkaitan dengan kartu tani?	Temanggung ada kerjasama quality Project dari Kementrian Pertanian, di lima kecamatan Gemawang, Ngadirjo, Kledung, Kedu, Selopampang itu murni kalau tidak pakai kartu tani tidak bisa membeli pupuk bersubsidi
28	Bagaimana proses kerjasama antar Bank BRI dengan Dinas Pertanian Kabupaten Temanggung terkait dengan kartu Tani?	Yang kerja sama dengan BRI itu Pemprov Jateng bukan kita, kita hanya user saja, kerja sama mulai dari sistemnya, pembuatan kartu taninya, distribusinya
30	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa mendukung, kalau tidak mendukungyaa Temanggung tidak jadi yang terbaik Sejava Tengah
31	Bagaimana harapan anda mengenai kartu tani kedepan?	Harapan saya supaya Kartu Tani penerapan di Temanggung semakin depan semakin baik lagi sehingga dapat menjadi percontohan bagi kabupaten lain.

2. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Februari 2020

Waktu : 08.00

Lokasi : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan

Nama Narasumber : Muhamad Ikaf Husnihuda

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja yang dilakukan pihak dinas pertanian temanggung untuk menjalin komunikasi dengan staf pengelola progam kartu tani, Bank BRI di kecamatan dan kepada para petani ataupun penjual pupuk guna mencapai keberhasilan implementasi program kartu tani?	Koordinasi antar yang berkepentingan, BRI, Petani, Dinas Pertanian. Penyuluhh kecamatan Kranggan elakukan sosialisasi kepada petani bahwa pembelian pupuk itu harus menggunakan kartu tani
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Kartu tani itu ada 3 aspek, pertama kartu tani di keluarkan oleh BRI, belum paham nya dimana? Misal petani belum paham cara menggunakan kartu taninya oh itu berarti ranahnya BRI untuk menjelaskan, kemudian misal belum jelasnya ke kuota pupuk itu tanya nya ke kita penyuluh
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Kalau dari pihak BRI itu biasanya ke tingkat kecamatan Ke KTMA, Forum Komunikasi KWT, Gapok Tan, Ketua kelompok, tapi untuk sampai ke titik rumput atau kedesa-desa itu kebanyakan temen-temen penyuluh
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? Dan apa yang melatarbelakangi kartu tani?	Kartu tani itu upaya pemerintah untuk mengamankan pupuk bersubsidi dari yang bukan sasarannya, disini ada petani yang harusnya mendapatkan pupuk, tetapi oleh KPL kadang pupuk tidak dijual kepetani yang bersangkutan, sehingga dengan kartu tani ini by name by adress sampai benar-benar keyang membutuhkan. Yang kedua petani manfaat nya sebagai

		edukasi ke Petani karena dengan Kartu Tani petani akan dekat dengan perbankan, Petani juga bisa memahami kebutuhan pupuk sesuai dengan luas Lahan.yang paling penting itu bahwa 26 sekian T itu akan tepat sasaran
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	ntuk mengamankan pupuk bersubsidi dari yang bukan sasarannya, disini ada petani yang harusnya mendapatkan pupuk, tetapi oleh KPL kadang pupuk tidak dijual kepetani yang bersangkutan, sehingga dengan kartu tani ini by name by adress sampai benar-benar keyang membutuhkan. Yang kedua petani manfaat nya sebagai edukasi ke Petani karena dengan Kartu Tani petani akan dekat dengan perbankan, Petani juga bisa memahami kebutuhan pupuk sesuai dengan luas 6Lahan.yang paling penting itu bahwa 26 sekian T itu akan tepat sasaran
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	sebagai edukasi ke Petani karena dengan Kartu Tani petani akan dekat dengan perbankan, Petani juga bisa memahami kebutuhan pupuk sesuai dengan luas Lahan.yang paling penting itu bahwa 26 sekian T itu akan tepat sasaran
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Pelaksana Kartu Tani dari Dinas Penyuluh Ketua Gapok Tani, Ketua Kelompok Tani itu sudah jelas semua tinggal Petaninya itu memang dari 118 kelompok tani di kecamatan Kranggannya saja ada 5000 lebih petani yang masing-masing beda cara menangkap informasinya
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Sama mbak, kita sudah satu suara satu visi bahwa kartu tani itu harus sukses di kabupaten Temanggung terbukti bahwa dengan Temanggung meraih juara 1 se Provinsi Jawa Tengah
9	Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan Program Kartu Tani?	Semua stakeholder pemerintahan di kabupaten Temanggung semua berperan. Dari desperindag itu

		berperan dalam bidang perdagangan pupuk, kemudian dinas pertanian selaku penentu pupuknya juga sangat berperan. Bahkan wewenang sekarang bukan hanya dari Kementerian Pertanian, sampai menteri dalam negeri pun mewajibkan penggunaan kartu tani untuk wilayah yang sudah ada kartu tani
10	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Punya jadi semua sudah ada tupoksiya masing-masing, seperti penyuluh itu mendampingi petani menyusun RDKK, diarahkan bahwa pupuk dengan jenis pupuk A B C untuk tanaman ini sekian, admin kartu tani tingkat kecamatan sudah sesuai posnya, admin mengerjakan sistem aplikasinya dari Krtu tani baik itu SINPI, ERDCK dari kementerian itu admin, itu sudah berjalan sesuai dengan tugas masing-masing. Ada Rapat Koordinasi antara teman-teman penyuluh sekabupaten tiap bulan, ada pelatihan workshop RDKK juga ada.
11	Adakah Kendala SDM dalam memberikan pelayanan terhadap Pemegang kartu tani?	Untuk di kecamatan Kranggan Komposisinya bagus masih cukup muda-muda belum mendekati pensiun, dan memiliki keahlian dalam bidang IT untuk pengapludan RDKK ke sistem. Kendalanya Penyuluh hanya terdapat 6 orang yang mengurus 13 desa yang terdiri dari 118 kelompok tani, jadi penyuluh itu kuwalahan.
12	Berasal dari manakah anggaran dana untuk melaksanakan program kartu tani?	Anggaran itu awalnya di keluarkan oleh Pemerintah Provinsi, kemudian ERDCK sekarang itu sudah di handle oleh pusat, artinya pusat dan daerah itu mengeluarkan
13	Apakah anggaran yang diberikan sudah cukup sesuai yang di butuhkan?	Kalau ditanya cukup yaa belum, karena kita sosialisasi sampai ditingkat masyarakat itu kan dompleng lewat pertemuan-pertemuan Kelompok, tidak ada anggaran khusus untuk sosialisasi tingkat desa secara rutin. Di situ kita menyampaikan program-program dari pemerintah. Tetapi tiap

		melakukan sosialisasi nanti cuma ada uang jalan
14	Bagaimana Sistem Penebusan pupuk dari KPL kedistributor?	sistem Penebusan Pupuk nya pertama KPL menghubungi distributor untuk memesannya pupuk, itu disesuaikan daya tampung Kios, atau jumlah pupuk yang akan di belinya disesuaikan sesuai dengan kira-kira habis berapa atau laku berapa, jika pupuk sudah sampai di KPL maka itu menjadi tanggungan KPL karena telah dibayar KPL. Untuk pupuk yang tidak ketebus di distributor maka akan ada realokasi kecamatan lain yang masih kurun jatah pupuknya, Kecamatan dalam lingkup Kabupaten, baru jika Kabupaten masih ada sisa pupuk yang belum ketebus baru realokasi ke kabupaten lain.
15	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Oh tidak mbk, tidak ada sama sekali di pungut biaya
16	Adakah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dari dinas setempat? Seperti apakah bentuk sarana dan prasarana tersebut? Apakah fasilitas yang di sediakan sudah cukup mendukung?	Kalau fasilitas untuk kartu tani itu ridak ada, tapi kalau fasilitas penyuluhan dari dinas ada seperti Komputer, LCD Sound, lembar-lembar leaf itu ada
17	Apakah dasar hukum yang mengatur kebijakan kartu tani?	Ada peraturan pemerintah Provinsi, da peraturan Gubernur tapi saya tidak hafal, edaran dari pemerintah juga ada
18	Siapa yang berwenang terhadap program kartu tani ini?	Pemerintah pusat, Pemerintah Derah, Pemerintah Kabupaten
19	Apabila terdapat permasalahan mengenai kartu tani di Kecamatan Kranggan apakah anda memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah?	Tergantung permasalahannya, kalau permasalahannya seperti kartu eror maka tugas kita menjebatani antar petani dan BRI misal, atau permasalahan mesin EDC nya Rusak maka kita menjembatani antara pemilik kios dengan BRI, kita tidak memutuskan tapi menjembatani menyarikan solusi
20	Apakah pegawai yang bertugas menangani kartu tani mempunyai keahlian/ketrampilan khusus	Disini untuk pengelola kartu tani itu ada admin, maka yang dibutuhkan itu memahami komputer, IT, kalau

	untuk menjadi Staf Pengelola kartu Tani?	penyuluh harus memahami fungsi kartu tani
21	Apakah insentif selalu diberikan kepada anggota yang terkait dengan program kartu tani?	Kalau ke admin kartu tani ke kabupaten itu ada karena itu tugas tambahan, kalau ke penyuluh tiap ada tugas baru atau rapat nanti ada uang tambahan
22	Adakah insentif yang diberikan kepada Pemilik kios jika melayani pembelian pupuk bersubsidi jika sesuai dengan prosedur?	Tidak ada kalau dari pemerintah, mungkin kalau dari BRI ada
23	Apakah sudah cukup pupuk yang diberikan ke petani?	Sudah cukup, meskipun jatah pupuknya tiap tahun berkurang, tapi karena kita komitmen untuk penerapakan pupuk organik Saya kira jatah pupuk itu cukup. Kalau ada jatah yang masih kurang dari jumlah pupuk yang dibutuhkan karena SDM petani yang masih rendah, jadi penerimaan informasi yang disampaikan itu kurang harusnya SPPT yang dikumpulkan semua tapi yang dikumpulkan cuma 1 maka pupuk yang didapatkan juga akan lebih sedikit tidak sesuai yang dibutuhkan. Selain itu masih banyak petani yang menggunakan pupuk secara berlebihan.
24	Dalam melaksanakan program kartu tani apakah sudah sesuai dengan SOP? Kalau sudah SOP nya seperti apa?	Sudah sesuai, SOP nya mulai dari akhir tahun petani mengajukan pupuk melalui RDKK didampingi temen-temen penyuluh kemudian kita verifikasi lalu kita ajukan ke sistem ERDKK di Kementerian Pertanian, kemudian dari pihak BRI mengambil data di RDKK untuk dimasukkan ke kartu tani, kemudian petani membeli pupuk sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kuota
25	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Sudah mbak, SOP nya mulai dari akhir tahun petani mengajukan pupuk melalui RDKK didampingi temen-temen penyuluh kemudian kita verifikasi lalu kita ajukan ke sistem ERDKK di Kementerian Pertanian, kemudian dari pihak BRI mengambil data di RDKK untuk dimasukkan ke kartu tani, kemudian petani membeli

		pupuk sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kuota
26	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Jadi KPL itu memiliki wilayah penjualan, di Kranggan itu memiliki wilayah masing-masing. Misal inasa Tani itu memegang wilayah Kramat, Kemloko, kemudian Pendowo, Sraggahan. Itu petani-petani di 4 desa itu harus membeli pupuk di inasa Tani karena datanya sudah disitu
27	Apakah permasalahan yang ada di kecamatan Kranggan dan bagaimana solusi atau pemecahan masalahnya?	Permasalahan yang di Kranggan itu karena Kranggan berbatasan dengan kabupaten lain jadi ada beberapa petani yang membeli pupuk di wilayah yang dekat dengan tempat tinggal mereka yang pelaksanaan kartu taninya itu belum ketat, permasalahan yang kedua SDM petani yang rendah kurangnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, ketiga kurangnya pemahaman masyarakat misal seperti pengumpulan SPPT yang hanya mengumpulkan satu saja tidak semua dikumpulkan yang berakibat pada kurangnya kuota pupuk yang diberikan.
28	Apakah perlu adanya kerjasama dengan lembaga lain berkaitan dengan kartu tani?	Kalau dengan OPD semua sudah berkerjasama dengan pertanian perdagangan dll, tapi kalau lembaga swasta sepertinya belum ada Cuma dengan BRI itu
29	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Mendukung sekali, karena disitu ada database, dengan adanya data kartu tani itu kita enak untuk menentukan kegiatan karena kita sudah tahu petani A , B itu menanam apa itu kita tahu
30	Bagaimana harapan anda mengenai kartu tani kedepan?	Harapan kedepannya supaya Kartu Tani bisa diterapkan menyeluruh dikecamatan Kranggan, selain itu meningkatya penggunaan pupuk organik

3. Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) I

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Waktu : 09.30

Lokasi : Inasa Tani Makmur

Nama Narasumber : Syahrir

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Ada paling satu bulan sekalitidak mesti juga mbak, kadang satu bulan atau dua bulan sekali
2	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu tani itu berfungsi biar pupuk bersubsidi itu tepat sasaran
3	Apa tujuan dan sasaran dari adanya pro gram kartu tani?	Tujuannya ya biar tepat sasaran, sasarannya kepetani yang membutuhkan
4	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Manfaat nya kalau sebenarnya untuk toko malah membuat toko sepi karena tiap toko dibagi perwilayah sesuai dengan RDKK. Kalau toko ini wilayah desa Sanggrahan, Kemloko, Purwosari, Kramat
5	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Sudah jelas mbak, karena intinya yang penting petani membeli pupuk itu harus memakai kartu
6	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Sama mbak tidak membngungkan karena intinya klaw membeli pupuk harus pakai kartu tani
7	Adakah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dari dinas setempat? Seperti apakah bentuk sarana dan prasarana tersebut? Apakah fasilitas yang di sediakan sudah cukup mendukung?	Yaa paling Cuma dari BRI itu mbak mesin EDC, kalau dari dinas pertanian tidak ada

8	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Sebenarnya cukup, tapi menurut petani masih ada yang merasa kurang
9	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya kalau mati listrik kemudian batrainya habis, kadang sinyalnya juga trouble jadi solusinya kartunya harus ditinggal digesek kalau sudah normal kembali mesinnya
10	Adakah insentif yang diberikan kepada Pemilik kios jika melayani pembelian pupuk bersubsidi jika sesuai dengan prosedur?	Kalau bonus tidak ada mbak, malah kerugiannya tokonya menjadi sepi
11	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Pembeliannya sesuai dengan RDKK atau kuota yang tersedia, boleh diambil secara berkala
12	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau subsidi harus menggunakan kartu tani, tapi kalau tidak membawa kartu Tani pakai yang Nonsubsidi lebih mahal sekitar 250 an ribu lebih
13	Apakah ada kendala dalam penjualan pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya lebih sepi, buat petani yang tidak mempunyai kartu tani jadi susah kasihan petaninya
14	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Mendukung mbak, tapi banyak petaninya yang mengeluh karena kurangnya pupuk

4. Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) II

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Waktu :10.15

Lokasi : Inasa Tani (Pendowo, Ngropoh, Badran, Kranggan)

Nama Narasumber : Pak Tri

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Kalau dari dinas pertanian sering ada tapi tidak pasti kadang sebulan sekali kadang dua bulan sekali kadang juga tiga bulan sekali, tidak pasti waktunya.
2	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi iebijakan kartu tani?	Kartu tani itu fungsingya agar pupuk tepat sasaran ke petani
3	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuannya agar pupuk bersubsidi itu tepat sasaran, sasarannya ke petani
4	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Kalau menurut saya banyak petani yang mengeluh, karena pupuk nya kurang tidak sesuai dengan kebutuhannya, contoh nya Sebayon dan Pendowo rata-rata per petani dapatnya kurang dari satu sak, mungkin itu kesalahan pada yang mendengarkan atau yang menyampaikan, soalnya berdasarkan kir tanah
5	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Sudah jelas, intinya kalau pakai kartu tani yang dilayani, kalau tidak membawa kartu tani tidak dilayani
6	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berpa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Kalau kumpulannya berapa kali lupa, kadang ada yang ngontrol ke kios langsung, pernah ada sosialisasi dari dinas temanggung dari kranggan juga pernah, yang disampaikan sama intinya harus menggunakan kartu tani
7	Adakah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dari dinas setempat? Seperti apakah	Paling ini mesin EDC dari BRI

	bentuk sarana dan prasarana tersebut?	
8	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Rata-rata kurang, masih banyak petani yang mengeluh karena pupuk kurang tidak sesuai dengan kebutuhan
9	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya kadang sinyal eror, kadang mesinnya eror jadi harus memanggil BRI untuk memperbaikinya
10	Adakah insentif yang diberikan kepada Pemilik kios jika melayani pembelian pupuk bersubsidi jika sesuai dengan prosedur?	Katanya ada dari BRI, kadang langsung masuk rekening tapi ini sejak tahun 2019 belum ada
11	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Petani datang kesini membawa kartu tani ke kios, pembayaran sekarang dipermudah bisa kes bisa lewat atm (kartu Tani) kalau kes, sini menransfer ke pembelinya dulu sesuai yang dibayarkan. Pupuk yang diberikan sesuai dengan kuota yang tersedia. Kalau dulu ATM harus terisi untuk membeli pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, tapi sekarang dipermudah karena kasihan petani apalagi petani yang sudah sepuh-sepuh jika harus mengantri bank yang lama cuma untuk pembayaran penebusan pupuk bersubsidi 100.000, 200.000
12	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Banyak banget kalau perbedaan harga Subsidi dengan Nonsubsidi, kalau Subsidi satu Sak 90.000 kalau Non Subsidi harganya sekitar 260.000 an, kita menyediakan Cuma kalau ada pesanan
13	Apakah ada kendala dalam penjualan pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya banyak petani yang mengeluh, kasihan juga kalau petani sudah datang jauh-jauh tapi ternyata kartunya ketinggalan kasihan jika harus balik kerumah lagi, kadang juga kartu taninya ketlingsut, padahal untuk memuat lagi prosesnya ribet bisa setahunan.
14	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa mendukung mbak, biar pupuk bersubsidi itu tepat sasaran

5. Kios Penyalur Pupuk Lengkap (KPL) III

Hari/ Tanggal : Kamis, 30 Januari 2020

Waktu : 11.00

Lokasi : Usaha Tani

Nama Narasumber : Koh Tin

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Iyaa mbak setiap sebulan sekali dua bulan sekali kadang juga tiga bulan sekali, tidak mesti
2	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu Tani itu Kartu berupa Kartu ATM yang fungsinya untuk menebus Pupuk bersubsidi
3	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Kalau Tujuanya yaa biar pupuk tepat sasaran dibeli oleh petani yang benar-benar membutuhkan, tidak disalahgunakan. Sasarannya untuk petani-petani
4	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Manfaatnya untuk menebus pupuk bersubsidi bisa juga untuk menabung tapi masih jarang prtani yang menggunakan kartu taninya untuk menabung
5	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Sudah mbak, intinya sama kok kalau pembelian pupuk bersubsidi wajib menggunakan kartu tani
6	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berpa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Berapa kalinya lupa mbak, tapi yang di sampaikan itu sama kok intinya tiap ada petani yang membeli pupuk bersubsidi harus menggunakan kartu Tani
7	Adakah sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung dari dinas setempat? Seperti apakah bentuk sarana dan prasarana tersebut? Apakah fasilitas yang di sediakan sudah cukup mendukung?	Fasilitas yang diberikan Cuma ada dari BRI berupa mesin EDC untuk transaksi penjualan pupuk bersubsidi.

8	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Kalau dilihat selama ini masih ada beberapa petani yang masih kekurangan kuota pupuknya
9	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Terkendala sinyal yang kurang bagus, kadang juga mesinnya eror, kadang batrainya habis pas mati lampu
10	Adakah insentif yang diberikan kepada Pemilik kios jika melayani pembelian pupuk bersubsidi jika sesuai dengan prosedur?	Sejauh ini belum ada insentif yang diberikan dari dinas, tugas kita Cuma melayani pembelian pupuk menggunakan kartu tani. Malah sejak ada kartu tani pelanggan jadi berkurang karena wilayahnya sudah dibatasi
11	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Prosedurnya petani tinggal datang ke kios wajib membawa kartu tani, kemudian kalau uangnya kes, kita mentransfer uang dulu ke kartu petani sesuai yang dibayarkan kemudian mesin digesek nanti akan muncul kuota pupuk yang tersedia, petani membeli pupuk sesuai ketersediaan kuota
12	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau pupuk bersubsidi pembeliannya harus menggunakan kartu tani harganya 90.000 per sak, tapi kalau pupuk non subsidi harganya jauh lebih mahal sekitar 260 ribuan per sak
13	Apakah ada kendala dalam penjualan pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya sering mendapatkan keluhan dari masyarakat karena kuota pupuk yang diberikan hilang, kadang sudah sampai kios tapi kartu ketinggalan atau ketlingsut sehingga dengan terpaksa kami menyuruh petani pulang lagi mengambil kartu nanti kita yang dapat omelan karena tidak mau melayani tanpa kartu tani
14	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Mendukung, supaya kedepannya petani Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan adanya kartu tani

6. Ketua Gapok Tani I

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020

Waktu :13.30

Lokasi : Rumah Bapak Marjoko Desa Kramat

Nama Narasumber :Marjoko

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Sosialisasinya lewat pertemuan kelompok yang dihadiri oleh penyuluh
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Klau orang sini pada titip kartunya, suruh ken belikan pupuk saya, samar do ilang kartunya, disisi lain lokasinya yang jauh kramat ke kranggan
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Kalau dari BRI terbatas ang disosialisasikan paling Cuma ke ketua kelompok tani dulu pernah sekali
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu untuk petani menebus pupuk, karena kemarin pupuk itu salah sasaran, dengan kartu tani kita juga tahu jatah pupuk nya saya. Tapi tidak saya tebus semua, masyarakat mulai kembali ke alam menggunakan pupuk organik untuk menjaga tanah juga tanaman. Latar belakang untuk menjaga subsidi biar tepat sasaran
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Biar tepat sasaran, orang yang berkepentingan tidak dapat membeli pupuk bersubsidi. Sasarannya ke peteni-petani yang mempunyai lahan garapan dan yang nanam
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Sekarang ini masih biasa-biasa saja, tapi untuk kedepannya akan lebih ketat lagi kalau mau membeli harus menggunakan kartu tani
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Kalau untuk kalangan kita jelas mbak, tapi kalau untuk petaninya kadang pas kumpulan pada merokok, pada ngobrol sendiri, bahkan kadang yang mengantuk, hal tersebut yang

		menyebabkan masih ada yang belum paham mengenai kartu tani
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Tiap pertemuan belum tentu membahas kartu tani,
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Mempunyai mbak, ahli dalam bidang pertanian, tapi yang penting itu konsisten dari pihak KPL nya untuk menjual pupuk harus menggunakan kartu tani
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Tidak mbayar mbak, Cuma saya mengumpulkan KTP per Petani kemudian saya yang foto copy ke Kranggan karena di sini tidak ada foto copyan, jadi membayarnya Cuma untuk ganti foto copy
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Turah mbah, soalnya sebagian pakai pupuk organik atau pupuk kandang
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya jauh, sama kalau pas kartunya ketinggalan di rumah harus balik lagi
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Disini masih jarang yang membeli pupuk kimia karena masyarakat masih pada menggunakan pupuk organik, selain itu yang ditanam kopi, jahe tidak membutuhkan pupuk kimia, beda dengan masyarakat pegunungan sana yang ditanam bakau, sayuran itu membutuhkan pupuk kimi, permasalahan yang kedua karena wilayah Kramat dengan KPL di Kranggan yang jaraknya lumayan jauh, yang tentunya membutuhkan ongkos transportasi yang lebih, misal ngojeg ya sekitar 20 ribu, jadi masyarakat lebih memilih membeli di pengecer terdekat meskipun harganya lebih mahal 10 ribu. Nah solusinya kartu tani dikumpulkan ke saya kemudian saya yang membelikan di

		kranggan nanti petani tinggal mengambil di saya.
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Mengumpulkan KTP dan SPPT, kalau tidak ada bisa minta surat keterangan dari desa bahwa bapak ini benar-benar menggarap lahan ini
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Tinggal datang ke KPL yang telah di tunjuk dengan membawa kartu tani dan uang pastinya
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Tg Syahrir saya, depan kelurahan Kranggan
17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau pupuk subsidi harus menggunakan kartu tani
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Tidak mbak, saya yang kesulitan yang mengumpulkan persyaratannya itu kalau masyarakat saking penak e
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Mendukung saya mbak, karena itu kebijakan dari pemerintah pasti juga tujuannya baik
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapannya kedepan masyarakat bisa kembali lagi ke Pupuk organik, sama KPL itu kalau bisa tempatnya jauh dari masyarakat, biar masyarakat tidak terlalu jauh untuk membeli pupuk bersubsidi

7. Ketua Gapok Tani II

Hari/ Tanggal : Jum'at, 07 Februari 2020

Waktu : 14.30

Lokasi : Rumah Bapak Isrofi

Nama Narasumber : Muh Isrofi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Iyaa mbak ada, dinas ke kecamatan, kecamatan ke Gapok Tan, Gapok Tan ke Kelompok Tani, nanti Ketua Kelompok I menyampaikan Ke Petani, tetapi dari dinas juga kadang datang ke pertemuan kelompok. Dulu awal-awal ada kartu tani sering ada sosialisasi dari Dinas terahir ada pemantapan sama evaluasi dari Dinas temanggung karena Kranggan paling bawah se Temanggung
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Kalau saya dari tingkatan Gapok Tan Sangat Paham, tapi dari tingkatan Petani mungkin baru sekitar 50% yang paham mengenai kartu tani. Karena SDM petani yang rendah maka perlu proses untuk masyarakat sadar menggunakan kartu tani.
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	BRI ke masyarakat langsung belum pernah, BRI pernah sekali ke para ketua Gapok Tan, Ketua Kelompok tani waktu pertama kali Kartu turun.
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Latar belakangnya penyalahgunaan pupuk, tanah yang rusak karena over penggunaan pupuk kimia karena SDM petani yang rendah sehingga menggunakan pupuk berlebihan dengan harapan tanaman lebih subur, tetapi sebenarnya malah tanaman menjadi kurang sehat, tanah semakin rusak, jadi sekarang Bengkal diarahkan untuk ke Organik
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuannya untuk mencegah penyalahgunaan pupuk, menjaga pupuk biar

		tepat sasaran juga agar petani mau menabung di Bank, tapi realisasinya masih jarang petani yang mau nabung di Bank, karena kebanyakan petani itu dari golongan menengah kebawah yang untuk kehidupan sehari-hari aja kadang masih kurang. Sasarannya untuk petani yang mempunyai lahan dibawah 2 hektar tapi bisa disiasati jika punya lahan 4 hektar maka bisa 2 hektar atas nama bapak e yang 2 hektar atas nama ibuk e
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Manfaat nya selain untuk menebus pupuk juga dengan kartu tani bisa untuk sarana perbankan, untuk masalah penjualan ke Bulog belum bisa berjalan karena harga jual ke Bulog lebih rendah dari pada harga pasaran
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Kalau saya selaku Gapok Tan sudah sangat jelas. Pernah ada sosialisasi dari dinas Provinsi, sosialisasi dari Dinas Temanggung, Dari BPP Kranggan, semua yang disampaikan sama saja intinya tidak membingungkan bagi saya
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Klau saya selaku ketua Gapok Tan sering, kalau ke petani tergantung keaktifan kelompok sering melakukan pertemuan rutin apa tidak, kalau sering ada pertemuan maka akan lebih sering sosialisasinya. Kalau gapok tan sini tiap Tri Wulan
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Sebenarnya sudah semua, tapi tiap orang kan punya kreteria yang berbeda-beda cara penyampaian nya juga berbeda-beda, tapi menurut saya sudah mempunyai keahlian dalam bidangnya, tergantung masyarakat juga yang menerimanya
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Tidak mbak, membuatnya gratis tidak ada pungutan biaya
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Sebenarnya sangat cukup jika petani dalam penggunaannya itu tidak

		berlebihan sesuai dengan kebutuhan tanaman
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kalau kendala peralatan, mungkin dalam hal transportasi karena jarak antara Kranggan dengan Bengkulu itu lumayan jauh, jadi Jika ngojog cukup mengeluarkan uang banyak
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Pertama KPL melayani Petani yang tidak membawa kartu tani, daerah sini Bengkulu masyarakat sebagian mengambil pupuk di Plumbon, kalau masyarakat Pare ngambil di Secang karena lebih dekat dan bisa tanpa menggunakan kartu tani. Hal ini jika penebusan pupuk tidak terinput di kartu tani maka untuk tahun kedepan pupuknya dikuangi karena anggapan pemerintah Kranggan Tidak butuh Krtu Tani, maka solusinya saya berinisiatif untuk mengumpulkan kartu tani dari masyarakat, nanti kemudian Pupuk saya tebus semua menggunakan uang kas Gapok Tani, kemudian masyarakat tinggal membeli kesini ke Gapok Tani tanpa harus jauh-jauh ke Kranggan
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	mengumpulkan SPPT sama fotocopy KTP, tapi biar waktunya lebih cepat saya yang mengalah harus mendatangi petani satu persatu, jika sudah terkumpul maka diserahkan ke BPP kranggan
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Kalau mau membeli pupuk tinggal datang ke KPL yang telah ditunjuk, dengan menyerahkan kartu tani dan uang, kemudian pihak KPL mentrasfer uangnya ke Kartu Tani kemudian kartu di gesek nanti akan muncul banyak nya kuota, kemudian petani membeli sesuai kuota yang tersedia
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Ke KPL yang telah di tunjuk, kalau KPL nya ada 3 di Kranggan semua
17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau untuk pupuk Subsidi sama saja harganya tapi syaratnya harus menggunakan kartu tani, tapi kalau untuk pupuk non subsidi harganya jauh lebih mahal sekitar 260 ribuan

18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Kalau petani di mudahkan karena tinggal mengumpulkan SPPT sama fotocopy KTP, tapi biar waktunya lebih cepat saya yang mengalah harus mendatangi petani satu persatu, jika sudah terkumpul maka diserahkan ke BPP kranggan
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa sangat mendukung untuk kebaikan pertanian kedepan
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapan saya semoga ke depannya KPL lebih dekat dengan masyarakat, bahkan Bengkulu pun siap jika menjadi KPL.



8. Ketua Kelompok Tani I

Hari/ Tanggal : Rabu, 05 Februari 2020

Waktu : 20.30

Lokasi : Rumah Bapak Edi Suwito

Nama Narasumber : Edi Suwito

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Dari dinas pertanian ada sosialisasi, ada sosialisasi untuk ketua kelompok sekecamatan tiap sebulan sekali, kadang dua bulan sekali, kalau sosialisasi ke petani melalui pertemuan kelompok rutin.
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Kalau saya ada masyarakat yang belum paham kalau saya paham saya jelaskan, tapi kalau saya belum paham saya langsung menghubungi penyuluh
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Dari pihak Bank itu pernah sekali pas pertama penerimaan kartu tani tapi tidak ke petani langsung tapi ke perwakilan para ketua kelompok
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu tai gunanya untuk membeli pupuk yang bersubsidi dari pemerintah. Latar belakangnya agar pupuk bersubsidi tidak dibeli oleh orang-orang yang bertanggung jawab, misal orang yang mempunyai perkebunan luas
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuan Krtu tani untuk membeli pupuk bersubsidi, sasarannya ke petani yang mempunyai tanah 2 hektar, satu nama maxsimal mempunyai tanah 2 hektar
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Manfaatnya kalau secara pembelian masih kepenak mbiyen, tapi lebih baik kalau ada kartu tani biar orang yang udah kaya itu tidak bisa membeli pupuk bersubsidi
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani	Sudah paham, intinya pembelian pupuk harus menggunakan kartu tani

	kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Dari Temanggung jarang kesini paling ke BPP, yang kesini dari BPP atau penyuluh. Kalau yang disampaikan nggeh sama saja intinya
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Iya sudah punya keahlian semua, mumpuni lah kalau dilihat dari pendidikannya juga sudah sesuai dengan bidang perkerjaannya
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Tidak, gratis
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Harusnya Cukup, kalau yang tidak cukup itu karena sebenarnya ada jatah Urea sama Ponska tapi masyarakat hanya mengandalkan pupuk urea saja
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Tidak ada, lancar
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Kurang kesadaran masyarakat dalam penggunaan pupuk yang berlebihan
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Mengumpulkan KTP dan SPPT serta nama ibu kandung, kemudian dikasihkan ke PPL, annti PPL yang menginput Data RDKK nya, kalau kartunya yang ngasih dari pihak BRI melalui ketua kelompok tani yang hadir sekalian sosialisasi dari BRI waktu itu.
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	kalau mau membeli pupuk tinggal datang ke Kios dengan membawa kartu tani, nanti kartunya di gessek akan muncul kuota pupuk sesuai dengan kebutuhan atau lahan yang diajukan
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Kalau di desa sini membelinya di KPL yang telah di tunjuk, kalau di desa sini di koh tin

17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau non subsidi harga perkilonya sekitar 5 ribu jadi kalau dihitung persak sekitar 250 ribu jauh lebih mahal dari harga pupuk bersubsidi
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Kalau kesulitan tidak ada, Cuma saya yang ngalah nariki data per petani sama ngisi Blanko yang dari BRI
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa mendukung banget, karena untuk menjaga kelangkaan pupuk bersubsidi karena dibeli oleh pihak yang berkepentinagn
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapan saya supaya kartu Tani untuk kedepannya penerapannya lebih baik lagi artinya semua di wajibkan membawa kartu tani, dan harapan yang lainnya supaya KPL lebih dekat dengan masyarakat.



9. Ketua Kelompok Tani II

Hari/ Tanggal : Jum'at, 07 Februari 2020

Waktu : 14. 45

Lokasi : Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya
(P4S)

Nama Narasumber : Amin Sodikun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Yaa sering ada mbak dari dinas temanggung dari penyuluh Kranggan ke Ketua Kelompok Tani
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Kalau ada masyarakat yang tanya, kalau saya bisa menjawab saya jawab, tetapi kalau tidak bisa saya tanyakan ke penyuluh
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Dulu pernah sekali waktu pertama kartu tani turun, sampai sekarang belum ada sosialisasi lagi dari BRI
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu tani berguna untuk mengurangi pupuk kimia
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuannya untuk mengurangi pemakaian pupuk berlebihan, sasarannya untuk petani yang luas lahan garapannya krang dari 2 Hektar
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Manfaatnya selain untuk penebusan pupuk bersubsidi, Kartu tani juga bisa untuk menabung
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Untuk ke saya Jelas, tapi untuk kepetani secara langsung masih ada beberapa petani yang belum paham secara jelas mengenai kartu Tani
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak	Kalau berapa kalinya lupa bak, karena tiap sosialisasi bukan hanya membahas kartu tani saja tapi kadang juga membahas benih dll. Tapi yang disampaikan antar pelaku kebijakan misal dari dinas pertanian

	membingungkan bagi saudara	Temanggung dengan Penyuluh Kranggan intinya sama tidak membingungkan Cuma cara penyampaian tiap orang yang beda.
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Kalau dulu kurang diperhatikan sama penyuluh tapi kemudian ada rolling/ atau pergantian PPL sekarang sudah bagus dan menurut saya sudah mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing, dari segi pendidikan juga mendukung.
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Oh tidak mbak tidak mbayar
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Kalau kurang mungkin karena faktor masyarakat yang salah dalam pengumpulan SPPT yang hanya dikumpulkan satu, jadi pupuk yang diberikan sesuai dengan luas lahan yang diajukan, kedua karena faktor masyarakat yang masih menggunakan pupuk secara berlebihan
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya jarak yang jauh sehingga keterbatasan alam transportasi, karena kalau petani itu kan biasanya kendaraannya yang khusus kendaraan untuk kesawah sehingga kadang petani kalau lihat lampu merah saja sudah takut
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Masalahnya jarak KPL dengan masyarakat yang jauh
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Petani Cuma mengumpulkan SPPT yang dimiliki sama fotocopy ke Saya ketua kelompok tani, tapi kebanyakan petani pada males menunda-nunda waktu jadi saya yang mengalah mengambil data ke petani
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Kalau mau beli sekarang suah mudah mbak tidak harus ada saldonya, jadi petani tinggal datag saja ke KPL yang telah ditunjuk sama membawa kartu Tani
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Ke kios KPL yang telah di tunjuk di Kranggan, tapi karena jarak yang jauh maka dari kellompok tani berinisiatif

		semua kartu tani dikumpulkan ke ketua kelompok, kemudian ketua kelompok menebus pupuk ke agen nanti petani tinggal beli kesini
17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Klau pupuk bersubsidi itu sama saja mbak harganya paling Cuma selisih 5.000 sampai 10.000 tergantung dimana kita membeli, kalau ke KPL langsung harga 90.000 persak nanti kalau sampai ke pengecer sekitar 5.000 sampai 10.000 tapi lebih dekat lokasinya
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Dalam pebuhatannya tidak menemui kesulitan, yang kesulitan saya sebagai ketua kelompok yang mengumpulkan datanya
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa mendukung mbak, semoga kedepannya penerapannya lebih baik lagi
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapannya edepan supaya masyarakat lebih sadar lagi dalam memelihara tanah dengan mengurangi penggunaa pupuk kimia

10. Petani I

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020

Waktu : 11.15

Lokasi : Rumah bapak Tasrobun Sebayon

Nama Narasumber : Bapak Tasrobun

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Iyaa ada sosialisasi melalui pertemuan kelompok rutin mbak
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Yaa paham nya kalau mengenai kartu tani diwajibkan membawa kartu Tani
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Tidak ada mbak
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Sarana untuk penebusan pupuk bersubsidi, kalau yang melatar belakangi kurang paham Cuma taunya kalau mau membeli pupuk harus pakai kartu tani
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Kurang tau mbak
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Tidak tau mbak tidak ada sosialisasi tujuannya buat apa kegunaannya buat apa tidak disosialisasikan, tapi kartu tani di lampiri buku tabungan, tapi tidak pernah buat menabung
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Yaa jelasnya cuma kalau membeli kartu tani harus membawa kartu tani.
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani	jarang mbak ada sosialisasi mengenai kartu tani, kartu tai saja baru turun beberapa bulan yang lalu padahal pembuatannya sudah dari tahun 2017. Kalau sosialisasi mengenai kartu tani

	itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	sudah lama tidak ada, desa sini kurang diperhatikan masalah pertanian
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Kurang tau mbak karena sudah lama tidak ada PPL kesini.
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Tidak mbak gratis
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Kebanyakan warga sini masih kurang karena kuota pupuk itu menurut luas lahan, tadinya itu tidak disuruh mengumpulkan semua SPPT, PPL dulu bilanganya satu cukup cuma buat syarat saja tidak harus semua dikumpulkan, jadi sekarang banyak warga desa yang kekurangan, rata-rata cuma dapat satu atau dua sak perorang jauh dari kebutuhan petani
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Tidak ada kendalanya, Cuma pupuk yang di berikan kurang
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Permasalahannya kurang diperhatikan sama pemerintah, sama kesalahan dalam penyampaian informasi yang menyebabkan masyarakat kekurangan pupuk bersubsidi
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Dulunya serentak bersamaan mengumpulkan SPPT sama foto copy KTP, tapi itu prosesnya lama daftar nya tahun 2017 tahun 2019 an pertengahan tahun kartunya baru turun, sampai banyak masyarakat yang menanyakan jadi turun apa tidak
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Belinya mudah tinggal datang ke KPL sama membawa kartu tani
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Di KPL kranggan, tetapi kalau kurang kebanyakan masyarakat desa mriki tumbase ting Medono

17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau tumbas pupuk nonsubsidi tidaiga ratusan ribuk pernah beli katanya harganya
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Tidak ada kesulitan dalam pebuatannya, hanya saja turunnya lama
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa medukung mbak
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapannya untuk kedepan masyarakat petani desa sini lebih diperhatikan lagi dan diarahkan



11. Petani II

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020

Waktu : 11.45

Lokasi : Rumah Bapak Muhtadin

Nama Narasumber : Muhtadin

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Iyaa ada lewat pertemuan kelompok tani
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Taunya saya kalau membeli pupuk bersubsidi itu harus menggunakan kartu tani, nanti di kartu tani ada kuota pupuknya. Kalau ada yang belum paham Kepak kadus biasanya tanyanya, nanti pak kadus yang menyalurkan ke ketua kelompok atau ke penyuluh
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Belum pernah ada sosialisasi dari BRI ke petani langsung
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu tani itu di gunakan untuk mengurangi harga pupuk jadi lebih murah. Kalau latab belakannya tauya cuma program dari Pemerintah Provinsi. Kalau lebihnya tidak tau
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuannya taunya yaa mungkin pemberdayaan petani
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Manfaatnya tauya untuk menebus pupuk, kalau manfaat lainnya kuran paham, kartu tani juga tidak digunakan untuk menabung
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Belum mbak, karena disini yang diundang untuk kumpulan itu cuma perwakilan dari masyarakat saja, jadi kadang ada salah sasaran, orang yang tidak dalam bidang pertanian tapi sering dapat bantuan benih dll
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi?	disini yang diundang untuk kumpulan itu cuma perwakilan dari masyarakat

	Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? tidak membingungkan bagi saudara	saja, jadi kadang ada salah sasaran, orang yang tidak dalam bidang pertanian tapi sering dapat bantuan benih dll
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Kurang paham mbak, tapi desa sini jarang di sentuh jarang ada pertemuan dengan penyuluh
10	dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Tidak membayar
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Kurang, hanya dapat 2 sak padahal kebutuhannya 4 sak
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kalau pembeliannya mudah tidak ada kendala
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Permasalahan di desa sini kurang di perhatikan dan kurang tersentuh, sama terdapat kesalahan dalam penyampaian dan penerimaan informasi
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Pembuatannya Cuma mengumpulkan SPPT dan Foto copy KTP ke pak kadus Cuma disini jadinya lama beda dengan desa lain
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Pembeliannya mudah tinggal datang ke kios pupuk yang di tunjuk, bisa ecer atau persak, tapi kalau ecer hitungannya lebih mahal
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Di kios Pupuk Kranggan, kalau kurang rata-rata pada beli di Medono
17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau pupuk bersubsidi harganya sama persak 90 ribu tapi kalau non subsidi belum pernah beli karena harganya mahal
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Tidak ada kesulitan
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa mendukung karena data petani lebih valid
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapannya untu kedepan desa saya lebih diperhatikan lagi dan dilakukan dengan adil dan diarahkan ke pertanian yang lebih maju

12. Petani III

Hari/ Tanggal : Kamis, 06 Februari 2020

Waktu : 13.00

Lokasi : Balai Desa Kramat

Nama Narasumber : Bapak Sumian

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Ada, tidak menentu waktunya, mungkin kalau dari desa minta nanti dari dinas siap untuk memfasilitasi
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Teknisnya yaa tanya ke PPL itu mbak
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Belum pernah mbak
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Kartu tani itu untuk mempermudah memperoleh pupuk bersubsidi supaya dapat harga yang murah. Kalau latar belakang nya belum paham
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuannya untuk mencukupi pemupukan tanaman sesuai dengan luas lahan, sasarannya untuk petani dan kelompok petani
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Pertama mudah untuk mendapatkan pupuk, kedua kalau pakai kartu tani harganya lebih murah
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Yaa sebagian ada yang jelas, kan yang namanya manusia beda beda cara menangkapnya
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Sosialisasi nya hanya dari PPL dan Ketua Kelompok tani yang disampaikan sama

9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Sepertinya sudah mbak kalau saya lihat, ppl yang meangani desa ini itu bagus
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani di pungut biaya?	Tidak mbak
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Pas pembuatan kartu tani itu disuruh mengumpulkan SPPT, tapi ada beberapa petani yang merasa jumpalah kuotanya kurang, kemudian lapor ke penyuluh jadi sekarang rata-rata sudah cukup kuota pupuk yang diberikan
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kendala peralatan tidak ada karea sekarang bisa membayar kes ke kios tidak seperti dulu harus menabung ke Bank terlebih dahulu
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Permasalahannya KPL tiga-tiganya berada di Kranggan, jadi kurang dijangkau oleh masyarakat seperti di desa ini desa perbatasan.
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah berjalan sesuai SOP?	Cuma disuruh mengumpulkan KTP sama SPPT, itu turunnya atau jadinya Krtu taninya cepet kok
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Membelinya tiggal datang ke kios pupuk yang ditunjuk dengan wajib membawa kartu tani dan uang yang paling penting
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Saya sering membeli pupuk ditetangga saya ang nyetok pupuk dirumah, harganya lebih mahal 10.000 dari pada di kranggan tapi lebih bsik beli itu dari pada harus ke kranggan yang letaknya jauh
17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak i?	Kalau harga non subsifi yang tidak menggunakan kartu tani di KPL harganya jauh lebih mahal
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Tidak ada mbak
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Yaa mendukung sebenarnya, tapi letak KPL nya jauh jadi mending tumbas di warung yang ada di dusun
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapannya supaya KPL lebih dekat lagi dengan masyarakat, jaraknya tidak jauh

13. Petani IV

Hari/ Tanggal : Jum'at, 14 Februari 2020

Waktu : 20.00

Lokasi : Rumah bapak Suparman Pare

Nama Narasumber : Suparman

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah dari pihak dinas pertanian melakukan sosialisasi?	Yaa kalau tentang kartu tani dulu waktu pertama kali kartu tani dulu pernah ada sosialisasi, tapi sejak setahun lebih ini kelompok tani belum ada sosialisasi lagi atau pertemuan kelompok lagi.
2	Jika ada yang belum paham mengenai kartu tani, bagaimana cara saudara mendapatkan informasi mengenai kartu tani?	Pertama mencari info ke Ketua kelompok dulu, kalau tidak ke PPL
3	Apakah dari pihak Bank BRI melakukan sosialisasi kepada Petani mengenai Kartu Tani?	Kalau di desa ini belum pernah ada sosialisasi dari BRI
4	Apa yang saudara ketahui mengenai kartu tani? dan apa yang melatar belakangi kebijakan kartu tani?	Yang saya tahu kartu tani itu untuk memudahkan membeli pupuk bersubsidi. Yang melatar belakangi kartu tani tani kurang paham Cuma taunya untuk me,mudahkan pupuk bersubsidi
5	Apa tujuan dan sasaran dari adanya program kartu tani?	Tujuannya ya itu mbak untuk memudahkan membeli pupuk bersubsidi, kalau sasarannya untuk petani yang punya lahan atau tidak kurang paham karena yang menggarap sawah itu juga mendapatkan kartu tani
6	Apa manfaat dari adanya program kartu tani?	Pertama untuk menebus pupuk bersubsidi, terus katanya juga bisa buat minjam uang di BRI tapi bagaimana caranya syaratnya apa saja saya juga tidak tau. Waktu sosialisasi juga tidak detail penyampaian informasinya, saya

		Cuma bisa untuk mendapatkan pupuk kalau yang lain belum pernah
7	Sudah jelaskah penyampaian informasi tentang Kartu Tani kepada para pelaksana dan pengguna kartu tani?	Sudah jelas karena intinya yang saya pahami dalam pembelian pupuk harus menggunakan kartu tani
8	Sejak di Keluarkan Kartu Tani sudah berapa kali sosialisasi? Apakah yang disampaikan beberapa pelaku kebijakan Kartu Tani itu sama? Artinya tidak membingungkan bagi saudara	Soal bingung atau tidak saya tidak tahu, karena waktu kumpulan saya tidak begitu aktif sama waktu penyampaian juga tidak begitu saya hiraukan
9	Apakah para pegawai yang mengelola kartu tani mempunyai pengetahuan dan keahlian dalam melaksanakan tugas?	Yaa yang namanya PPL itu kan mungsin sudah bersekolah tentang pertanian, mungkin yaa sudah ahli dalam pertanian, tetapi kadang antara teori yang diberikan sama praktek itu kadang tidak sesuai atau tidak dapat diterapkan karena perbedaan tanah atau lainnya
10	Apakah dalam pembuatan kartu tani, petani di pungut biaya?	Waktu itu tidak mbayar cuma ditariki persyaratannya saja
11	Apakah jumlah pupuk yang diberikan pemerintah sudah cukup memadai bagi petani?	Menurut saya pribadi setiap saya butuh pupuk itu kuota masih mencukupi kebutuhan, kadang juga lebih dari kebutuhan
12	Adakah kendala peralatan yang dihadapi dalam penjualan/ pembelian pupuk menggunakan kartu tani?	Kendalanya harus membeli ditoko pertanian yang telah di tunjuk tidak membeli ditoko lain
13	Apa permasalahan Kartu Tani di Kecamatan Kranggan ? dan apakah ada solusi yang telah diterapkan?	Permasalahannya mungkin karena SDM masyarakat yang rendah, kurang antusias terhadap program kartu tani ini, kebanyakan kalau sosialisasi kurang emperhatikan
14	Bagaimana prosedur pembuatan kartu tani? Apakah sudah berjalan sesuai SOP?	Dulu tinggal mengumpulkan SPPT, sama foto copy KTP ketua kelompok , kemudian setelah beberapa waktu kartunya jadi
15	Bagaimana prosedur pembelian pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani? Apakah sudah sesuai dengan SOP / petunjuk teknis?	Kalau mau membeli pupuk tinggal bilang ke kios pupuk mau beli kartu tani nanti kartu digesek sama Penjual Pupuk, entah ada saldonya apa tidak

		yang penting saya membayar kes langsung
16	Dimanakah anda membeli pupuk bersubsidi?	Di kios pupuk yang telah di tunjuk di koh tin
17	Apakah ada perbedaan harga antara pembelian pupuk menggunakan Kartu Tani dan tidak menggunakan Kartu Tani?	Kalau pupuk bersubsidi katanya iyaa ada perbedaan tapi saya belum pernah membelinya
18	Apakah anda menemui kesulitan dalam pembuatan kartu tani?	Tidak menemui kesulitan
19	Apakah anda mendukung kebijakan program kartu tani?	Ya mendukung, karena tiap mau embeli ppupuk selalu ditanyakan mana kartu tani nya
20	apa harapan anda untuk kartu tani kedepannya?	Harapan saya kartu tani untuk kedepannya tidak Cuma untuk membeli pupuk bersubsidi saja tetapi obat-obatan pertanian juga bisa mendapatkan subsidi dengan kartu tani

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung



Wawancara dengan Penyuluh dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kranggan



KPL I



KPL II



KPL III



Ketua Gapok Tani I Bapak Marjoko



Ketua Gapok Tani II Bapak Muh Isrofi



Ketua Kelompok I bapak Edi Suwito



Ketua Kelompok Tani II Amin Sodikun



Belaier Pertanian disalah satu Gapok Tani



Petani I Bapak Tasrobun



Petani II Bapak Muhtadin



Petani III Bapak Samian



Petani IV Bapak Suparman



Salah satu pupuk bersubsidi yang ditebus pakai kartu tani



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Setra Budi Nomor 01 Telepon 0293 491048 Fax 491313 Faksimil 0293 491313
surat elektronik : kesbangpol@temanggungkab.go.id laman : kesbangpol.temanggungkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 36 / 2020

- I. **DASAR** : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- II. **MEMBACA** : Surat dari Universitas Tidar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Nomor 158/UN57.F2/PG/2020 Tanggal 03 Februari 2020 . Perihal Ijin survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas /praktik kerja.
- III. Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survei / Penelitian / Riset /Magang / Pengambilan Data dan Praktek Kerja yang akan dilaksanakan oleh :
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : MILA KHOIRUN NISSA |
| 2. Kebangsaan | : Indonesia |
| 3. Alamat | : Pare RT 004 RW 001 Kel/Desa Pare Kec. Kranggan Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah |
| 4. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 5. No. Tlp/HP | : 085869460066 |
| 6. Penanggung Jawab | : Drs. Sujatmiko, MPA |
| 7. Anggota | : - |
| 8. Status Penelitian | : Penelitian Baru |
| 9. Judul Proposal | : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DI KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG |
| 10. Lokasi | : DINTANPANGAN, BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN KRANGGAN |
| 11. Asal Lembaga | : UNIVERSITAS TIDAR |

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan kegiatan tersebut tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan,
3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dan sponsor baik dan dalam negeri atau luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan,
4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban,
5. Surat rekomendasi survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja dapat dicabut dan dinyatakan tidak sah apabila

- a. Pemegang surat rekomendasi survei / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku;
 - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima peneliti;
6. Setelah selesai melakukan survey / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja supaya menyerahkan hasilnya kepada:
- a. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung berupa hard copy;
 - b. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung berupa soft copy;
- IV. Surat rekomendasi ijin survei / riset / penelitian / observasi / pengambilan data awal / studi pendahuluan / uji validitas / praktik kerja ini berlaku dari:
Tanggal 04 Februari 2020 s/d 04 Maret 2020
- V. Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Temanggung, 04 Februari 2020

a.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KAB. TEMANGGUNG
Kasi Ketahanan Sosial, Budaya, Agama, Komunitas,
dan Ekonomi



- Tembusan:** dikirim kepada Yth:
1. Bapak Bupati Temanggung (sebagai laporan);
 2. Kepala BAPPEDA Kab. Temanggung;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : Mila Khoirun Nissa
2. Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 25 Juni 1997
3. Agama : Islam
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Anak Ke : 1 (satu)
6. Alamat : Pare, Rt.04/Rw.01 Kranggan Temanggung
7. Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Khoyin
Pekerjaan : Petani
 - b. Nama Ibu : Rusti Istikharoh
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Pare, Rt.04/Rw.01 Kranggan Temanggung
8. Riwayat Pendidikan
 1. TK RA Al-Islam Pare (Pare, Kranggan, Temanggung, 2002)
 2. MI Al-Islam Pare (Pare, Kranggan, Temanggung, 2009)
 3. MTS Al-Islam Pare (Pare, Kranggan, Temanggung, 2012)
 4. MAN Parakan Temanggung (Kowangan, Temanggung 2015)